

Yellow

Black



Jl. Yos Sudarso 38-39-40 Tanjung Priok, Jakarta - 14320, Indonesia
 Phone : (62-21) 4301017, 4301703, 4300993 - Fax : (62-21) 43936175
 Website : www.klasifikasiindonesia.com
 Email : bki@klasifikasiindonesia.com

Magenta

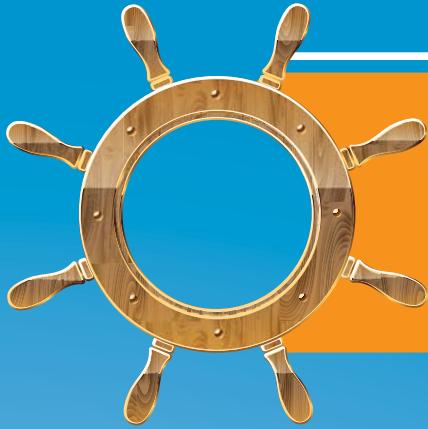
Cyan

ANNUAL REPORT LAPORAN TAHUNAN 2012

Annual Report 2012 Laporan Tahunan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)



PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero)



MENGUTAMAKAN MUTU PELAYANAN JASA
BERDASARKAN KOMITMEN YANG TINGGI
TERHADAP ASPEK KESELAMATAN DAN BERTINDAK
PROFESIONAL, INDEPENDEN SERTA TERPERCAYA
DI ATAS KEPENTINGAN SEMUA PIHK

GIVING PRIORITY TO THE QUALITY OF SERVICES BASED
ON HIGH COMMITMENT TO THE SAFETY ASPECT AND
ACT PROFESSIONAL, INDEPENDENT AND TRUSTED OVER
THE INTEREST OF ALL PARTIES



DAFTAR ISI

CONTENT

(1) Profil Perusahaan <i>Company Profile</i>	(39) Pengujian & Laboratorium <i>Testing & Laboratory</i>
(3) Visi dan Misi Perusahaan <i>Company Vission and Mission</i>	(42) Pengembangan SDM <i>Human Resources Development</i>
(4) Kebijakan Mutu Perusahaan <i>Company Quality Policy</i>	(45) Teknologi Informasi <i>Information Technology</i>
(5) Sambutan Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Message</i>	(45) Tanggung Jawab Sosial <i>Social Responsibility</i>
(8) Sambutan Direktur Utama <i>President Director Message</i>	(50) Tata Kelola Perusahaan <i>Corporate Governance</i>
(13) Aktifitas Manajemen <i>Management Activities</i>	(69) Kinerja Keuangan <i>Financial Performance</i>
(19) Klasifikasi Kapal <i>Ship Classification</i>	(74) Komisaris, Direksi dan Staf <i>Board of Commissioners, Director & Staff</i>
(31) Persetujuan Gambar <i>Drawing Approval</i>	(76) Komite Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) <i>The Biro Classification Indonesia Commite</i>
(31) Aktifitas Survey Klasifikasi <i>Classification Survey Activities</i>	(77) Kerjasama <i>Cooperation</i>
(33) Aktivitas Jasa Industri <i>Industrial Services Activities</i>	(78) Jaringan Operasional <i>Operational Network</i>
(34) Survey Statutoria <i>Statutory Survey</i>	(79) Daftar Kontak <i>List Of Contact</i>
(35) Otorisasi Statutoria <i>Statutory Authorization</i>	(82) Laporan Keuangan <i>Financial Report</i>
(36) Konsultasi & Supervisi <i>Consultancy & Supervision</i>	



Profil Perusahaan

Biro Klasifikasi Indonesia, juga dikenal sebagai BKI adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan dengan tujuan mulia untuk mendukung kemandirian industri perkapalan dan pelayaran nasional melalui pelayanan jasa klasifikasi dan jasa-jasa lainnya yang terkait. BKI dalam pelayanan jasanya melakukan riset dan mempublikasikan serta menerapkan standar teknik (Rules & Regulation) dengan melakukan kegiatan desain, konstruksi dan survey maritim terkait dengan fasilitas terapung, termasuk kapal. Standar ini disusun dan dikeluarkan oleh BKI sebagai publikasi teknik. Rules & Regulation yang dikembangkan tidak hanya struktur konstruksi lambung, namun juga meliputi peralatan keselamatan, instalasi permesinan dan kelistrikan.

Lingkup kerja dari BKI adalah melaksanakan survey dan sertifikasi untuk menjamin bahwa Rules & Regulation yang telah dikembangkan, diterapkan pada saat pembangunan kapal baru dan kapal yang sudah jadi. Untuk mempertahankan kondisi kapal tersebut, maka dalam prosesnya kapal diharuskan melakukan perawatan dan perbaikan yang terjadwal, dimana pelaksanaan ini akan dimonitor terus oleh BKI dengan melakukan survey periodik dalam mempertahankan klasifikasinya.

Penilaian kondisi kapal dilakukan berdasarkan survey yang profesional dan independen oleh surveyor klasifikasi yang memiliki kompeten dalam melakukan penilaian kondisi kapal. Hasil dari pemeriksaan dan penilaian ini berupa laporan dan sertifikat yang dijadikan acuan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Pemilik Kapal, Pihak Asuransi, Pemilik Cargo, Pencharter, Galangan Kapal, Pemerintah / Syahbandar / PSC dll.

Kegiatan usaha pada awal berdirinya BKI adalah kegiatan dalam bidang klasifikasi kapal (sebagai bisnis utama) dimana usaha ini dilaksanakan secara nirlaba, namun sejalan dengan perkembangan usaha, maka saat ini selain kegiatan di atas, juga melakukan diversifikasi usaha dengan mengembangkan kegiatan bidang jasa non klasifikasi, yaitu kegiatan usaha jasa konsultansi & supervisi. Sehingga saat ini kegiatan usaha BKI ada 2 (dua) kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha jasa Klasifikasi & Statutoria dan kegiatan usaha jasa Konsultansi & Supervisi.

Company profiles

Biro Klasifikasi Indonesia, also known as BKI is a State Owned Company which was founded with the noble aim to support the independence of the shipping industry and the national shipping via the classification services and other services related. In the service, BKI researching, publishing and implementing technical standards (Rules & Regulations) by doing the design, construction and maritime survey related to floating facilities, including ships. This standard is prepared and issued by BKI as technical publications. Rules & Regulations are not only developed the structure of the hull construction, but also includes safety equipment, machinery and electrical installations.

The scope of work of BKI carries out the survey and certification to ensure that the Rules & Regulations have been developed and implemented during the construction of new ships and ships in service. To maintain the condition of the vessel, then in the process vessel is required to perform scheduled maintenance and repairs, where the implementation will be monitored closely by carry out periodic surveys to maintain its class.

The assessment of the condition of the vessel based on a survey conducted independently by professional and a competent surveyor in assessing the condition of the vessel. The results of the examination and assessment are reports and certificates used as a reference by the parties concerned, including Ship's Owner, Insurance Party, Cargo Owner, charterer, Shipyard, Government / Harbour Master / PSC etc.

At the beginning, business activity of BKI is ship classification (as the main business) as a non-profit business, but in line with the growth of the business, today in addition to the above activities, as well as to diversify its business by developing non-class service sector activity, namely business consulting and supervision services. So, the current business activities in BKI there are 2 (two) business activities, the Business Classification & Statutory Services and Business Supervision & Consultancy Services.



Kegiatan usaha jasa Klasifikasi & Statutoria mencakup :

- Pemeriksaan konstruksi kapal, pengawasan dan pengujian serta penerbitan sertifikat kelas, registrasi kapal dan konstruksi lepas pantai.
- Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai.
- Pengujian dan sertifikasi material dan komponen.
- Pengujian dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspektor las dan ahli las lainnya.
- Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi di bidang statutoria berdasarkan otorisasi dari pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintah negara lain.
- Bertindak sebagai agen dan atau mewakili klasifikasi asing / konsultan asing.
- Melaksanakan sertifikasi sesuai standar internasional.

Sedangkan kegiatan usaha jasa Konsultansi & Supervisi mencakup :

- Jasa konsultansi & supervisi di bidang maritim dan industri serta teknik lainnya.
- Studi kelayakan di bidang teknologi maritim dan industri lainnya.
- Jasa inspeksi dan sertifikasi di bidang minyak, gas dan ketenagakerjaan.
- Rekayasa teknik dan supervisi di bidang minyak dan gas.
- Pengujian DT dan NDT.
- Konsultansi sesuai standar nasional dan internasional.
- Pelatihan keahlian di bidang teknik.
- Tank cleaning & sludge processing.
- Pencegahan korosi.

Setelah beroperasi selama 48 tahun, BKI telah men-capai keberhasilan dan kondisi sebagai berikut :

- Berkantor pusat di Jakarta dan memiliki 21 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di 1 (satu) cabang di Singapore.
- Telah memiliki kerja sama dengan hampir semua badan klasifikasi asing anggota IACS.
- Menerbitkan Rules & Regulation di bidang klasifikasi kapal dan setiap tahun menerbitkan Register Kapal dan Register ISM Code & ISPS Code
- Telah mendapatkan pelimpahan tugas / wewenang dari Pemerintah Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria.
- Telah mendapat penunjukan inspeksi dan sertifikasi dari Pemerintah cq Direktorat Jenderal Migas dan Departemen Tenaga Kerja.

Classification & Statutory Services includes :

- *Examination of ship construction, survey and testing also issuance of class certificate and ship registration.*
- *Inspection and testing of floating facilities and offshore construction facilities.*
- *Testing and certification of materials and components.*
- *Testing and certification of welder's qualification, welding inspectors and other welding experts.*
- *Carry out the inspection and the certification in the field of statutory based on the authorization of the Government of Republic of Indonesia and from other governments.*
- *Acting as an agent or representative of foreign classification / foreign consultants.*
- *Carry out the certification according to international standards.*

Supervision & Consultancy Services includes:

- *Consultancy and supervision services in the maritime and industrial fields as well as other technical services.*
- *Feasibility study in the maritime fields technology and other industries.*
- *Inspection and certification services in the oil& gas and labor field.*
- *Engineering and technical supervision in the oil and gas field.*
- *DT and NDT Testing.*
- *Consultancy according to national and international standards.*
- *Training for technical expertise.*
- *Tank cleaning and sludge processing.*
- *Prevention of corrosion.*

After operating for 48 years, BKI has achieved success and the following conditions:

- *Headquartered in Jakarta and has 21 branches all around Indonesia, including 1 (one) branch in Singapore.*
Has had cooperation with almost all the Classification members of IACS.
- *Issuing Rules & Regulations of ship classification and annually publishes Ship Register and Register of ISM Code and ISPS Code*
BKI has been delegated by the Government of the Republic of Indonesia, cq Directorate General of Sea Transportation Ministry of Transportation to carry out the statutory survey and certification.
- *Has received the designation of inspection and certification from the Government cq the Directorate General of Oil and Gas and the Department of Labor.*



- Telah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001 : 2008 dan telah mendapatkan sertifikat mutu ISO 9001 : 2008 dari badan sertifikasi internasional.
- Telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat SNI 19-17020 (akreditasi perusahaan jasa inspeksi teknik) dan SNI 19-17025 (akreditasi laboratorium).
- *BKI has implemented a Quality Management System based on ISO 9001: 2008 and have gained the Quality Certificate ISO 9001: 2008 from International Agency.*
- *BKI has been implemented and certified SNI 19-17020 (accrediting technical inspection services company) and SNI 19-17025 (laboratory accreditation).*

Visi & Misi Perusahaan

Company Vision & Mission

Visi Perusahaan

Menjadikan BKI sebagai perusahaan jasa teknik yang terpercaya dan terbaik dari segi kualitas produk, kualitas sumber daya manusia dan kinerja perusahaan.

Misi Perusahaan

- Mengutamakan terjaminnya keselamatan jiwa dan benda di laut serta perlindungan lingkungan melalui pengembangan dan pemeriksaan standar kapal serta fasilitas terkait lainnya.
- Pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan dengan Baik.
- Membentuk citra perusahaan bahwa jasa BKI dibutuhkan dan menjadi standar keselamatan dan kualitas.
- Memberikan kesempatan kepada para tenaga ahli kelautan nasional untuk berpartisipasi melalui pengembangan pengetahuan serta penerapannya.
- Membantu peningkatan pendapatan negara baik dalam bentuk Rupiah maupun valuta asing.

Company Vision

Making BKI as a reliable service company and be the best at product quality, the best quality of human resources and corporate performance.

Company Mission

- *Give priority to ensuring safety of the people and objects in the sea and environmental protection through the development and examination of ships standard and other related facilities.*
- *Manage the companies effectively and efficiently by applying the Good Corporate Governance.*
- *Establish a corporate image that BKI services are needed and become a standard of safety and quality. Provide an opportunity for nationwide marine experts*
- *to participate through the development of knowledge and its application.*
- *Helps to increase revenues in the form of Rupiahs and foreign currencies.*



Kebijakan Mutu Perusahaan

Company Quality Policy

Sebagai perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001:2008, BKI memiliki komitmen untuk memberikan kepuasan kepada pemakai jasa (customer satisfaction) dan terus melakukan penyempurnaan (continuous improvement). Kebijakan Mutu Perusahaan adalah "**mengutamakan pelayanan jasa bagi para pengguna jasa berdasarkan kepedulian yang tinggi terhadap masalah Keselamatan dan Mutu**".

Dalam mewujudkan komitmen tersebut, BKI memiliki nilai-nilai Perusahaan yang diterapkan pada seluruh jajaran organisasi, meliputi :

- Moto perusahaan "TERPERCAYA", yang berarti jasa yang diberikan adalah berkualitas, dapat diandalkan, efisien, tepat waktu dan memiliki reputasi.
- Nilai - nilai perusahaan yaitu Integritas, Profesionalisme, Kepuasan Pengguna Jasa, Kepemimpinan dan Penghargaan pada Karya / Prestasi Karyawan.
- Budaya Perusahaan "TERTIB" (Taqwa kepada Tuhan YME; Etos kerja yang tinggi; Reputasi yang senantiasa ditingkatkan; Tertib dalam menerapkan kebijakan manajemen dan sikap pribadi; Ilmu pengetahuan dan Teknologi yang dikuasai; Baik dalam pelayanan dan hasil kerja).

Manajemen BKI menjamin :

- Persyaratan mutu berorientasi kepada standar mutu Internasional sesuai dengan ISO 9001:2008 dan pemenuhan pencapaian sasaran mutu perusahaan serta senantiasa melakukan penyempurnaan yang menerus terhadap mutu.
- Penerapan Sistem Mutu dan nilai-nilai perusahaan tersebut dalam seluruh kegiatan jasa.
- Tanggap terhadap kebutuhan pemakai jasa / masyarakat umum dan mengutamakan kepuasan pelanggan dan aspek keselamatan.
- Semua personil selalu diberi pemahaman tentang sistem mutu melalui pelatihan yang berkesinambungan serta penerapan sistem mutu di dalam semua jajaran organisasi.

Pemenuhan terhadap kebijakan, prosedur dan petunjuk kerja adalah hal yang mutlak dan mengikat bagi semua karyawan. Mutu adalah tanggung jawab semua karyawan yang bekerja di jajaran BKI.

As company that implement quality management systems based on ISO 9001:2008, BKI has a commitment to give satisfaction to the user (customer satisfaction) and continue to make improvements (continuous improvement). Company Quality Policy is a "**Priority of service for users based on high concern to the Safety and Quality**".

In realizing these commitments, BKI has the Company's Value are applied throughout the organization, including:

- The motto of the company is "**TERPERCAYA /RELIABLE**", which means the service provided is high quality, reliable, efficient, timely and reputable.
- The value of the company are : Integrity, Professionalism, Service User Satisfaction, and Leadership, and Employee Achievement.
- Corporate Culture "**TERTIB**" (Taqwa to God Almighty; high work ethic; enhanced of reputation; Orders in implementing management policies and personal attitudes; Science and Technology held; Good in service and result of work).

BKI management ensures:

- Quality requirements oriented to the international quality standard ISO 9001:2008 in the fulfillment of the achievement of the quality objectives of the company and make continuous improvements of quality. Implementation of Quality System and the company values in all service activities.
- Responsiveness to the needs of users / public and customer satisfaction and safety aspect. All personnel are always given an understanding of the quality system through continuous training and implementation of quality systems in all ranks of the organization.

Compliance to the policies, procedures and work instructions is an absolute and binding for all employees. Quality is the responsibility of all employees working in the ranks of BKI.



Sambutan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Message

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh

Para Pemangku Kepentingan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang terhormat,

Secara umum perekonomian Indonesia mencatat perkembangan yang cukup baik. Hal ini ditandai dari realisasi inflasi hanya 4,3% dan pertumbuhan ekonomi yang menembus 6,4% yang didukung oleh konsumsi domestik dan investasi, yang tentunya dihasilkan dari arus barang dan modal antar pulau maupun antar negara melalui perdagangan internasional.

Kondisi di atas mendorong PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) pada tahun 2012 berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 419,18 miliar atau naik 25,47% dari tahun sebelumnya, dan laba (rugi) komprehensif sebesar Rp 67,44 miliar atau naik 31,30% dari tahun sebelumnya. Pencapaian ini mencerminkan kinerja pelayanan untuk menjaga kepercayaan pelanggan dapat terus terjaga setiap tahunnya. Secara umum, target kinerja yang ditetapkan Pemegang Saham untuk tahun 2012 sebagian besar dapat tercapai dan jumlah kontribusi pajak dan dividen meningkat kepada Negara serta tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan sekitar dapat terlaksana dengan baik. Hasil audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik KAP Husni, Mucharam & Rasidi menyatakan wajar dalam semua hal yang material dan tingkat kesehatan perusahaan "AAA" sesuai indikator penilaian kesehatan BUMN.

Kinerja di atas tidak untuk membuat insan jajaran perusahaan cepat berpuas diri. Sebagai penyedia layanan jasa klasifikasi dan jasa teknik terkait, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) berupaya lebih meningkatkan profesionalisme dan integritasnya untuk memberikan pelayanan secara prima, terpercaya dan beretika. Perusahaan juga perlu terus melanjutkan kiprah aktifnya dalam sidang IMO dan semakin mensejajarkan dirinya dengan Klasifikasi Asing lainnya di Asia melalui Forum ACS (Asian Classification Societies Executive) Meeting untuk belajar dan meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya. Dalam bidang Konsultansi dan Supervisi, perusahaan juga tetap memperkuat eksistensinya dengan meraih pasar dari kebutuhan jasa industri swasta, merealisasikan potensi pasar dan melengkapi infrastruktur serta kompetensi SDM untuk meningkatkan layanan kepada pengguna jasa.

The respectable Stakeholders PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero),

In general, the Indonesian economy records a pretty good development. It is marked on the inflation rate which is only 4.3% and economic growth which penetrates 6.4%, supported by domestic consumption and investment, which would be resulted from the flow of goods and capital between islands and between countries through international trade.

The Above conditions encourage PT. Biro Klasifikasi Indonesia in 2012 record a revenue of Rp 419.18 billion, increasing 25.47% from a year earlier, and net income (loss) Comprehensive Rp 67.44 billion, up 31.30% from the previous year. This achievement reflects the performance of services to maintain customer trust can be maintained each year. In general, the performance targets set for the Shareholders in 2012 can largely be achieved and the amount of contribution and dividend tax increases to the Indonesian state as well as corporate social responsibility to the environment can be properly done. The results of financial audit by the Public Accounting,- KAP Husni, Mucharam & Rasidi state in fairly for all material respects and the health of the company "AAA" appropriate to the healthiness assessment indicators against BUMN.

The above performance is not to make all corporate rank people get complacent. As a provider of classification services and related engineering services, PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) try to further improve the professionalism and integrity to provide the excellent service, reliable and ethical. The company also needs to continue its active pursuit in the IMO meeting and increasingly aligning itself with other foreign Classification Societies in Asia through ACS Forum (the Association of Asian Classification Societies) to learn and improve their competence and capacity. In the field of Consultancy and Supervision, the company also continue to strengthen its presence in reaching the market of the service needs of the private industry, realize the market potential and complementary infrastructure and human resource competencies to improve services to the users of the services.



Secara umum, Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi akan menekankan pentingnya menjaga pertumbuhan nilai perusahaan secara jangka panjang. Perusahaan perlu mengimbangi kegiatan perusahaan dengan upaya pengembangan melalui investasi pada sumber daya manusia, kegiatan riset dan pengembangan, penciptaan pasar baru, memperkuat database perusahaan serta pemenuhan mutu layanan yang berorientasi pada standar mutu internasional. Demikian juga, pemanfaatan IT untuk inovasi pelayanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional harus terus dilanjutkan.

Seluruh pencapaian perusahaan di tahun 2012 dapat diraih atas rahmat dan karunia-Nya semata, oleh karena itu Dewan Komisaris manajarkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kepada jajaran Direksi dan Staf yang mampu mempersembahkan kinerja perusahaan yang baik sesuai dengan visi dan misi perusahaan, Dewan Komisaris juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi. Demikian juga kepada stakeholders atas kepercayaannya kepada perusahaan, Pemegang Saham yang senantiasa memberikan saran dan arah pengelolaan perusahaan serta kepada Komite Audit yang telah bekerja sama dalam upaya pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing kita dalam melanjutkan kesuksesan PT. Biro Klasifikasi Indonesia di masa mendatang serta secara konsisten mampu menerapkan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance.

a.n. Dewan Komisaris
PT. Biro Klasifikasi Indonesia

Komisaris Utama
Machfud Sidik

In general, the Board of Commissioners jointly with the Board of Directors will emphasize the importance of maintaining the growth of the company's long-term value. Companies need to keep pace with the development efforts of the company's activities through investments in human capital, research and development activities, creation of new markets, strengthening the company's database and fulfillment service quality oriented international quality standards. Likewise, the use of IT for innovation and increase service effectiveness and operational efficiency should be continued.

The whole achievement of the company in 2012 can be achieved for His mercy and His grace alone, therefore, the Board of Commissioners say your gratitude to God Almighty. To the Board of Directors and staff who are able to present a good performance of the company in accordance with the vision and mission of the company, Board of Commissioners also express gratitude and high appreciation. Similarly, it is to the stakeholders for their trust to the company, shareholders who continue to give advice and direction of the management of company as well as to Audit Committee who have worked together in the implementation of the Board of Commissioners.

May God Almighty guide us in continuing the success of PT. Biro Klasifikasi Indonesia in the future and are consistently able to apply the Principles of Good Corporate Governance.

On behalf of the Board of Commissioners
PT. Biro Klasifikasi Indonesia

President Commissioner
Machfud Sidik

Profil Dewan Komisaris

Commissioners Profile

Susunan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-322/MBU/2012. tanggal 11 September 2012 adalah sebagai berikut :

1. Komisaris Utama : Machfud Sidik
2. Komisaris : Minto Widodo
3. Komisaris : Faisal Halimi
4. Komisaris : Erwin Rosmali



Machfud Sidik

Tanggal Lahir : Jombang, 18 Agustus 1946
Pendidikan : S1 FEUI (1981), S2 Carnegie Mellon University (1985), S3 UGM (1998)
Pengalaman : Konsultan Pajak Dr. Machfud Sidik & Partner



Minto Widodo

Tanggal Lahir : Semarang, 11 April 1952
Pendidikan : S1 Ekonomi UGM (1981), Master of Art Economics dari Colorado State University USA (1989)
Pengalaman : Kementerian Keuangan (1981), Sekretaris Bapeksta Keuangan (1996), Kepala Pusat Sistem Informasi Keuangan Daerah (1996 - 2004).



Faisal Halimi

Tanggal Lahir : L. Inong, 6 April 1969
Pendidikan : IIP Jakarta (1996)
Pengalaman : Komisaris PT. Terminal Petikemas Surabaya (2011 - 2012), Komisaris PT. Biro Klasifikasi Indonesia (2012 - sekarang)



Erwin Rosmali

Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Juli 1955
Pendidikan : Akademi Ilmu Pelayaran
Pengalaman : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Komisaris PT. BKI (Persero) Oktober 2012 - sekarang.

Sambutan Direktur Utama

Message from President Director

Menjadi lebih baik dengan bekerja lebih baik dan memberikan kualitas kerja serta pelayanan terbaik menjadi tekad manajemen BKI dalam mengisi tahun 2012. Menjadi lebih baik adalah suatu keniscayaan dan pilihan yang harus diambil untuk meningkatkan nilai korporasi di mata pemegang saham dan para pemangku kepentingan, utamanya para pemakai jasa dan mitra kerja BKI. Berbekal keberhasilan, pengalaman, dan suka-duka di tahun-tahun sebelumnya manajemen yakin bahwa BKI mampu melakukan transformasi menuju suatu wujud badan klasifikasi yang ideal sebagaimana harapan para pemangku kepentingan dan seluruh jajaran perusahaan.

Di atas segala daya dan upaya yang kita lakukan sudah sepantasnya kita bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena sepanjang tahun 2012 ini, di tengah dinamika dan persaingan usaha yang semakin ketat BKI tetap mampu menunjukkan kinerja yang positif. Register BKI mencatat adanya tambahan kapal yang diklasikan sehingga jumlah kapal dengan klas berlaku meningkat dari 7.528 unit pada tahun sebelumnya menjadi 9.506 unit pada 2012, dengan total tonase mencapai 14.622.382 GT.

Hasil ini tentunya tidak lepas dari kepercayaan para pemangku kepentingan, terutama kalangan asuransi, para pemilik, operator kapal, dan pencarter kapal serta instansi pemerintah kepada BKI sebagai hasil pelayanan yang semakin profesional dan dedikasi karyawan-karwayati perusahaan baik di Pusat maupun di Cabang-cabang. Kepercayaan itu tentu harus dijaga sebagai modal dasar terpenting dalam membangun reputasi sebagai sebuah badan klasifikasi. Manajemen dan seluruh jajaran BKI selalu berupaya menjaga kepercayaan itu secara konsisten meningkatkan kualitas hasil kerja dan pelayanan, meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional melalui penerapan sistem berbasis Teknologi Informasi.

Manajemen mencatat beberapa hal penting dalam ranigan kiprah pelayanan, operasional, dan pengembangan perusahaan yang patut dikemukakan. Dalam bidang pengembangan usaha, BKI terus memantapkan dan mengembangkan sinergi dengan mitra strategis, baik kalangan swasta maupun sesama BUMN. .

Untuk tujuan keselamatan kapal-kapal penumpang di Indonesia, maka dengan mitra dalam negeri, perusahaan juga menjalin kerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, National Design Center (Nasdec), Laboratorium Hidrodinamika Indonesia (LHI), Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Indonesia (UI) untuk pelatihan Damage Stability bagi para staf tekniknya.

To be better by working better and to provide the best quality of works and services to be by the willpower of BKI's management in-charging in 2012. Being better is a necessity and a choice to be taken to improve the corporate value in the eye-view of shareholders and stakeholders, particularly the service users and BKI's partners. Armed with the success, experiences, and the joys and sorrows in previous years, management believes that BKI is able to perform the transformation towards a classification society of an ideal body shape as the expectations of the stakeholders and all levels of the company.

In the all energy and effort that we have done, our very worthy grateful to God Almighty, for the year 2012, in the midst of a dynamic and increasingly fierce competition, BKI is still able to show a positive performance. Register BKI note the additional ships classified reaching the number of vessels with valid class increase from 7,528 units in the previous year to 9506 units in 2012, with a total tonnage reaching 14,622,382 GT.

This result is certainly not out of the trust of stakeholders, especially among insurers, ship owners, operators, and charterers as well as government agencies to BKI as a result of the professional service and dedicated company employees both in the head office and branch office. That confidence would be maintained as the most important capital in building a reputation as a classification society. Management and all levels of BKI always strive to maintain that trust by consistently maintaining and improving the quality of the work and services, improve the competence and capability of human resources, as well as improving operational efficiency and effectiveness through the application of information technology-based systems.

Management note some important points in the series of efforts for services, operations, and company development that are worth to point out. In the field of business development, BKI continue to solidify and develop synergies with strategic partners, either private sector companies or with the fellow BUMN.

For the purpose of passenger ship safety, so with domestic partners, the company also form a partnership with Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, National Design Center (Nasdec), Laboratorium Hidrodinamika Indonesia (LHI), University of Hasanuddin (Unhas) and University of Indonesia (UI) for Damage Stability training for its technical staffs.

Pelatihan Damage Statistik ini merupakan wujud kesiapan BKI dalam implementasi Safety of Life at Sea (SOLAS) Consolidated Edition 2009 Chapter II-1 Part B-1 yang mewajibkan Damage Stability untuk semua kapal penumpang dan kapal kargo dengan panjang 80 m atau lebih yang dibangun setelah tanggal 1 Januari 2009.

Salah satu hal yang menjadi harapan para pemangku kepentingan adalah BKI menjadi anggota IACS. Berkaitan dengan hal tersebut BKI melakukan restrukturisasi dan revitalisasi Komite Konsultasi Klasifikasi Indonesia (K3I) menjadi Komite BKI. Komite BKI yang terbagi dalam Sub Komite Teknik dan Sub Komite Klasifikasi itu melanjutkan tugas dan fungsi K3I dan beranggotakan para pemangku kepentingan yang terdiri dari wakil-wakil dari perusahaan pelayaran, industri galangan kapal, asuransi, instansi pemerintah, dan akademisi.

Kerjasama dengan mitra badan klasifikasi internasional anggota International Association of Classification Societies (IACS) dan Asian Classification Societies (ACS) juga terus dikembangkan. Dengan Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) BKI menandatangani Perjanjian Kerjasama Teknik Bidang Kapal dan Struktur Lepas Pantai. Melalui perjanjian kerjasama ini kedua badan klasifikasi yang telah bekerjasama sejak 1974 itu sepakat untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan jasa di bidang klasifikasi kapal dan struktur lepas pantai melalui penyatuan sumber daya teknik dan manusia yang dimiliki.

Tekad BKI untuk menjadi lebih baik dan memberikan yang terbaik kepada para pemakai jasa dan mitra kerja khususnya di bidang minyak dan gas juga diwujudkan dengan merintis pembentukan unit oil & gas sebagaimana diharapkan oleh SKK Migas, mengirim staf teknik ke Huston, USA untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama dual class dengan mitra badan klasifikasi internasional. Diharapkan ke depannya desk oil & gas ini segera menjadi unit produksi tersendiri yang fokus menangani pekerjaan-pekerjaan bidang migas yang merupakan penajaman pengembangan bidang usaha perusahaan. Demikian pula dengan revisi perjanjian kerjasama dengan class partner, praktek dual class akan semakin fair, tidak menimbulkan double cost, sebagaimana dikeluhkan selama ini.

Dalam hubungan dengan masyarakat industri perkapalan dan pelayaran, BKI bekerjasama dengan mitra kerjanya menyelenggarakan Seminar dan Diskusi Nasional "Implementasi Revisi Marpol Annex VI Emisi Gas Buang dari Kapal-kapal Berbendera Indonesia". Dalam kesempatan memperingati ulang tahunnya yang ke 48, BKI menyelenggarakan Seminar Teknik Sehari bertema "Transformasi BKI Menuju Keanggotaan IACS" dengan materi antara lain regulasi IMO Annex VI (Marine Pollution), Ballast Water Management, Konvensi mengenai Ship Recycling, dan lain-lain.

Damage Stability training is a manifestation of BKI readiness in implementing the Safety of Life at Sea (SOLAS) Consolidated Edition 2009 Chapter II-1 Part B-1, which requires Damage Stability for all passenger ships and cargo ships with a length of 80 m or more were built after the date of January 1, 2009.

One of the things that a stakeholder expectations is BKI to be a member of IACS. In connection with this, BKI restructure and revitalize a Indonesian Committee of Consultation - Classification or Komite Konsultasi Klasifikasi Indonesia (K3I) to be BKI Committee. BKI committee which is divided into subcommittees and Technical Sub-Committee continue the classification tasks and K3I functions consisting members of stakeholders comprising representatives from shipping companies, shipbuilding industries, insurance, government agencies, and academia.

Cooperation with international classification partners which are member of the International Association of Classification Societies (IACS) and the Association of Asian Classification Societies (ACS) is also being developed. By Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) BKI sign on Ship and Offshore Structure Technical Cooperation Agreement. Under this agreement, the two classification societies have cooperated since 1974 which was agreed to increase the quality and ease of service in the field of ship classification and offshore structures through the unify the engineering resources and its human.

BKI's determination to become better and to give the best services to the users and partners especially in the field of oil and gas are also realized with the establishment of pioneering oil and gas unit, as expected by SKK Migas, sending BKI's technical staff to Huston, USA to improve their knowledges and experiences due to implementation of dual class agreement with international classification society partners. It is expected on the future, this desk oil & gas is soon to be focus on a separate production unit handle jobs which is a refinement of oil and gas field development of the company business. Similarly, the revised agreement with the class partner, dual-class practice will be more fair, does not cause double cost, as long complained so far.

In connection with the shipping industry and shipping, BKI is in collaboration with its partners holding National Seminar and Discussion "Implementation of Revised Marpol Annex VI Emissions from Indonesian-flagged vessels". In commemorating the occasion of the 48th anniversary, BKI hold one day technical seminar themed "BKI Transformation Towards IACS Membership" with materials such as IMO Annex VI regulations (Marine Pollution), Ballast Water Management Convention on Ship Recycling, and others.



Sebagai wujud corporate social responsibility dan kepedulian BKI pada peningkatan aspek keselamatan kapal dan kualitas hasil industri dalam negeri, manajemen menyelenggarakan program Sertifikasi Juru Las Gratis yang untuk tahun 2012 ini diadakan di Jembayan, Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Banjarmasin, dll. Training juru las gratis ini diselenggarakan berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Berkaitan dengan pengembangan bidang Konsultansi dan Supervisi yang masih sangat potensial dan terbuka luas kesempatannya, BKI menjalin kerjasama dengan Asia Lab (Malaysia) Sdn Bhd untuk mengembangkan bidang-bidang kerjasama konsultansi radiologi dan layanan jasa. Kerjasama itu meliputi layanan pemantauan Low Specified Activities (LSA) dan Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials (TENORM), layanan laboratorium pemantauan lingkungan, pelatihan dan layanan konsultansi, layanan dekontaminasi radiasi, layanan konsultansi industrial, pemasokan instrumen nuklir dan peralatan ilmiah, dan program penilaian radiasi dan lingkungan (REAP).

Kondisi sosial politik dan perekonomian nasional selama 2012 yang relatif stabil dan kondusif menjadikan perusahaan mampu meningkatkan kinerja usahanya. Realisasi pendapatan bersih meningkat dibandingkan tahun 2011 naik 25,5%. Peningkatan pendapatan itu berasal dari kontribusi bidang usaha klasifikasi naik 27,2% dan bidang usaha Konsultansi dan Supervisi naik 22,4%. Untuk realisasi laba setelah pajak, perusahaan berhasil membukukan angka peningkatan sebesar 31,3%.

Berdasarkan standard penilaian Kementerian BUMN dan hasil audit Kantor Akuntan Publik, BKI kembali dapat mempertahankan tingkat kinerja manajemen "Sehat AAA". Keberhasilan ini tidak terlepas dari angka Net Return on Equity (Net ROE) yang mencapai 40,4% dan Return on Asset (ROA) yang mencapai 31,1%. Bila dibandingkan suku bunga bank yang berlaku pada akhir 2012 sebesar 5,75% per tahun, angka-angka ini menunjukkan kinerja manajemen dalam memaksimalkan keuntungan untuk pemegang saham atau terhadap total asset secara umum dapat dikategorikan baik.

Melihat dari apa yang berhasil kita raih, sudah sepantasnya kita bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih-sayang, pentunjuk, lindungan, dan ridho-Nya sehingga BKI dapat merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2012 dengan hasil yang baik.

Mewakili Direksi dan segenap jajaran BKI saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian Negara BUMN c.q. Deputi Bidang Usaha Jasa beserta jajarannya serta kepada Kementerian Perhubungan c.q. Dirjen Perhubungan Laut beserta jajarannya atas segala bantuan, dukungan, dan arahan yang diberikan. Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan pula kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan masukan, arahan, dan koreksi serta peranannya sebagai mitra kerja yang konstruktif sehingga Perusahaan dapat merealisasikan program kerjanya dan memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara.

As a form of corporate social responsibility and concern for BKI on improving ship safety aspects and the quality of the domestic industry, the management held "free cost" Welder Training and Certification program for the year 2012 which was held in Jembayan, Loa Kulu, Kartanegara Kutai, Balikpapan, Banjarmasin etc. This Free welder training will be

In connection with the development of the field of Consultancy and Supervision which is still great potential and wide open its opportunities, BKI cooperate with Asia Lab (Malaysia) Sdn Bhd to develop areas of cooperation radiology and consulting services. The cooperation includes monitoring service Low Specified Activities (LSA) and Technologically Enhanced Naturally occurring Radioactive Materials (TENORM), environmental monitoring laboratory services, training and consultancy services, radiation decontamination services, industrial consultancy services, supply of nuclear instruments and scientific equipment, and Radiation Environmental ans Assessment radiation Program (REAP).

Social-political condition and conditions of the national economy during 2012 is relatively stable and conducive to make the company able to increase its performance. Net revenue increase 25.5%. The increase in revenue is derived from the contribution of the classification business up 27.2% and the business Consultancy and Supervision raise up 22.4%. For the realization of profit after tax, the company records a figure increase of 31.3%.

Based on the assessment standards of the Ministry of Enterprise and audit results of the public accounting firm, BKI is back to maintain the level of management performance "Healthy AAA". This success can not be separated from the numbers of Net Return on Equity (Net ROE) reaching 40.4% and Return on Assets (ROA), which is reached 31.1%. When it is compared to the prevailing interest rates at the end of 2012 at 5.75% per year, these figures demonstrate the performance of management in maximizing profits for shareholders or to total assets can generally be categorized in good.

Judging from what we managed to achieve, it has been very worthy, we are grateful to God Almighty for all the blessings, affection, clues, patronage, and his blessing to realize that BKI Work Plan and Budget 2012 with good results.

Representing all Directors of BKI, I would like to express our appreciation and gratitude to the Ministry of State Owned Enterprises cq Deputy of Business Services and its staff as well as to the Ministry of Transportation cq Director General of Sea Transportation and his staff for all their help, support, and direction given. Our high awards and thanks are also conveyed to the Board of Commissioners who have provided input, guidance, and correction as well as its role as a constructive partner so that the company can realize its program of work and make a positive contribution to the nation and the state.

Kepada seluruh karyawan dan karyawati BKI baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, Direksi menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala sumbangsih, dedikasi, dan produktivitas yang telah diberikan dalam ikut mensukseskan realisasi program kerja Perusahaan di tahun 2012. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para pemangku kepentingan atas segala kepercayaan, dukungan, bantuan, dan partisipasinya dalam ikut memberdayakan dan memajukan BKI.

Sebagai penutup, kami selaku penerus dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Direksi-direksi BKI periode sebelumnya yang telah memberikan dedikasi terbaiknya dan meletakkan dasar arah perbaikan perusahaan, sehingga BKI maju dan berkembang serta dari tahun ke tahun dapat terus mencatat kinerja yang positif. Mudah-mudahan kami dapat melanjutkan hal-hal baik yang diwariskan para pendahulu dan dapat pula mengukir kinerja dan prestasi yang lebih baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi niat baik dan usaha kita.

**A.n. Direksi
Direktur Utama**



Ibnu Wibowo

To all employees and employee BKI both in the head office and branch offices, the Board of Directors express my thanks and appreciation for all the contributions, dedication, and productivity which has been given in taking a part to success the company in the realization of the program of work in 2012. We also would like to express our thanks and appreciation to the stakeholders for any trust, support, assistance, and participation in follow empower and advance the BKI.

In closing, we, as the successor to humbly, say thank you and appreciation to the BKI Board of Directors for previous periodic who have given their best and laid the foundation of dedication towards the improvement of the company, so that BKI become expanding and upward company as well as from year to year, BKI can continue to record positive performance . Hopefully we can continue this good things that are inherited its predeccesing Directors and can also carve the better performance and presentation.

May the Almighty God continue to bless our good efforts and intentions.

**On Behalf of Board of Directors
President Director**



Ibnu Wibowo



Profil Direksi

Board of Directors Profile



Ibnu Wibowo

Tanggal Lahir
Pendidikan

: Yogyakarta, 18 September 1952
: Sarjana Ekonomi Perusahaan Universitas Islam Indonesia (1978), MBA Finance St. Louis University, Amerika Serikat (1989)

Pengalaman

: Direktur Utama PT. PANN (2004 - 2012),
Bank Mandiri (1999 - 2004),
Bank Dagang Negara (1980 - 1999)



Iman Satria Utama

Tanggal Lahir
Pendidikan
Pengalaman

: Jakarta, 20 Agustus 1960
: AIP (1984), S1 Sospol (1997), S2 (Jakarta)
: Kasubdit Nautis, Teknis & Radio Kapal Ditkapel (2009 - 2011),
Kepala Kantor Adpel Palembang (2011 - 2012)



Anang Sundana

Tanggal Lahir
Pendidikan

Pengalaman

: Kuningan, 8 Agustus 1958
: Sarjana Ekonomi Universitas Jaya baya (1986)
: Direktur Umum & SDM, Plt Direktur Utama PT. Berdikari (2007 - 2009), Direktur Keuangan & Administrasi PT. Sarinah (2009 - 2012)

Aktifitas Manajemen

Management Activity

Salah satu moment penting sepanjang tahun 2012 adalah pergantian manajemen puncak BKI. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan dan menggenjot peningkatan produktivitas usaha, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan terhitung sejak tanggal 25 Mei 2012 menugaskan Ibnu Wibowo sebagai Direktur Utama BKI.

Penugasan Direktur Utama baru tersebut beberapa waktu kemudian diikuti dengan penugasan Iman Satria Utama dan Anang Sundana sebagai Direktur perseroan mendampingi Ibnu Wibowo yang telah terlebih dahulu bertugas sebagai Direktur Utama.



Sebagai bagian dari rangkaian perubahan manajemen puncak BKI, Menteri Negara BUMN selaku pemegang saham juga mengangkat Dewan Komisaris baru yang beranggotakan Machfud Sidik sebagai Komisaris Utama dan Erwin Rosmali, Minto Widodo, dan Faisal Halimi masing-masing sebagai Komisaris.

Dalam upaya memenuhi persyaratan keanggotaan International Association of Classification Societies (IACS) Biro Klasifikasi Indonesia melakukan restrukturisasi dan revitalisasi Komite Konsultasi Klasifikasi Indonesia (K3I) menjadi Komite BKI. Komite BKI yang terdiri dari Sub Komite Teknik dan Sub Komite Klasifikasi itu melanjutkan tugas dan fungsi K3I dan beranggotakan para pemangku kepentingan yang terdiri dari wakil-wakil dari perusahaan pelayaran, industri galangan kapal, asuransi, instansi pemerintah, dan akademisi.

Acara pembentukan Komite Teknik BKI itu diadakan di Hotel Millenium Sirih Jakarta tanggal 5 November 2012. Agenda utama pertemuan acara yang bertajuk Pertemuan Komite BKI itu adalah pemaparan tentang kondisi dan tantangan BKI saat ini dan pemilihan formatur pengurus.



One of the important moments during the year 2012 was BKI top management turnover. In order to improve the effectiveness of the management of the company and boost productivity improvement efforts, State Enterprises Minister Dahlan Iskan as of the date of May 25, 2012 commissioned Ibnu Wibowo to serve as BKI President Director.

Following an assignment of the new President Director, subsequently followed by the appointment of Mr. Iman Satria Utama and Mr. Anang Sundana as Director of the company respectively to accompany Mr. Ibnu Wibowo who formerly served as President Director.



As part of a series of top BKI management changes, State Enterprises Minister as shareholder also appoint a new Board of Commissioners consisting Machfud Sidik as Chairman and Erwin Rosmali, Minto Widodo, and Faisal Halimi respectively as Commissioner.

In a bid to comply upon a membership requirements of the International Association of Classification Societies (IACS), BKI has been undertake restructuring and revitalization of the Indonesia Classification Consultative Committee (K3I) and transforming its as BKI Committee. BKI committee consisting of Technical Subcommittee and Classification Subcommittee are performing and continue a role and duties of K3I which is comprising of stakeholder such as representatives from shipping companies, ship building industry, insurance, government agencies, academics and experts.

The event of BKI Committee establishment was held at a Millennium Hotel Melia Jakarta on November 5th 2012. The main agenda of the event is to figure out of BKI challenges againts to BKI current prospective as well carried out an election of formation committee.



Untuk yang kesekian kalinya Majalah Investor kembali menempatkan Biro Klasifikasi Indonesia sebagai BUMN Terbaik Kategori Non Keuangan Sektor Jasa, Perdagangan, dan Pariwisata. Penyerahan penghargaan itu dilakukan dalam acara Majalah Investor Award dan Tokoh Finansial 2012 yang diadakan tanggal 13 Desember 2012 di Ballroom Hotel Four Seasons Kuningan, Jakarta.

Majalah Investor sejak tahun 2006 menempatkan BKI sebagai BUMN terbaik non keuangan sektor jasa. Hal ini tidak terlepas dari kinerja manajemen dan keuangan yang selalu berhasil meraih predikat AAA dan laba usaha yang terus tumbuh.

Pengembangan Usaha

Manajemen BKI mengawali tahun 2012 ini dengan melakukan langkah strategis dengan kembali melakukan pembaruan Nota Kesepahaman dengan PT. Pelindo I. Pembaruan Nota Kesepahaman yang dilakukan untuk keempat kalinya itu dilakukan oleh Direktur Utama kedua perusahaan sebagai wujud tekad untuk menjalin kerjasama dalam rangka implementasi Instruksi Menteri Negara BUMN nomor KEP-109/MBU/2002 tentang Sinergi Antar BUMN.

Melalui Nota kesepahaman ini Pelindo I membuka peluang kepada BKI untuk memberikan pelayanan jasanya dalam bidang klasifikasi dan statutoria kapal, konsultansi dan supervisi bidang marine, pemeriksaan dan sertifikasi alat angkat/angkut, tangki timbun, bejana tekan, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta bidang-bidang lainnya sesuai permintaan Pelindo I.

Selain dengan Pelindo I, di tahun 2012 ini BKI dan Pelindo IV juga kembali melakukan penandatanganan perpanjangan Nota Kesepahaman sebagai wujud sinergi antar BUMN yang dilakukan tanggal 9 Februari 2012 di Makassar. Nota Kesepahaman tentang Sinergi Antar BUMN yang memiliki ruang lingkup bidang sama dengan yang dilakukan bersama Pelindo I itu pertama kali ditandatangani pada tahun 2009 dan terus diperpanjang karena besarnya manfaat yang dirasakan kedua pihak.

Di tahun 2012 ini BKI juga memperbarui kerjasama dengan PT. Pusri Palembang. Berbeda dengan kerjasama serupa yang sebelumnya dilakukan dengan PT. Pusri (Persero), sejak tahun 2012 ini kerjasama tersebut dilakukan dengan PT. Pusri Palembang karena kedudukan PT. Pusri (Persero) telah beralih menjadi PT. Pusri Holding yang membawahi lima pabrik pupuk BUMN di Indonesia.

Ruang lingkup kerjasama yang ditandatangani tersebut berupa paket kerjasama bidang klasifikasi yang mencakup pelaksanaan survey hingga penerbitan sertifikat klasifikasi dan statutoria yang menjadi kewenangan BKI untuk armada kapal milik PT. Pusri Palembang.

For the umpteenth time, Investor Magazine reinstate and awarded BKI as Best State Own Company for Categoryof Non-FinancialServices Trade, and Tourism. The award ceremony was performed in the event of Award and Investor Magazine Financial Figures 2012 which was held on December 13rd, 2012 at Four Seasons Hotel Ballroom Kuningan, Jakarta.

Since 2006 Investor magazine has been highlighted BKI as state own Enterprise for non financial service category, it is not irrespective to management an financial performance to pursuit the best achievement through retaining a growth of net revenue thereby BKI deserved to a noble by Triple-Award.

Business Development

In the begining 2012, BKI Management had initially conducting a strategic policy through updating / renewal a Memorandum of Understanding by Indonesian Port Corporation-I (Pelindo-I). A procession of MoU signature was carried out by both of President Director as a form of determination to implement a synergy among state own enterprise as stipulated by decree of Minister of State Enterprisesnumber : KEP-109/MBU/2002.

Through this MoU,Pelindo-I give an opportunities for BKI to provide a variety of services either of classification and statutory or non classification services such as marine consultancy and supervision, inspection and certification of lifting equipment, storage tank, pressure vessel, Health, safety and occupational management systems, and other services as required by Pelindo-I.

Along the year 2012, besides by Pelindo-I, BKI also enhancing partnership through extention of Memorandum of Understanding within Pelindo-IV as a form of synergy between state-owned enterprises which was conducted on February 9th, 2012 in Makassar. Scoupe of work is quite semilar as stipulated in Memorandum of Understanding by Pelindo-I. Cooperation within Pelindo-IV initially started in 2009 and keep continues to be extended due to a plenty of advantages for both parties.

In the year 2012, BKI also undertaking an extention of cooperation agreement with PT. Pusri Palembang wherein previously named as PT. Pusri (persero). PT. Pusri Palembang has been transforming as Holding company since 2012 and oversees five state-owned fertilizer factory in Indonesia.

The scope of cooperation agreement are consisting of provision for Classification and Statutory services as of issuing its certificate for all fleet belong to PT. Pusri Palembang.



Manajemen BKI bertekad untuk terus mengembangkan bidang Konsultansi dan Supervisi yang masih sangat potensial dan terbuka luas kesempatannya. Sejalan dengan hal tersebut, BKI menjalin kerjasama dengan Asia Lab (Malaysia) Sdn Bhd untuk mengembangkan bidang-bidang kerjasama konsultansi radiologi dan layanan jasa yang terkait sebagaimana yang tertuang dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani bersama antara kedua pihak di Jakarta tanggal 12 April 2012.

Ruang lingkup kerjasama yang rencananya dikembangkan di bawah Nota Kesepahaman itu adalah layanan pemantauan Low Specified Activities (LSA) dan Technologically Enhanced Naturally Occuring Radiaoactive Materials (TENORM), layanan laboratorium pemantauan lingkungan, pelatihan dan layanan konsultansi, layanan dekontaminasi radiasi, layanan konsultansi industrial, pemasokan instrumen nuklir dan peralatan ilmiah, dan program penilaian radiasi dan lingkungan (REAP).

Kerjasama Dengan Mitra Strategis

Dalam rangka meningkatkan dan memperluas kerjasama yang telah terjalin sejak 1974 khususnya dalam bidang peningkatan kemampuan teknis menyangkut konstruksi kapal, struktur lepas pantai, instalasi permesinan, beserta perlengkapannya, Biro Klasifikasi Indonesia dan Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) menandatangani Perjanjian Kerjasama Teknik Bidang Kapal dan Struktur Lepas Pantai tanggal 23 Februari 2012 di Jakarta. Penandatanganan yang dilakukan oleh Direktur Utama BKI dan Direktur Utama Class NK Noboru Ueda itu dimaksudkan untuk memanfaatkan keahlian teknis dan Sumber Daya Manusia kedua pihak.

Perjanjian ini memiliki ruang lingkup yang luas sehingga memungkinkan pendekatan yang lebih proaktif untuk petukaran informasi dan diskusi mengenai topik-topik terkini di bidang teknik dan industri. Kedua badan klasifikasi juga memandang penting untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan jasa di bidang klasifikasi kapal dan struktur lepas pantai melalui penyatuhan sumber daya teknik dan manusia yang dimiliki.

Lewat kerjasama teknis dengan Class NK yang merupakan badan klasifikasi nasional Jepang ini diharapkan kontribusi positif BKI sebagai salah satu asset bangsa yang penting untuk meningkatkan keselamatan di bidang maritim dapat semakin besar dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

BKI management is determined to consistently resume an improvement of Consultancy and Supervision business due to a high potential and great opportunity. in line with management prospective to enhance a Non Classification business, therefore BKI performing cooperation within Lab Asia (Malaysia) Sdn Bhd to establish a services of radiology consulting and related services as stipulated in a Memorandum of Understanding which was signed by both parties in Jakarta on April 12th, 2012

Scope of cooperation as stipulated under a Memorandum of Understanding is a monitoring service of Low Specified Activities (LSA) and Technologically Enhanced Naturally Occuring Radiaoactive Materials (TENORM), environmental monitoring laboratory services, training and consultancy services, radiation decontamination services, industrial consultancy services, supply nuclear instruments and scientific equipment, and radiation and environmental assessment program (REAP).

Operation with Strategic Partners

In the framework to improve and broadened the scope of cooperation which has been performed since 1974, Regarding to exert of improving a technical competency related to ships construction, offshore structures, installation of machinery and equipment, thereby BKI and Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) has signed a Technical Cooperation Agreement in a field / scope of Ships and Offshore Structures dated February 23rd, 2012 in Jakarta. The signing were undertake by BKI President Director and President Director of Class NK Mr. Noboru Ueda.

The aim of such cooperation is to optimise all technical expertise and human resources of both parties.

This agreement has an extended scope to possibly enable a more proactive approach for the exchange of information and discussion on current topics in the field of engineering and industry. Both classification society considered of necessary upon improvement a quality and simplify a process of classification of ships and offshore structures certification services through synergize a technical resources of both parties.

Through technical cooperation with NK Class whose belong to national classification society of Japan is expected BKI enable to positively contribute as one of the nation's prominent assets to improve safety aspect in a maritime sector for the sake of stakeholders necessity and benefit.

Selain dengan Klas Partner anggota International Association of Classification Societies (IACS), BKI juga proaktif menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia untuk peningkatan kualitas SDM sebagaimana yang dilakukan dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya melalui kerjasama pelatihan Damage Stability bagi para surveyor BKI.

Dasar pengembangan kerjasama ini adalah ketentuan Safety of Life at Sea (SOLAS) Consolidated Edition 2009 Chapter II-1 Part B-1 yang mewajibkan Damage Stability untuk semua kapal penumpang dan kapal kargo dengan panjang 80 m atau lebih yang dibangun setelah tanggal 1 Januari 2009. Berkaitan dengan hal tersebut maka kapal-kapal Klas BKI yang memenuhi persyaratan di atas harus pula melengkapi persyaratan Damage Stability.

Class Partner anggota IACS memandang BKI sebagai mitra strategis yang potensial, oleh karena itu President and Chief Operation Officer Asia-Pacific American Bureau of Shipping (ABS) melakukan kunjungan kehormatan ke Kantor Pusat Biro Klasifikasi Indonesia tanggal 3 Mei 2012. Maksud dari kunjungan Presiden ABS ini adalah selain untuk perkenalan adalah juga untuk melakukan pembicaraan terkait bidang-bidang yang tengah dikerjasamakan antara BKI dan ABS termasuk proyek Inpex Masela. ABS juga menyatakan siap memberikan training di fasilitas yang dimilikinya di Singapura bagi para tenaga teknik BKI yang terlibat dalam proyek bersama.

Beside establishing a cooperation by a class partner which is belong to a member of International Association Classification Societies (IACS), BKI also proactively develop cooperation with prominent universities in Indonesia in a bid to improve the quality of human resources, these cooperation has performed with the Institut Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya concerning a training of Damage Stability attending by BKI surveyor.

In term of such development cooperation background is a regulation of Safety of Life at Sea (SOLAS) as stated in Consolidated Edition 2009 Chapter II-1 Part B-1, which requires Damage Stability for all passenger ships and cargo ships with a length of 80 m or more and were built after January 1, 2009. In this regard all registered of BKI vessel that's meet to a such requirements shall becomply to its regulation.

Class partner of IACS members were perceived BKI as a strategic partner, therefore President and Chief Operation Officer of Asian-Pacific American Bureau of Shipping (ABS) officially visiting BKI on May 3rd2012. The purpose of such visit is to deliberating relevant project including Inpex Masela project. ABS also expressed a readiness to provide training for BKI's Surveyor whose involved in a joint project at ABS Singapore



Noboru Ueda Chairman dan Presiden Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) tanggal 9 November 2012 melakukan kunjungan kehormatan kepada Direktur Utama Biro Klasifikasi Indonesia di Kantor Pusat BKI Jakarta.

Officially visit event, Chairman and President Director of Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) Noboru Ueda share a light moment with BKI President Director Mr. Ibnu Wibowo dated November 9th 2012.



Dalam kunjungannya yang pertama ke BKI tersebut Ueada yang didampingi beberapa orang stafnya menyampaikan rasa gembiranya karena akhirnya dapat berkunjung untuk membahas berbagai hal yang dapat dikembangkan di antara kedua badan klasifikasi. ClassNK dan BKI telah menjalin kerjasama sejak tahun 1974 dan kedua badan klasifikasi juga telah memperbarui dan memperluas perjanjian kerjasama tersebut pada 2008.

Kontribusi bagi Para Pemangku Kepentingan

BKI memposisikan dirinya sebagai salah satu agen informasi dan implementasi berkaitan dengan peraturan terkini bidang maritim yang dikeluarkan oleh International Maritime Organization (IMO). Berkaitan dengan hal itu BKI bekerjasama dengan PT. Mentari Timur Unggul selaku agen pabrikan mesin kapal MTU dari Jerman menyelenggarakan Seminar dan Diskusi Nasional "Implementasi Revisi Marpol Annex VI Emisi Gas Buang dari Kapal-kapal Berbendera Indonesia".

Seminar dan diskusi nasional ini bertujuan mengkaji berbagai aspek yang terkait dengan revisi peraturan International Maritime Organization (IMO) mengenai Marine Pollution (Marpol) Annex VI, implementasinya bagi kapal-kapal berbendera Indonesia, serta kesiapan Pemerintah dan instansi terkait dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan pemberlakuan. Berkaitan dengan revisi Marpol Annex VI ini BKI siap mendukung Ditjen Perhubungan Laut dalam melakukan pemeriksaan, sertifikasi, dan pengawasan implementasinya sejalan dengan misi BKI untuk meningkatkan aspek keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan maritim.

During his first visit to BKI Head Office, Mr Ueada accompanied by his colleague and expressed their excitement as of finally be able to visit BKI and may discuss a variety of topics that's possibly can be developed between both parties. ClassNK and BKI have been performing cooperation since 1974, and both parties agreed to keep closed by extention and broadened scope of cooperation agreement in 2008.

Contribution to Stakeholders

BKI positioning its self as one of agents information and implementation related to current maritime regulations issued by the International Maritime Organization (IMO). Associated with such matter, BKI build cooperation with PT. Mentari Timur Unggul as an agent ship engine manufacturer MTU from Germany as well carried out National Discussion and Seminar "Implementation of Revised Marpol Annex VI, Emissions from Indonesian-flagged vessels".

Seminar and National Discussion aim to review a variety aspect associated to revision of International Maritime Regulation concerning Marine Pollution (Marpol) Annex VI, Implementation for Indonesia Vessel, and a readiness Government and other institution in term of conducting verification and supervise an implementation. Regarding to revision of Marpol Annex VI, BKI ready to support Government (Directorat General of Sea Transportation) to conduct verification, certification, and supervise an implementation in line with BKI mission to improve safety aspect of ship and marine environmental protection.



Manajemen BKI bertekad melakukan transformasi ke arah yang lebih baik dalam pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasilnya, termasuk peningkatan pelayanan, mekanisme kerja, organisasi, dan kualitas sumber daya manusia. Menandai hal tersebut dalam rangka memperingati ulang tahunnya yang ke 48, BKI menyelenggarakan Seminar Teknik Sehari bertema "Transformasi BKI Menuju Keanggotaan IACS".

Materi yang dibahas dalam seminar teknik ini terbagi ke dalam dua kelompok, maritime safety (keselamatan maritim) dan marine environment (lingkungan laut) yang disampaikan oleh para expert BKI dan para pembicara lain yang berkompeten di bidang teknologi perkapanan dan keselamatan maritim. Beberapa materi yang dibahas dalam seminar ini antara lain regulasi IMO Annex VI (Marine Pollution), Ballast Water Management, Konvensi mengenai Ship Recycling, dan lain-lain.

Melalui Seminar Teknik ini diharapkan para mitra kerja, pemakai jasa, dan pemangku kepentingan secara keseluruhan dapat memperoleh informasi terkini berkaitan peraturan dan ketentuan bidang marine safety dan teknologi perkapanan terkini, termasuk berbagai kemajuan dan fasilitas kemudahan yang diberikan BKI kepada para pemakai jasanya.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada para pemakai jasa sekaligus melakukan pembinaan sebagai upaya meningkatkan kualitas industri kapal dalam negeri, Biro Klasifikasi Indonesia menyelenggarakan program sertifikasi juru las galangan kapal secara gratis. Untuk tahun 2012 program ini diadakan di Jembayan, Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.



Program sertifikasi juru las gratis seperti ini rencananya akan dilakukan secara berkala di daerah-daerah yang memiliki industri galangan kapal sebagai wujud corporate social responsibility dan kepedulian BKI pada peningkatan aspek keselamatan kapal dan kualitas hasil industri dalam negeri. Lebih jauh Ibnu Wibowo menambahkan bahwa program ini juga merupakan wujud tanggung jawab sosial BKI melalui kontribusi yang nyata kepada industri maritim nasional.

BKI Management determined to transform BKI to become better in term of project execution and production Including improvement of service, work mechanism, organization, quality of human resources, therefore in line with such management mission BKI held a technical seminar by a theme of "Transformation of BKI toward IACS Memberships", seminar conducted as a part of series of BKI anniversary celebration.

Content of seminar divided into two topics, which are maritime safety and marine environment delivered by BKI experts and others competent expert of maritime technology and maritime safety. There are several topics to be discussed in a seminar such as IMO Annex VI (Marine Pollution), Ballast Water Management, Convention of Ship Recycling, etc.

Through technical seminar were expected that all BKI partner, clients, and the whole of stakeholder enable to get current information related to rules and regulations of marine safety and the most sophisticated of ships technology including a variety of facility given by BKI to all clients.

In a bid to improve a services and giving guidance to a clients as well in a bid to improve a quality of national shipping industry, BKI conducting a free of charge Welder Certification to all shipyard. During 2012 this programme were carried out in Jembayan, Loa Kulu, Kutai Kartanegara, North Kalimantan.



BKI regularly will carried out such welder certification at any place where shipyard were located as part of BKI effort to implement and promoting Corporate Social Responsibility and also as realize BKI attention to improve ship safety aspect and quality of national industry. Furthermore Mr. Ibnu Wibowo added that such programme were undertake as a manifestation of social responsibility through the real contribution into National Maritime Industry.

Klasifikasi Kapal

Ship Classification

Dampak diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia No 5 tahun 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional dan Permenhub KM. 20 tahun 2006 tentang kewajiban kapal bendera Indonesia memiliki klasifikasi dari BKI menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan register kapal kelas BKI, meskipun masih didominasi penerimaan kelas bangunan sudah jadi dibandingkan dengan penerimaan kelas bangunan baru.

Jumlah kapal yang diregister pada akhir Desember 2012 berjumlah 16.167 unit atau 109,58% lebih besar dibandingkan tahun 2011 dengan total Gross Tonnage mencapai 21.068.650 GT. Jumlah penambahan kapal yang diregister pada tahun 2012 adalah 1.413 unit atau 2.292.778 GT.

Kapal yang dicabut kelasnya sampai dengan tahun 2012 adalah 6.661 unit atau 6.446.268 GT. Pencabutan kelas ini dengan alasan tidak memenuhi persyaratan Rules & Regulation dengan mulai diterapkannya Automatic Class Suspension, pindah ke badan klasifikasi lain, tenggelam, discrapp atau permintaan dari pemilik kapal. Sehingga kapal kelas BKI dengan status klas berlaku (valid class), meningkat dari tahun 2011 yang sebesar 7.528 unit dengan tonase total 11.948.154 GT menjadi 9.506 unit dengan tonase total 14.622.382 GT.

Impact of the INPRES No.5- 2005 on the empowerment of the national shipping industry and Permenhub KM. 20- 2006 on the obligations of the Indonesia flag ship classed to BKI has resulted in increasing acceptance of BKI registered class ships, though still dominated by Existing Ships Admission Class (PKBL) compared to the New Building Admission Class.

The number of vessels registered at the end of December 2012 amounted to 16,167 units or 109.58% higher than in 2011 with a total Gross Tonnage reached 21,068,650 GT. The number of additional vessels registered in 2012 was 1,413 units or 2,292,778 GT.

Class withdrawn ship in 2012 was 6,661 units or 6,446,268 GT. The reason of this class withdrawn were failure to fulfill Rules & Regulations as starting the implementation of Automatic Class Suspension, change of classification bodies, sinking, scrapping or request from the ship's owner. So that, the BKI class ships with valid class status increase from amounted of 7,528 units with total tonnage of 11,948,154 in 2011 into 9,506 units with total tonnage of 14.622.382 GT in 2012.

Kapal Register tahun 2008 - 2012
Kapal Kelas Valid sesuai umur

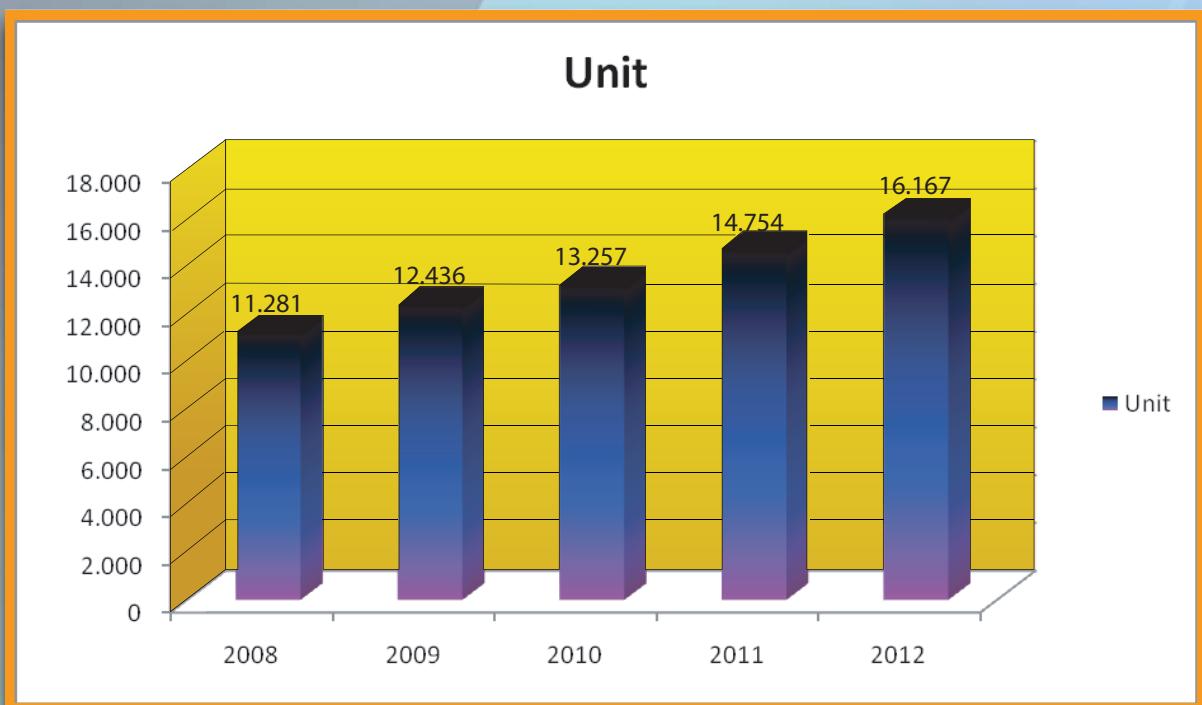
Year	Unit	GT
2012	16.167	21.068.650
2011	14.754	18.775.872
2010	13.257	15.587.786
2009	12.436	13.652.223
2008	11.281	11.561.461

Ships Registered from 2008 to 2012
Valid Class Ships by ship age

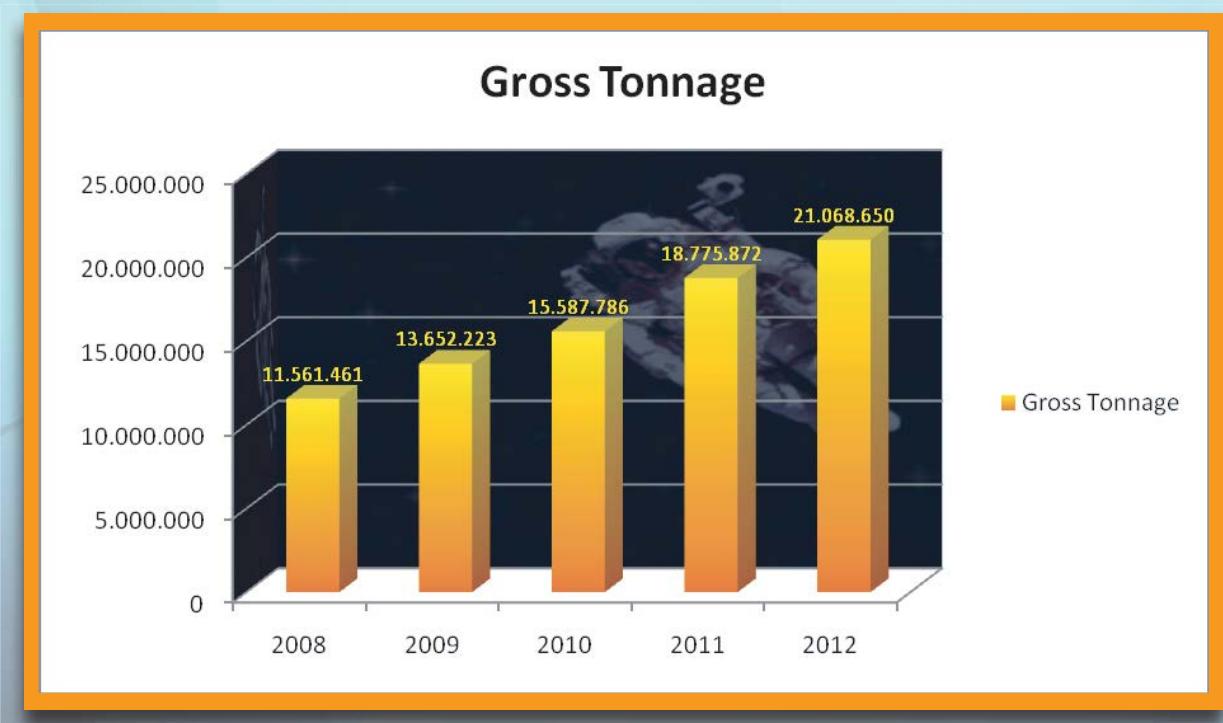
Ship Age	Unit	GT
0-5	3.834	5.438.936
6-10	1.689	1.862.666
11-15	1.014	1.352.298
16-20	1.105	1.792.959
21-25	798	1.543.578
>25	1.496	3.398.781



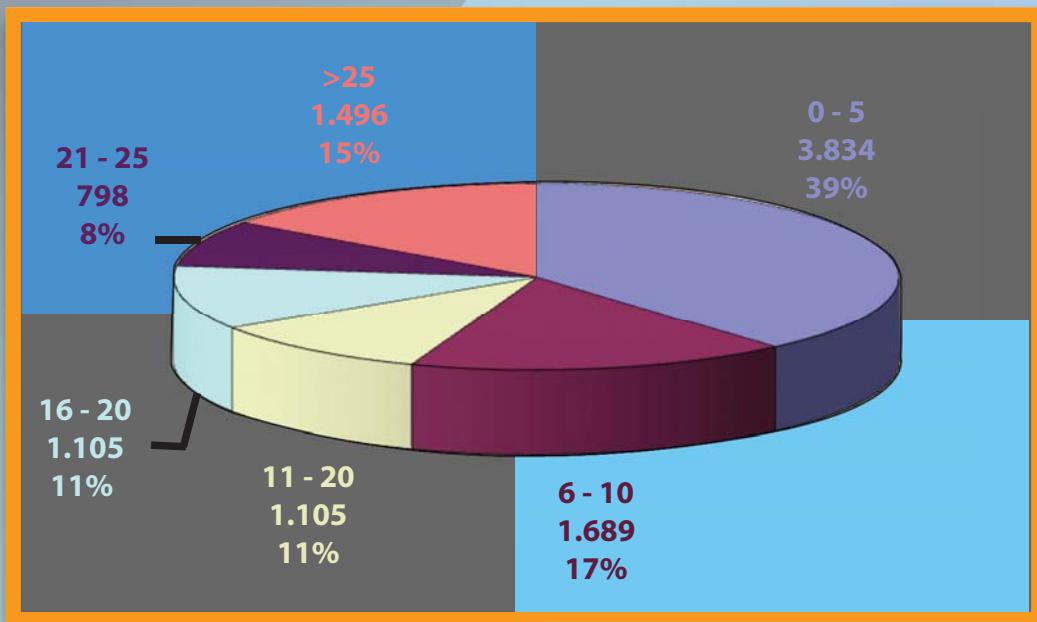
Kapal Register 2008 - 2012 (Unit)



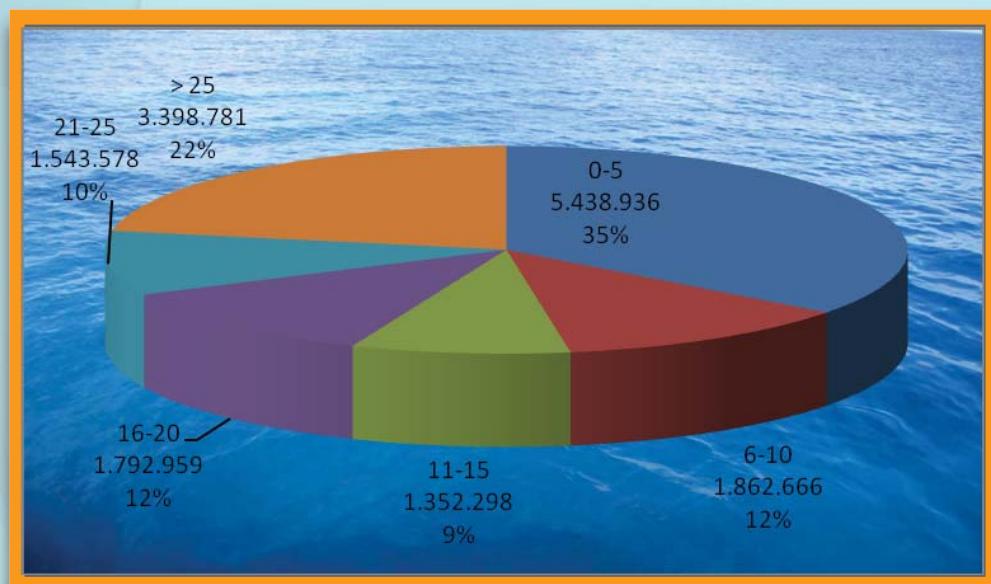
Kapal Register 2008 - 2012 (GT)



Kapal Kelas Valid sesuai umur (unit)



Kapal Kelas Valid sesuai umur (GT)



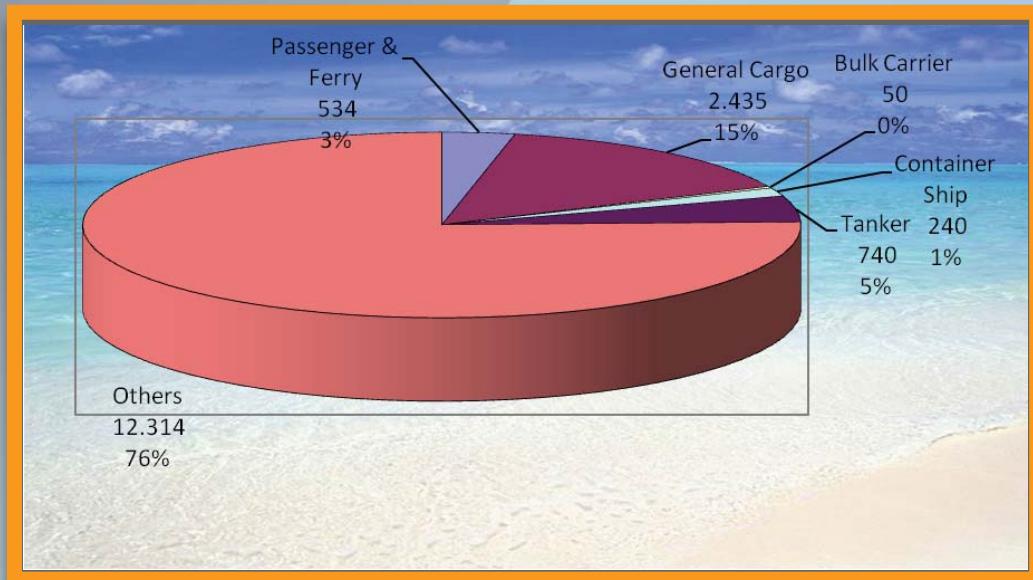
Rincian Tipe Kapal yang diregister

Breakdown of type of ships

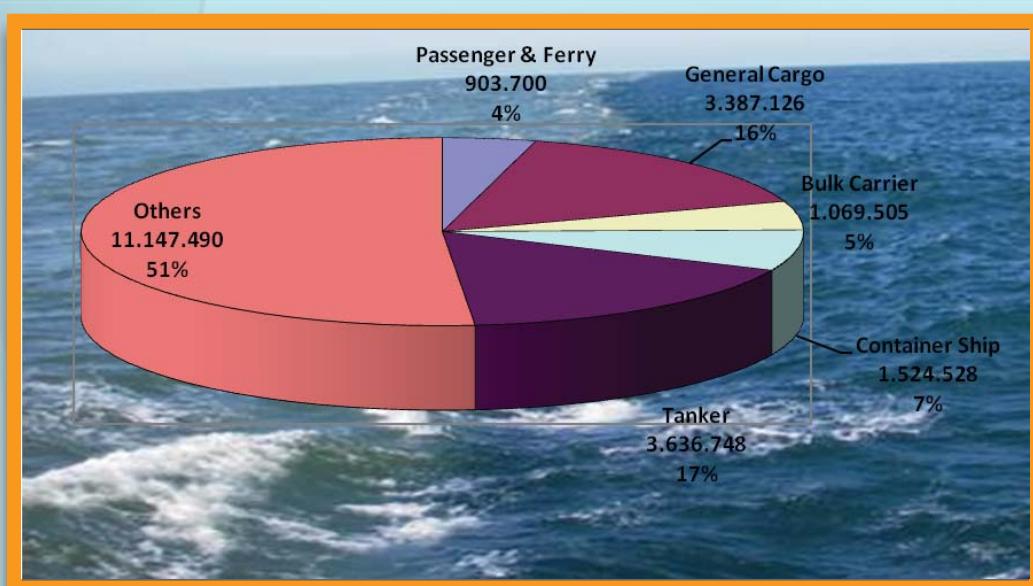
Type Kapal	Total Unit	Total GRT
Passenger & Ferry	539	903.700
General Cargo	2.435	3.387.126
Bulk Carrier	50	1.069.505
Container Ship	240	1.524.528
Tanker	740	3.636.748
Others	12.314	11.147.490



Rincian Tipe Kapal Yang Diregister (Unit)



Rincian Tipe Kapal Yang DIREGISTER (GT)



Daftar Penerimaan Kelas Bangunan Baru Tahun 2012 :

List of Admission of New Building 2012 :

No.	Nama Kapal	Jenis Kapal	GT (Ton)	Dimension (M)	Pemilik	Galangan
1.	Adhi 3	Kapal Tunda	146	22.17 x 7.32 x 3.20	PT. Adhimix Pelayaran Internusa	PT. Nongsa Jaya Buana
2.	Aditya 58	Kapal Tunda	154	22.03 x 7.30 x 3.20	PT. Pasifik Bintan Indo Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
3.	Aditya 55	Kapal Tunda	145	21.98 x 7.30 x 3.20	PT. Pasifik Bintan Indo Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
4.	Aditya 60	Kapal Tunda	147	21.99 x 7.32 x 3.20	PT. Pelayaran Nasional Gandasari Shipping Line	PT. Alima Usaha Samudra Shipyard
5.	Akra 40	Kapal Tunda	185	24.28 x 8.20 x 3.40	PT. AKR Corporindo Tbk	Steadfast Marine Shipbuilding & Engineering
6.	Alfa Lingga	Tongkang Minyak Nabati	2831	76.07 x 21.34 x 6.10	PT. Alfa Kencana Samudra	
7.	Alfa Kirana	Tongkang Minyak Nabati	2367	76.07 x 21.33 x 6.09	PT. Alfa Kencana Samudra	PT. Bandar Abadi
8.	Amanda	Tongkang Minyak	982	52.66 x 19.51 x 4.27	PT. Cahaya Bintang Respati	
9.	Ame 8	Tongkang Minyak	2312	75.49 x 20.72 x 5.48	PT. Trikarya Samudra Indonesia Indah	PT. Citra Shipyard
10.	Aquarius I	Kapal Tunda	260	26.88 x 9.26 x 4.23	PT. Mitra Samudra Bahari	PT. Samudra Marine Indonesia
11.	As Marina 10	Tongkang Minyak Nabati	1682	67.30 x 18.28 x 5.18	PT. Pelayaran Kapuas Armada Nusantara	PT. Karyasindo Samudra Biru Shipayrd
12.	Audrey 08	Kapal Tunda	144	21.69 x 7.00 x 3.30	PT. Pelayaran Antara Mas Bahari	PT. Galangan Mercusuar
13.	Bakau Besar	Tongkang Minyak	1858	69.12 x 17.20 x 5.53	PT. Pelayaran Baharimas Kalimantan	PT. Pelayaran Baharimas Kalimantan
14.	Barracuda 08	Kapal Tunda	125	21.69 x 7.00 x 3.30	PT. Pelayaran Antara Mas Bahari	PT. Galangan Mercusuar
15.	Barracuda 88	Kapal Tunda	144	21.69 x 7.00 x 3.30	PT. Pelayaran Antara Mas Bahari	PT. Galangan Mercusuar
16.	Batavia IV-216	Kapal Tunda	236	24.43 x 10.30 x 3.80	PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok	PT. Janata Marina Indah
17.	Batavia III-216	Kapal Tunda	236	24.43 x 10.30 x 3.80	PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok	PT. Janata Marina Indah
18.	Belibis VI	Kapal Tunda	153	21.98 x 7.30 x 3.20	PT. Nugraha Bhakti Samudra	PT. Bahtera Bahari Shipyard
19.	Berkat Mandiri 3	Kapal Tunda	147	21.77 x 7.32 x 3.20	PT. Mandiri Line	PT. Alima Usaha Samudra Shipyard
20.	Bg. Serasi 17	Tongkang Minyak Nabati	1994	70.81 x 18.28 x 4.87	PT. Serasi Shipping Indonesia	PT. Bandar Abadi
21.	Bintang Rejeki 1	Kapal Tunda	125	21.69 x 7.00 x 3.30	PT. Terang Samudera Line	PT. Galangan Mercusuar
22.	Bintang Rejeki 2	Kapal Tunda	125	21.69 x 7.00 x 3.30	PT. Terang Samudera Line	PT. Galangan Mercusuar
23.	Blm Jaya III	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.20 x 4.00	PT. Bahtera Lautan Mandiri	PT. Karya Teknik Utama
24.	BMJ 7	Kapal Tunda	146	22.17 x 7.32 x 3.10	PT. Bangun Reksa Millenium Jaya	PT. Nongsa Jaya Buana
25.	Bobot Masiwang	Kapal Penyeberangan	660	40.70 x 12.00 x 3.20	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia
26.	Bojoma 01	Kapal Tunda	153	21.79 x 7.32 x 3.20	PT. Pelayaran Nasional Pasifik Samudera Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard



No.	Nama Kapal	Jenis Kapal	GT (Ton)	Dimension (M)	Pemilik	Galangan
27.	Bojoma 02	Kapal Tunda	153	21.98 x 7.30 x 3.20	PT. Pelayaran Nasional Pasifik Samudera Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
28.	BPP 1	Kapal Tunda	146	21.65 x 7.32 x 3.20	PT. Bahtera Putra Perkasa	PT. Karya Teknik Utama
29.	BPW 7	Kapal Tunda	139	21.88 x 7.32 x 3.20	PT. Berlian Permata Wahana	PT. Sumber Samudra Makmur
30.	Buana Raider III	Kapal Tunda	100	19.39 x 6.10 x 2.75	PT. Buana Benua Shipping	PT. Nongsa Jaya Buana
31.	Buana Raider V	Kapal Tunda	88	19.08 x 6.10 x 2.75	PT. Buana Benua Shipping	PT. Nongsa Jaya Buana
32.	Buana Raider VI	Kapal Tunda	88	19.39 x 6.10 x 2.75	PT. Buana Benua Shipping	PT. Nongsa Jaya Buana
33.	Buana Success IX	Kapal Tunda	146	22.17 x 7.32 x 3.10	PT. Buana Benua Shipping	PT. Nongsa Jaya Buana
34.	Buana Success VIII	Kapal Tunda	146	22.17 x 7.32 x 3.10	PT. Buana Benua Shipping	PT. Nongsa Jaya Buana
35.	Buana Raider I	Kapal Tunda	100	19.39 x 6.10 x 2.75	PT. Buana Benua Shipping	PT. Nongsa Jaya Buana
36.	Buana Raider II	Kapal Tunda	100	19.39 x 6.10 x 2.75	PT. Buana Benua Shipping	PT. Nongsa Jaya Buana
37.	Buana Success XI	Kapal Tunda	146	22.17 x 7.32 x 3.10	PT. Buana Benua Shipping	PT. Nongsa Jaya Buana
38.	Buana Success X	Kapal Tunda	146	22.17 x 7.32 x 3.10	PT. Buana Benua Shipping	PT. Nongsa Jaya Buana
39.	Bumi Elaeis Dua	Tongkang Minyak Nabati	1174	49.74 x 18.29 x 4.88	PT. Tarunacipta Kencana	PT. Bandar Abadi
40.	Bumi Elaeis Satu	Tongkang Minyak Nabati	1174	49.74 x 18.29 x 4.88	PT. Tarunacipta Kencana	PT. Bandar Abadi
41.	BVS 9	Kapal Tunda	153	22.03 x 7.32 x 3.20	PT. Pal. Bahtera Victory Shipping	PT. Bandar Abadi
42.	Calvin 26	Kapal Tunda	153	21.59 x 7.30 x 3.20	PT. Pasifik Bintan Indo Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
43.	Calvin 27	Kapal Tunda	116	19.25 x 6.60 x 3.10	PT. Pasifik Bintan Indo Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
44.	Cantika Terpedo	Kapal Penyeberangan	266	35.40 x 6.80 x 2.60	Jonny De Quelju	PT. Sukses Bahari Nusantara
45.	Cavalo Marinho 03	Kapal Tunda	146	21.20 x 7.32 x 3.20	PT. Segara Transindo Mandiri	PT. Bintang Intipersada Shipyard.
46.	Cecilia II	Tongkang Minyak Nabati	1435	59.39 x 18.28 x 4.87	PT. Belawan Buana Indonesia	PT. Bandar Abadi
47.	Cherry II	Tongkang Minyak Nabati	1935	67.34 x 26.71 x 5.18	PT. Pelayaran Pandupasifik Karismaraya	PT. Bandar Abadi
48.	Citra Murni	Kapal Tunda	147	21.19 x 7.32 x 3.20	PT. Moro Citra Samudra	PT. Alima Usaha Samudra Shipyard
49.	Citra 02	Kapal Tunda	153	21.08 x 7.32 x 3.20	PT. Citra Maritime	PT. Citra Shipyard
50.	Citra 03	Kapal Tunda	153	21.08 x 7.32 x 3.20	PT. Citra Maritime	PT. Citra Shipyard
51.	Claudia II	Tongkang Minyak Nabati	3185	83.10 x 21.33 x 6.09	PT. Pelayaran Samudera Layar Sentosa	PT. Bandar Abadi
52.	Cleon II	Tongkang Minyak Nabati	1435	59.39 x 18.29 x 4.88	PT. Belawan Buana Indonesia	PT. Bandar Abadi
53.	CPL 250	Tongkang Minyak	2102	73.15 x 21.34 x 5.49	PT. Cindara Pratama Lines	
54.	CSA 1	Kapal Tunda	161	23.37 x 8.00 x 3.30	PT. Pelayaran Citra Sanjaya Abadi	PT. Alima Usaha Samudra Shipyard
55.	Dabo 102	Kapal Tunda	116	20.21 x 6.60 x 3.10	PT. Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
56.	Dabo 105	Kapal Tunda	116	20.21 x 6.60 x 3.10	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
57.	Dabo 608	Kapal Tunda	66	16.20 x 5.50 x 2.85	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
58.	Dabo 609	Kapal Tunda	66	16.20 x 5.50 x 2.85	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard



No.	Nama Kapal	Jenis Kapal	GT (Ton)	Dimension (M)	Pemilik	Galangan
59.	Dabo 610	Kapal Tunda	66	16.21 x 5.50 x 2.85	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
60.	Dabo 611	Kapal Tunda	66	16.20 x 5.50 x 2.85	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
61.	Daya 18	Kapal Tunda	153	22.03 x 7.30 x 3.20	PT. Daya Bahtera Sumatera	PT. Bahtera Bahari Shipyard
62.	Dayaindo 1	Kapal Tunda	207	24.19 x 8.20 x 4.00	PT. Dayaindo Shipping	PT. Karya Teknik Utama
63.	Dayaindo 2	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.20 x 4.00	PT. Dayaindo Shipping	PT. Karya Teknik Utama
64.	Dayang Laksana 111	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.20 x 4.00	PT. Kerajaan Lintas Samudera	PT. Karya Teknik Utama
65.	Elnusa Samudra 7	Tongkang Kerja	2074	58.52 x 18.29 x 4.00	PT. Elnusa Tbk.	PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya
66.	Enterprise I	Kapal Tunda	146	21.19 x 7.32 x 3.20	PT. Pelayaran Bintang Surya Sejahtera	PT. Bintang Intipersada Shipyard
67.	Ersihan Oasis	Kapal Tunda	251	25.74 x 8.60 x 4.30	PT. Salim Samudra Pasific Line	PT. Karya Teknik Utama
68.	Eti 307	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.20 x 4.00	PT. Energy Transporter Indonesia	PT. Karya Teknik Utama
69.	Eti 308	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.20 x 4.00	PT. Energy Transporter Indonesia	PT. Karya Teknik Utama
70.	Eti 309	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.20 x 4.00	PT. Energy Transporter Indonesia	PT. Karya Teknik Utama
71.	Eti 104	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.20 x 4.00	PT. Energy Transporter Indonesia	PT. Karya Teknik Utama
72.	Eti 105	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.20 x 4.00	PT. Energy Transporter Indonesia	PT. Karya Teknik Utama
73.	Express Bahari 1e	Kapal Penyeberangan	271	36.00 x 6.95 x 2.75	Jonny De Quelju	PT. Sukses Bahari Nusantara
74.	Express Bahari 9c	Kapal Penyeberangan	268	37.07 x 7.50 x 2.60	PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur	PT. Sukses Bahari Nusantara
75.	Gading 01	Crew Boat Catamaran	70		PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	PT. Eka Multi Bahari
76.	Gambolo	Kapal Penyeberangan	560	40.60 x 12.00 x 3.20	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	PT. Bayu Bahari Santosa
77.	Gladdys	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.20 x 4.00	PT. Kwan Samudera Mandiri	PT. Karya Teknik Utama
78.	Harco	Kapal Tunda	161	23.37 x 8.00 x 3.30	PT. Perusahaan Pelayaran Ekawira Swadaya Abadi	PT. Alima Usaha Samudra Shipyard
79.	Harmony XI	Kapal Tunda	202	26.16 x 8.00 x 3.75	PT. Pelayaran Duta Lintas Samudera	PT. Citra Bahari Shipyard
80.	Harmony XII	Kapal Tunda	202	26.16 x 8.00 x 3.75	PT. Kukar Mandiri Shipyard	PT. Citra Bahari Shipyard
81.	Hasnur 09	Kapal Tunda	207	25.01 x 8.20 x 4.00	PT. Hasnur Internasional Shipping	PT. Galangan Mercusuar
82.	Jeffstar 8	Kapal Tunda	154	22.03 x 7.30 x 3.20	PT. Bahtera Mitra Perkasa	PT. Bahtera Bahari Shipyard
83.	Jhoni XXII	Kapal Tunda	222	27.36 x 8.00 x 3.80	PT. Jhonlin Marine Trans	PT. Bahtera Bahari Shipyard
84.	Jhoni XXV	Kapal Tunda	251	25.74 x 8.60 x 4.30	PT. Jhonlin Marine Trans	PT. Karya Teknik Utama
85.	Jhoni XXVI	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.20 x 4.00	PT. Jhonlin Marine Trans	PT. Karya Teknik Utama
86.	Jhoni XXIII	Kapal Tunda	222	27.36 x 7.00 x 3.70	PT. Jhonlin Marine Trans	PT. Bahtera Bahari Shipyard
87.	Jhoni XXIV	Kapal Tunda	222	27.02 x 8.00 x 3.70	PT. Jhonlin Marine Trans	PT. Bahtera Bahari Shipyard
88.	Jhoni XXIX	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.20 x 4.00	PT. Jhonlin Marine Trans	PT. Karya Teknik Utama
89.	Jhoni XXVII	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.20 x 4.00	PT. Jhonlin Marine Trans	PT. Karya Teknik Utama
90.	Jhoni XXVIII	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.20 x 4.00	PT. Jhonlin Marine Trans	PT. Karya Teknik Utama



No.	Nama Kapal	Jenis Kapal	GT (Ton)	Dimension (M)	Pemilik	Galangan
91.	Jhoni XXX	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.20 x 4.00	PT. Jhonlin Marine Trans	PT. Karya Teknik Utama
92.	Kapuas	Tongkang Minyak Berpengerak Sendiri	2370	84.07 x 20.00 x 5.00	PT. Pertamina Trans Kontinental	PT. Venture Technology Indonesia
93.	Karya Pacific 17	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.20 x 4.00	PT. Karya Pacific Shipping	PT. Karya Teknik Utama
94.	Karya Pacific 19	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.20 x 4.00	PT. Karya Pacific Shipping	PT. Karya Teknik Utama
95.	Karya Star 18	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.20 x 4.00	PT. Karya Bintang Timur	PT. Karya Teknik Utama
96.	Kelinci Mas Satu	Kapal Tunda	129	19.87 x 7.00 x 3.20	PT. Tarunacipta Kencana	PT. Bandar Abadi
97.	Kelinci Mas Dua	Kapal Tunda	129	19.87 x 7.00 x 3.20	PT. Tarunacipta Kencana	PT. Bandar Abadi
98.	Kelong 1	Kapal Tunda	154	21.98 x 7.30 x 3.20	PT. Pelayaran Angkutan Laut Bintang Kartika	PT. Bahtera Bahari Shipyard
99.	Kietrans 26	Kapal Tunda	223	26.92 x 8.00 x 3.70	PT. Kietrans Marina Shipping	PT. Batam Marina Shipyard
100.	Kietrans 28	Kapal Tunda	222	27.17 x 8.00 x 3.70	PT. Kietrans Marina Shipping	PT. Batam Marina Shipyard
101.	Kietrans 27	Kapal Tunda	222	27.17 x 8.00 x 3.70	PT. Kietrans Marina Shipping	PT. Batam Marina Shipyard
102.	KJ Marine 241	Tongkang Minyak	1696	70.81 x 18.29 x 5.49	PT. Pelayaran K J Marine	PT. Bandar Abadi
103.	KJ Marine 242	Tongkang Minyak	1696	70.81 x 18.29 x 5.49	PT. Pelayaran K J Marine	PT. Bandar Abadi
104.	KKS 1203	Kapal Tunda	146	21.77 x 8.00 x 3.70	PT. Pelayaran Sumatera Bukit Mas	PT. Alima Usaha Samudra
105.	KSD 05	Kapal Tunda	297	27.45 x 9.60 x 4.40	PT. Pelayaran Batamitra Sejahtera	PT. Batamitra Sejahtera
106.	Kundur	Kapal Penyeberangan	338	34.99 x 11.00 x 3.30	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	PT. Daya Radar Utama
107.	Kwan 7	Kapal Tunda	146	21.65 x 7.32 x 3.20	PT. Kwan Samudra Mandiri	PT. Karya Teknik Utama
108.	KYK 02	Kapal Tunda	207	24.85 x 8.20 x 4.00	PT. Kyk Lines	PT. Karya Teknik Utama
109.	Labuhan Haji	Kapal Penyeberangan	753	48.28 x 14.00 x 3.40		PT. Daya Radar Utama
110.	Liana XXX	Tongkang Minyak	1134	52.66 x 18.28 x 4.87	PT. Jhonlin Marine Trans	
111.	LLB Sukses 15	Kapal Tunda	146	22.17 x 7.32 x 3.10	PT. Pelayaran Laju Lintas Bahari	PT. Nongsa Jaya Buana
112.	LLB Sukses 10	Kapal Tunda	146	22.17 x 7.32 x 3.10	PT. Pelayaran Laju Lintas Bahari	PT. Nongsa Jaya Buana
113.	LLB Sukses 12	Kapal Tunda	146	22.17 x 7.32 x 3.20	PT. Pelayaran Laju Lintas Bahari	PT. Nongsa Jaya Buana
114.	Lohoraung	Kapal Penyeberangan	458	35.08 x 10.50 x 2.80	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	PT. Adiluhung Saranasegara
115.	Mahakam	Tongkang Minyak Berpengerak Sendiri	2370	84.07 x 20.00 x 5.00	PT. Pertamina Trans Kontinental	PT. Venture Technology Indonesia
116.	Mangaka	Kapal Tunda	212	27.07 x 8.00 x 3.70	PT. Jasa Prima Samudra	PT. Galangan Mercusuar
117.	Marina 1221	Kapal Tunda	153	21.79 x 7.32 x 3.20	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
118.	Marina 1601	Kapal Tunda	198	24.14 x 8.00 x 3.65	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
119.	Marina 1222	Kapal Tunda	153	22.03 x 7.30 x 3.20	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard
120.	Marina 2435	Kapal Tunda	222	27.36 x 8.00 x 3.70	PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	PT. Bahtera Bahari Shipyard



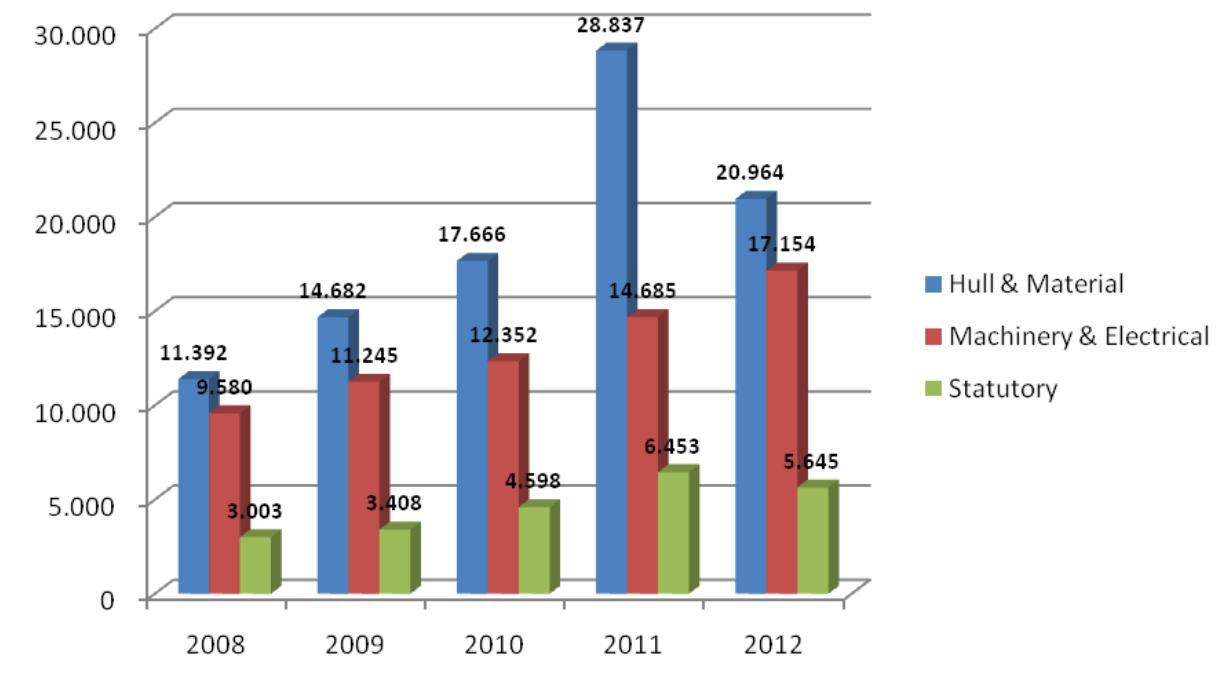
Persetujuan Gambar

Pada tahun 2012, BKI menerima permintaan untuk drawing / plan approval yang terdiri dari 20.964 kontrak dan 43.763 gambar / perhitungan. Diantaranya adalah 20.964 gambar kontruksi lambung, 17.154 gambar permesinan / listrik serta 5.645 gambar / perhitungan statutoria.

Drawing Approval

In 2012, BKI accepted for drawing / plan approval consisting of the 20,964 contract and 43,763 drawings/ calculations. Among them are 20,964 hull construction drawings, and 17,154 machinery / electrical drawings and 5,645 statutory drawings/calculations.

Division	2008	2009	2010	2011	2012
Hull & Material	11.392	14.682	17.666	28.837	20.964
Machinery & Electrical	9.580	11.245	12.352	14.685	17.154
Statutory	3.003	3.408	4.598	6.453	5.645
Total	23.975	29.335	34.616	49.975	43.763



Aktifitas Survey Klasifikasi

Dalam pelaksanaan survey di lapangan, BKI menerima 22.506 permintaan survey yang terdiri dari 2.109 survey dalam rangka penerimaan kelas dan 20.397 survey dalam rangka mempertahankan kelas. Perincian jenis survey yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Class Survey Activities

In implementing field survey, BKI received 22,506 application for survey consisting of 2,109 surveys for admission to class and 20,397 surveys for maintaining of class. The breakdown of kind of survey carried out,are as follows:

Kind Survey	2008	2009	2010	2011	2012
Renewal Survey	882	878	913	1.028	1.013
Annual Survey	3.576	3.660	3.855	4.409	5.224
Intermediate Survey	579	748	766	831	987
Docking Survey	2.300	2.439	2.525	2.786	3.190
Shaft Propeller Survey	1.155	1.158	1.216	1.226	1.289
Boiler Survey	181	167	180	183	209
Automation Survey	20	17	20	17	18
Continuous Survey	354	284	231	369	378
Class Extension Survey	227	202	6.807	4.346	7.834
Condition Survey	5.484	5.824	320	275	255
New Building Admission Class Survey	258	219	430	695	794
Existing Ship Admission Class Survey	621	735	759	850	995
Re-class Survey	68	123	172	218	320
Total	15.705	16.454	18.195	17.233	22.506

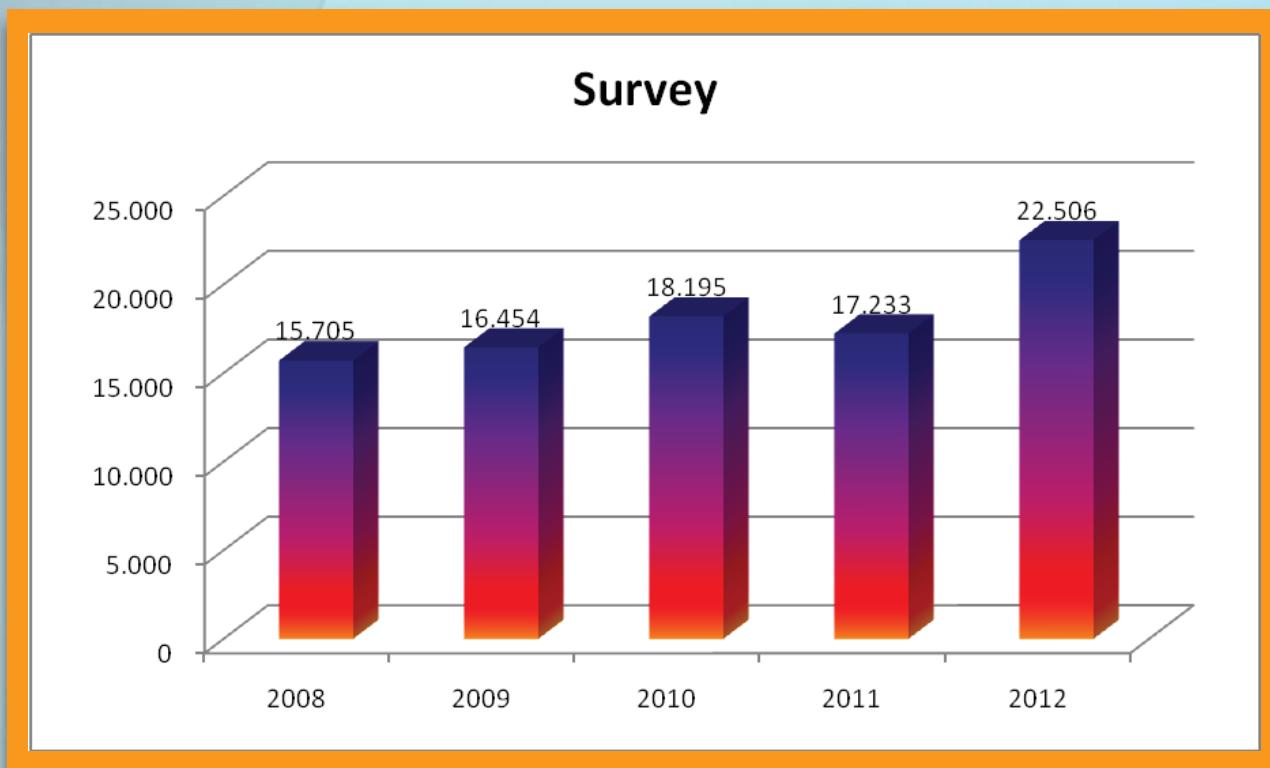


Foto Aktivitas Survey



Aktivitas Jasa Industri

Industrial Services Activities

Sebagai bagian dari survey klasifikasi kapal, BKI melaksanakan pengawasan pada sistem mutu dari perusahaan manufaktur dan jasa yang berhubungan dengan pembangunan kapal. Pengawasan pada sistem mutu tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa produk maupun jasa yang disuplai oleh perusahaan yang terlibat dalam klasifikasi kapal memiliki konsistensi mutu sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan Rules.

Perusahaan yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai pembuat atau pelaksana jasa akan di periksa berdasarkan peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dan peraturan standart mutu. Assessment dilakukan pada Sistem Manajemen Mutu, Standar Mutu, Kontrol Mutu, Rencana Mutu dan Prosedur Kerja yang dirancang oleh perusahaan pemohon. Bila dari hasil assessment dinyatakan bahwa perusahaan pemohon telah mampu untuk mempertahankan mutu secara konsisten sesuai dengan peraturan Biro Klasifikasi Indonesia maka akan diterbitkan Sertifikat Persetujuan.

Untuk mengawasi konsistensi standar mutu perusahaan yang telah mendapatkan Sertifikat Persetujuan, dilakukan pemeriksaan secara periodik pada sistem mutu dan dokumentasi catatan mutu perusahaan.



As a part of the ship classification survey, BKI carried out supervision on quality system of manufacturers and service companies related to ship building. Supervision of the quality system is undertaken to ensure that the products and services supplied by companies involved in the classification of the vessel has the consistency of quality in accordance with the specifications required by Rules.

Companies that have applied to get approval as a service maker or executor will be examined in accordance to BKI rules and quality standard regulation. Assessment carried out in accordance to Quality management System, Quality Standard, Quality Control, Quality Plans and Work Procedures design by the applicant company. When the assessment accepted and the applicant company able to maintain the consistency of the quality in accordance to BKI regulation, then Certificate of Approval will be issued.

To monitor the consistency of quality standards of the approved company, periodical checks on the quality system and documentation of quality records will be conducted.

Survey Statutoria

Statutory Survey

BKI sebagai Badan Klasifikasi telah memenuhi persyaratan teknis dan kriteria sesuai dengan IMO Resolusi A.739(18) dan A.789(19) sebagai Recognized Organization (RO) untuk ditunjuk melaksanakan survey kapal-kapal berbendera Indonesia atas nama Pemerintah Indonesia cq Ditjen Perhubungan Laut.

BKI telah memiliki jumlah safety auditor 71 yang berkualifikasi untuk melaksanakan audit ISM Code dan 80 auditor untuk melaksanakan audit ISPS Code. BKI juga menerbitkan Register ISM Code & ISPS Code yang dipublikasikan melalui media cetak maupun akses melalui website BKI.

As a Classification Society BKI has comply with technical requirements and criteria as a Recognized Organization (RO) according to IMO Resolution A.739 (18) and A.789 (19) to be appointed to carry out surveys Indonesian-flagged vessels on behalf of the Government of Indonesia cq. Directorate General of Sea Transportation.

BKI has had 71 of qualified safety auditors to carry out ISM Code audit and 80 to audit the ISPS Code. BKI has also publishes the Register of ISM Code and ISPS Code, published through print media as well as access via BKI website.

Audit Activity	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. ISM Code – Initial Audit	109	94	185	212	162	241
2. ISM Code – Annual Audit	85	90	84	105	104	95
3. ISM Code – Intermediate Audit	153	66	101	199	165	194
4. ISM Code – Renewal Audit	193	182	183	61	81	159
5. ISM Code – DOC issued	45	37	41	78	42	62
6. ISM Code – SMC Issued	251	342	201	300	203	338
7. ISPS Code – Initial Audit	34	32	107	96	54	60
8. ISPS Code – Intermediate Audit	91	34	14	14	26	53
9. ISPS Code – ISSC issued	41	39	90	88	68	66
10. Load Line	-	-	6.191	6.596	5.530	8494
11. CAS	-	-	9	8	9	6
12. Anti Fouling System	-	-	5	5	6	5
13. Sewage Approval	-	-	2	2	2	2
14. Fire Control	-	-	-	2	2	2
15. IAPP (Marpol Annex VI)	-	-	4	1	1	1
16. ISPP (Marpol Annex II)	-	-	4	4	4	4
17. SMPEP (Marpol Annex II)	-	-	1	1	1	1
18. SOPEP	-	-	-	-	-	2
19. Cargo Gear	-	-	-	-	-	5
TOTAL	1.002	916	7.231	7.772	6.460	9.790



Otorisasi Statutoria

Statutory Authorization

Hingga tahun 2012, otorisasi yang telah dipercayakan kepada BKI dibidang klasifikasi kapal dan statutoria adalah :

- Obligation of Indonesian flagged ships to have classification certificate from BKI.
- Survey Authorization to survey of loadline marks and issue loadline certificates (IPLT & PGMI) for Indonesian flagged ships.
- Survey Authorization and Certification for Container.
- Survey Authorization and Certification of Safety Construction, Marpol Annex I & II and Fitness of Chemical Carrier & Gas Carrier in Bulk for Indonesian flagged ships at a tonnage more than 500 GT.
- Audit Authorization and Certification of ISM Code for Indonesian flagged ships.
- As a Recognized Security Organization (RSO), conducting audit and certification of ISPS Code for Indonesian flagged ships.
- Survey Authorization and Certification of Annex VI Marpol 73/78 for Indonesian flagged ships.
- Survey Authorization and Certification of Condition Assessment Scheme (CAS) in accordance with Annex I Marpol 73/78 for Indonesian flagged ships.
- Statutory Authorization from MMA (Mongolia Maritime Administration)

Sedangkan otorisasi yang telah dipercayakan kepada BKI di bidang minyak & gas, panas bumi, kelistrikan dan ketenagakerjaan adalah :

- Technical Inspection of Feasibility of Combined Facility Certificate from Directorate General of Oil and Gas.
- Technical Inspection of Crane from Directorate General of Oil and Gas.
- Technical Inspection of Pressure Vessel from Directorate General of Oil and Gas.
- Technical Inspection of Pipeline from Directorate General of Oil and Gas.
- Technical Inspection of Platform Construction from Directorate General of Oil and Gas.
- Technical Inspection of Electrical Equipment from Directorate General of Oil and Gas.
- Technical Inspection of Rotating Equipment from Directorate General of Oil and Gas.
- Technical Inspection of Storage Tank from Directorate General of Oil and Gas.
- Inspection and Testing of Crane from Ministry of Manpower and Transmigration.
- Inspection and Testing of Boiler and Pressure Vessel from Ministry of Manpower and Transmigration.
- Inspection and Testing of Electric Equipment from Ministry of Manpower and Transmigration.

Until 2012, the authorization entrusted to BKI for ship classification and statutory are :

- *Obligation of Indonesian flagged ships to have classification certificate from BKI.*
- *Survey Authorization to survey of loadline marks and issue loadline certificates (IPLT & PGMI) for Indonesian flagged ships.*
- *Survey Authorization and Certification for Container.*
- *Survey Authorization and Certification of Safety Construction, Marpol Annex I & II and Fitness of Chemical Carrier & Gas Carrier in Bulk for Indonesian flagged ships at a tonnage more than 500 GT.*
- *Audit Authorization and Certification of ISM Code for Indonesian flagged ships.*
- *As a Recognized Security Organization (RSO), conducting audit and certification of ISPS Code for Indonesian flagged ships.*
- *Survey Authorization and Certification of Annex VI Marpol 73/78 for Indonesian flagged ships.*
- *Survey Authorization and Certification of Condition Assessment Scheme (CAS) in accordance with Annex I Marpol 73/78 for Indonesian flagged ships.*
- *Statutory Authorization from MMA (Mongolia Maritime Administration)*

While the authorization entrusted to the BKI in oil & gas, geothermal, electricity and man power sectors are:

- *Technical Inspection of Feasibility of Combined Facility Certificate from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Crane from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Pressure Vessel from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Pipeline from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Construction Platform from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Electrical Equipment from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Rotating Equipment from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Storage Tanks from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Inspection and Testing of Crane from Ministry of Manpower and Transmigration.*
- *Inspection and Testing of Boiler and Pressure Vessel from Ministry of Manpower and Transmigration.*
- *Inspection and Testing of Electric Equipment from Ministry of Manpower and Transmigration.*



- BKI Laboratory for NDT and DT of material, equipment relating to boiler and pressure vessel from Ministry of Manpower and Transmigration.
- Inspection and Testing of Crane, Pressure Vessel and Boiler onboard ship and at Harbour from Directorate General of Sea Transportation.
- Inspection of Helideck from Directorate General of Air Transportation.
- Sertifikat Verifikasi Tempat Uji Kompetensi Las dari Lembaga Sertifikasi Profesi Las.
- Lembaga Inspeksi Tipe A dari Komite Akreditasi Nasional.
- Laboratorium Pengujian dari Komite Akreditasi Nasional.
- Penunjukan sebagai lembaga inspeksi teknik dalam rangka pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik dari Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.
- Penunjukan sebagai badan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Penunjukan pelaksanaan pengujian, inspeksi teknik dan sertifikasi di lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral dan batu bara dari Kementerian ESDM - Ditjen MinerbaPabum.
- Penunjukan sebagai pelaksana pemeriksaan dan pengujian menara telekomunikasi di wilayah kota Pekanbaru dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

- *BKI Laboratory for NDT and DT of material, equipment relating to boiler and pressure vessel from Ministry of Manpower and Transmigration.*
- *Inspection and Testing of Crane, Boiler and Pressure Vessel onboard ship and at harbour from Directorate General of Sea Transportation.*
- *Inspection of Helideck from Directorate General of Air Transportation.*
- *Test Place of Verification Certificate of Welding Competency from Lembaga Sertifikasi Profesi Las.*
- *Type A Inspection Body of the National Accreditation Committee.*
- *Testing Laboratory of the National Accreditation Committee.*
- *Designation as an inspection technique in order to check the installation and testing of electrical power from the Ministry of Energy and Mineral Resources Directorate General of Electricity and Energy Utilization.*
- The appointment of a safety management system audit bodies and health from the Ministry of Manpower and Transmigration.*
- The appointment of the implementation of the testing, inspection and certification in environmental engineering projects and coal mining industries of the Ministry of ESDM - DG MinerbaPabum.*
- The appointment as the executor of the inspection and testing of telecommunications towers in the area of Pekanbaru from the Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pekanbaru*

Konsultansi & Supervisi Inspeksi & Sertifikasi

Sejalan dengan usaha BKI sebagai perusahaan klasifikasi, BKI juga memberikan jasa inspeksi dan sertifikasi terhadap fasilitas yang berada dalam industri di lingkungan Kementerian Energy and Sumberdaya Mineral yang meliputi sektor minyak dan gas bumi, kelistrikan, energi baru dan terbarukan, dan pertambangan, Kementerian Perhubungan meliputi sektor laut, darat dan udara dan Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya hhusus dibidang minyak dan gas bumi BKI dipercaya untuk melakukan inspeksi dan sertifikasi berbagai proyek / pekerjaan, meliputi inspeksi dan sertifikasi atas nama Ditjen Migas, meliputi SKPP Pressure Vessel, Crane, Rotating Equipment, Electrical Equipment, Pipeline, Storage Tank, SKPI.

Consultancy & Supervision Inspection & Certification

In line with BKI as classification society, BKI also provide inspection and certification services to a variety of industrial sectors. BKI were entrusted by having an authority delegation from government such as from Energy and Mineral Ministry covering Oil and Gas, Electrical, New and renewable energy, and mining sector, from Ministry of transportation covering, Sea transportation, Land transportation and aviation. Furthermore from Oil and Gas Directorate General BKI specifically enable to carry out inspection and certification of various projects such as worthiness certificate of equipment (SKPP) covering Pressure Vessel, Crane, Rotating Equipment, Electrical Equipment, Pipeline, Storage Tank, and Installation worthiness certificate (SKPI)

Sertifikasi BKI

1.	Cementing Test	4
2.	Alat Angkat Angkut	138
3.	Rigging/Lifting Gear	231
4.	Penangkal Petir	3
5.	Gas Emisi	4
6.	Surface Testing	1
7.	PSV (Katup Pengaman)	24
8.	SIO Crane	121
9.	VSD Transport Skid	1
10.	Container Metal Box	0
11.	Pengujian Cathodic Protection	0
12.	Inspeksi Menara Telkom	1
13.	Inspeksi Peralatan WTU	2
14.	Verifikasi Capaian TKDN	0
15.	Inspeksi Tubing Casing (Pipa Bor)	0
16.	Inspeksi Busket (Jaring/Metal(Logam))	10
17.	Inspeksi Welding Machine (Pengelasan Machine)	4
18.	Inspeksi Skid And Spreader Bar (Alat Bantu Angkat Barang)	26
19.	Initial Inspection of Box Crossover Thread	1
20.	Periodical Inspection Of Pressure Gauge/Mooring System	4
21.	Initial Inspection of 8½ ACME Bowen Box	1
22.	Supervisi Repair Tank (Tangki Timbun)	5
23.	Sertifikasi Tangki Transport	22
24.	Sertifikasi Pressure Vessel	0
25.	Sertifikasi Mesin Bor	0
26.	Sertifikasi Pompa, Kompresor & Penggeraknya	0
27.	Jasa Inspeksi Peralatan Kilang	0
28.	Rental Holiday Detector & Operator	0
29.	Welder Qualification	0
30.	Welding Procedure Specification	0
31.	Jetty (Dermaga Kecil) Harus Ada AMDAL	0
32.	Manual System ISM (DOC & SOC)	0
33.	Standard Operating Procedure	0
34.	Jasa Konsultasi ISPS Code	0
Jumlah		603

Sektor Mineral Batu Bara Panas Bumi

1.	Rotating Equipment	2
2.	Electrical Equipment	2
3.	Storage Tank	2
4.	Pressure Safety Valve	2
5.	WPS And Welder Test	0
6.	SKPI	11
7.	Pressure Vessel	6
8.	Crane	42
9.	Pipeline	4
10.	PJIT Rig	0
11.	Pengujian Peralatan Rigging/Lifting Device	0
12.	NDT	3
13.	SIO Crane	1
Jumlah		75

Sektor Migas

1.	SKPI	43
2.	Platform	4
3.	Pressure Vessel	17
4.	Crane	111
5.	Pipeline	5
6.	Rotating Equipment	13
7.	Electrical Equipment	14
8.	Storage Tank	15
9.	Pressure Safety Valve	11
10.	WPS & Welder Test	0
11.	Surat Izin Memasuki Operasi Migas	7
12.	PJIT Rig	0
13.	NDT	0
14.	Rigging	0
15.	SIO Crane	0
	Jumlah	240

Sektor Depnakertrans

1.	NDT	2
2.	Pressure Vessel Dan Boiler	21
3.	Alat Angkat Angkut	110
4.	Pipeline	0
5.	Rotating Equipment	8
6.	Electrical Equipment	18
7.	Storage Tank	3
8.	Pressure Safety Valve	2
9.	WPS & Welder Test	1
10.	NDT	4
11.	Fire System	4
12.	SMK 3	0
13.	SIO Crane	0
	Jumlah	173

Sektor Perhubungan

1.	Helideck	0
2.	Alat Angkat Angkut (SKB)	52
	Jumlah	52



Pengujian & Laboratorium

Di bidang pengujian BKI telah melaksanakan Destructive Test (DT) dan Non Destructive Test (NDT) dengan kegiatan, meliputi Radiography, Ultrasonic Test, Magnetic Particle Inspection, Dye Penetrant, Uji Tarik dan Uji Takik.

Testing & Laboratory

In the BKI has conducted field testing Destructive Test (DT) and Non Destructive Test (NDT) with activities, including Radiography, Ultrasonic Test, Magnetic Particle Inspection, Dye Penetrant, Tensile Test and Test notch.

PENGUJIAN & LABORATORIUM

Testing & Laboratory

1	Wire Rope Test	26
2	Gas Free Test	5
3	Vibration Sound Test	3
4	Holiday Detector Test	0
5	Crack Depth Test	16
6	Dye Penetrant Test	256
7	Magnetic Particle Test	156
8	Ultrasonic Test	1365
9	Radiography Test	441
10	Tensile Test	59
11	Bend Test	28
12	Hardness Test	15
13	Macro Test	3
14	Impact Test	15
15	Chemical Composition Analyst	31
16	NDT (MPI)	404
17	NDT (DPT)	72
18	Load Test	233
19	Hydrotest	83
20	Merger Test	504
21	DT	0
	Jumlah	3715



Rekayasa Teknik

Untuk kegiatan rekayasa teknik, BKI melakukan perhitungan teknik dan desain appraisal. Proyek yang ditangani adalah :

Engineering Design

For engineering design, BKI performs engineering calculations and design Appraisal. Projects handled are:

No.	Rekayasa Teknik	Volume Kegiatan
1	Design Appraisal And Supervision Mooring System	3
2	Design Appraisal And Supervision Platform	1
3	Ship Design	2
4	Consultant RKS & Rab QC Crane	0
	Jumlah	6

Inspeksi & Supervisi Maritim

Untuk kegiatan inspeksi dan supervisi marine, BKI telah menangani Survey Kondisi (pemeriksaan propeler, inventarisasi sistem perawatan kapal, evaluasi hasil pekerjaan perbaikan kapal), Perhitungan stabilitas & trim kapal, Megger Test, Bollard Pull Test, Vibration & Noise Level Test, Kalibrasi tangki, On/Off Hire Survey, Pembuatan gambar teknik, Penyusunan Hatch Cover Plan, Penyusunan Cargo Securing Manual dan Penyusunan Manual ISM Code.

Marine Inspection & Supervision

In maritime inspection and supervision activities, BKI has handled Condition Survey (propeller inspection, an inventory of ship maintenance system, ship repair evaluation results), trim & stability calculation , Megger Test, Bollard Pull Test, Vibration & Noise Level Test, calibration tank, On / Off Hire Survey, technical drawings, Hatch Cover Plan, Cargo Securing Manual and ISM Code Manual.

Inspeksi Konsultansi & Supervisi Marine

Consultancy & Supervision Marine Inspeksi

1	New Building Supervision	13
2	Ship Repair And Modification Supervision	12
3	Ship Condition Survey	380
4	Insurance Survey	20
5	On And Off Hire Survey	2
6	Tank Calibration Survey	170
7	Towing And Lashing Survey	12
8	Stability Calculation	298
9	Floating Object Inspection	1
10	Draught Survey	7
11	Feasibility Study In Marine Industry	5
12	Environment Study	0
13	Inspection And Consultancy Of Land Transportation	1
14	Modification Ship Drawing	135
15	Technical Audit Of Ship Performance	3
16	Insulation Resistance Measurement/Megger Test	400
17	Noise Level Measurement	9
18	Vibration Measurement	2
19	Phase Sequence Measurement	0
20	Speed/RPM Measurement	1
21	Bollard Pull Test Pengujian Penambat Kapal/Pengikat Kapal	4
22	Towing Tank (Tempat Pengujian Kapal)	11
23	Kalibrasi Tangki Muat Kapal (Isi Muatan Tangkinya)	22
24	Ship Speed Trial (Kapal Cepat)	0
25	Ship Particulars (Pendataan Khusus Kapal)	0
	Jumlah	1508



BKI dalam setiap tahunnya juga menyelenggarakan pelatihan teknik, baik dalam bentuk inhouse training maupun public training, di antaranya :

BKI also routinely organizes technical training, both in-house training and public training. The training are :

Pendidikan Dan Pelatihan Education and Training

1.	Welding Inspector	5
2.	Marine Surveyor	7
3.	Crane Operator	5
4.	Planned Maintenance System	0
5.	Internal Auditor ISM-Code	10
6.	Radiography Operator	1
7.	Ship Automation Survey	0
8.	Draught Survey	0
9.	On And Off Hire Survey	0
10.	Damage And Repair Survey	0
11.	Industrial And Marine Stagging	1
12.	Ship Security Officer	0
13.	Towing And Lashing	0
14.	Ship Condition	1
15.	Rigging And Signalman	0
16.	Company Security Officer (ISPS-Code)	24
17.	ISPS PFSO	1
18.	ISPS CSO	0
19.	IMDG Code	0
20.	Designated Person Ashore	0
21.	SMK3 / HSE	0
	Jumlah	55



Pengembangan Sumber Daya Manusia

BKI sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa klasifikasi menempatkan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten pada posisi terdepan dalam upaya menghadapi dan memenangkan persaingan bisnis dengan para perusahaan kompetitor serta dalam upaya meningkatkan kepercayaan stakeholder atau kualitas pelayanan prima BKI. Prestasi kinerja usaha perusahaan yang telah dicapai dalam tahun 2012 tidak terlepas dari profesionalisme dan peningkatan kompetensi SDM yang dihasilkan dari pola pembinaan dan pengembangan SDM yang dilakukan secara terarah dan terpadu, sehingga prestasi kinerja usaha yang dicapai dalam tahun 2012 ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan produktifitas, sehingga Man Power Productivity (MPP) menjadi Rp 680 juta per personil. SDM yang dimiliki BKI hingga posisi 31 Desember 2012 berjumlah 744 orang.

Mengingat aset pokok yang dimiliki oleh BKI adalah sumber daya manusia, maka BKI menyadari sepenuhnya dan berkomitmen untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas serta kompetensi SDM yang dimiliki melalui program diklat terpadu, dan khusus training bagi surveyor program diklat telah dibuat secara terpadu sesuai dengan ketentuan IACS-QSCS. Kompetensi yang dimiliki oleh personil teknik BKI sampai dengan Desember 2012 adalah :



Human Resources Development

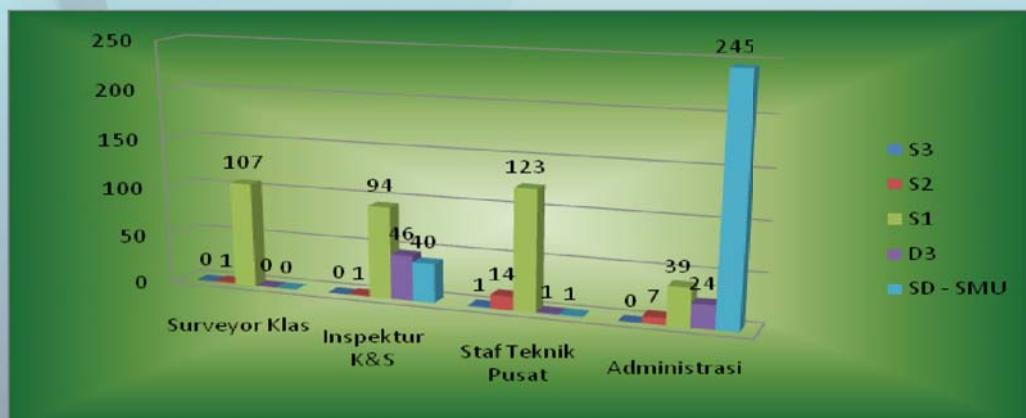
BKI as a company which is engaged in the services classification puts human resources that are reliable and competent in the forefront of efforts to face the competition and win business with the company's competitors and stakeholders in an effort to boost confidence or BKI excellent service quality. Achievements of the company's business performance has been achieved in 2012 can not be separated from the professionalism and competency improvement of human resources resulting from patterns of human resource training and development carried out as directed and integrated, so that the achievement of business performance is achieved in 2011 is indicated by the increase in productivity, so that Man Power Productivity (MPP) is IDR 680 million per personnel. BKI human resources held the position until December 31, 2012 amounted to 744 people.

Given the main asset owned by BKI is human resources, BKI fully aware and committed to continually maintaining and improving the quality and competence of human resources through integrated education and training program, and specialized training for surveyor and training program was created in an integrated manner in accordance with the provisions of IACS-QSCS. Competencies possessed by BKI technical personnel up to December 2012 were:



URAIAN	JUMLAH
Bidang Klasifikasi	
1. Principal Surveyor (Class)	16
2. Senior Surveyor (Class)	74
3. Surveyor (Class)	75
4. Assistant Surveyor	66
Bidang Konsultansi & Supervisi	
1. Radiography Expert Level I	26
2. Radiography Expert Level II	8
3. NDT Level I	27
4. NDT Level II	69
5. Welding Inspector	198
6. Welding Inspector – AWS	4
7. Welding Engineering	2
8. AK3 Umum	2
9. Crane Inspector (Depnaker)	79
10. Crane Inspector (Migas)	83
11. Pipeline Inspector	31
12. Casing & Tubing Inspector	24
13. Tank Storage Inspector	60
14. Radiation Protection Officer	4
15. Offshore Pipeline Inspector	5
16. Cathodic / Corrosion Inspector	24
17. Sea Survival	56
18. Pembinaan Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Katup Pengaman	16
19. HUET	48
20. Pressure Vessel Safety	68
Bidang Sertifikasi	
1. Safety Auditor	77
2. Quality Auditor	104
3. ISPS Code	81
Sistem Informasi	78
Akuntan	41

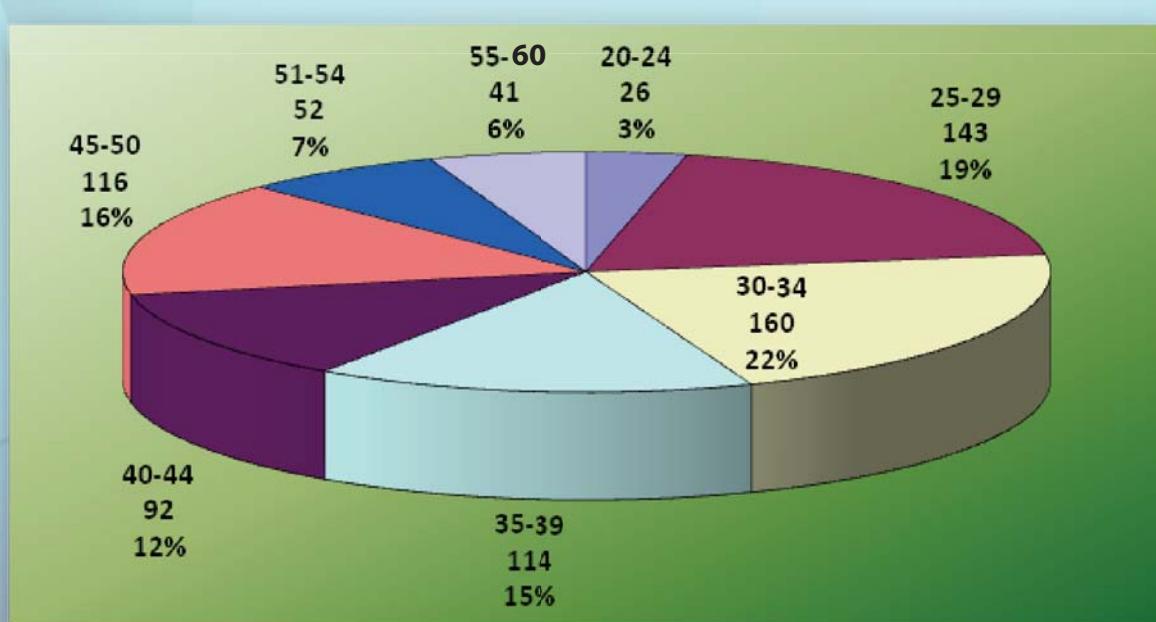
Realisasi Turn Over SDM Sesuai Pendidikan Tahun 2012



Posisi Tenaga Teknik tahun 2012



Posisi SDM sesuai Usia



Teknologi Informasi

Information Technology



Dalam meningkatkan pelayanan jasanya, BKI telah menyempurnakan sistem pelaporan survey secara on-line dari aplikasi sebelumnya yaitu aplikasi 'Terpadu' menjadi aplikasi "Classification and Statutory Reporting System" (CSRs). Penyempurnaan yang telah dilakukan antara lain lebih fleksibel sesuai kebutuhan surveyor, lampiran dari laporan survey sudah diintegrasikan, aplikasi lebih user friendly (What You See Is What You Get), update form laporan survey lebih mudah dan seragam, update versi secara otomatis di masing-masing laptop surveyor dsb. Dengan aplikasi ini diharapkan terjadi percepatan pembuatan laporan survey termasuk pengiriman ke Kantor Pusat secara on-line. Dengan demikian, Kantor Pusat dapat segera memproses laporan survey tersebut tanpa harus menunggu hard copy dari surveyor lapangan.

In improving of services, BKI has modified a reporting system in on-line basis from previous application called "TERPADU" into new application called "Classification and Statutory Reporting System" (CSRs). Improvements that have been taken such as more flexible according to the needs of surveyors, the attachment of the survey report has been integrated, the application more user friendly (What You See Is What You Get), easy to update the survey report and uniformly, update version automatically to each surveyor's laptop etc. With this application ,able to accelerate the process of preparing survey report including submit to Head Office in on-line basis. Thus, the Head Office could process the survey report promptly without waiting for a hard copy from the field surveyors.

Tanggung-jawab Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya". Lebih lanjut, pasal 74 undang-undang yang sama menjadi dasar bagi BKI dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau dalam tataran global disebut sebagai Corporate Social Responsibility ("CSR").

Social Responsibility

Constitution of the Republic of Indonesia No.40 of 2007 regarding to Limited Liability Company in article 1, paragraph 3 state that "Social and Environmental Responsibility is the commitment of the Company to participate in the sustainable economic development to improve the quality of life and environmental benefits the Company itself, local communities, and society in general". Furthermore, Article 74 of the same constitution become the basis for BKI in carrying out the social and environment responsibility or in the global level, it is referred to as Corporate Social Responsibility ("CSR")



Penyampaian laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 66 (2c) undang-undang yang sama yang menyatakan bahwa laporan tahunan harus memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Sebagai salah satu BUMN, BKI berkewajiban melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL"), yang pada hakikatnya mempunyai tujuan serupa dengan CSR. Dalam pelaksanaannya, bentuk-bentuk kegiatan dalam PKBL mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-05/MBU/27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan PKBL berasal dari penyisihan laba Perusahaan bagian pemerintah. Penggunaan dana kegiatan PKBL untuk tahun 2012 berjumlah Rp 4.395.000.000,- untuk tahun 2012, pembiayaan pelaksanaan program tanggung jawab sosial Perusahaan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 berasal dari anggaran Perusahaan.

Dana PKBL digunakan untuk kegiatan Program Kemitraan yang meliputi penyaluran pinjaman bergulir dan kegiatan lain untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan bina lingkungan atau pengembangan masyarakat meliputi bantuan penyediaan sarana dan prasarana, bantuan bencana alam dan bantuan lain untuk masyarakat. Sama halnya dengan bina lingkungan, dana CSR digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta bantuan lainnya untuk masyarakat dan program pelestarian lingkungan hidup.

The submission of reports on the social and environmental responsibility in this annual report is the implementation of the provisions of article 66(2c) of the same constitution which states that the annual report must include a report on the implementation of social and environmental responsibility.

As one of state owned companies, BKI shall implement the Partnership and Community Development Program ("PKBL"), which has substantially similar objectives with CSR. In practice, the forms of CSR activities within the state refers to the Minister No.PER-05/MBU/27 April 2007 on the BUMN Partnership Program with the Small Business and Environmental Assistance Program.

Sources of funding to implement CSR activities from the government allowance for the Company's profit part. The use of funds for CSR activities in 2012 is amounted to Rp. 4.395 billion, - for the year 2012, the financing of the Company's social responsibility program as mandated by Article 74 of Act 40 of 2007 come from the company budget.

PKBL Partnership funds are used for activities which include the Partnership Program revolving lending and other activities for the economic empowerment of the community. Community development activities or community development including the provision of facilities and infrastructure assistance, disaster relief and other assistance to the community. Similarly, with the environmental development, CSR funds are used to finance the construction of infrastructure and other assistance to communities and environmental conservation programs.

Secara keseluruhan, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2012, mencakup program pelestarian lingkungan terutama yang terkait dengan program kemitraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana untuk masyarakat, dan program bantuan bencana alam dan bantuan masyarakat.

Jumlah realisasi dana Program Kemitraan yang terertribusi pada tahun 2012 adalah sebesar Rp.2.350.000.000,- yang telah disalurkan kepada 5 (lima) wilayah binaan sebagai berikut :

Overall, the activities of social and environmental responsibility which are carried out throughout 2012, including environmental programs, especially related to economic empowerment programs and community partnerships, the development of infrastructure for the community, and disaster assistance programs and help the community.

Number of realization for Partnership Program funds retributed in 2012 is totally amounted Rp.2.350.000.000,- which has been distributed to five (5) target area as follows:

No.	Daerah	Anggaran 2012	Realisasi 2012
1.	DKI Jakarta	665.000.000,-	660.000.000,-
2.	Daerah Istimewa Yogyakarta	300.000.000,-	330.000.000,-
3.	Jawa Timur	250.000.000,-	300.000.000,-
4.	Jawa Barat	250.000.000,-	635.000.000,-
5.	Tawa Tengah	300.000.000,-	375.000.000,-
6.	Dana Pembinaan	0,-	50.000.000,-
	Jumlah,	1.765.000.000,-	2.350.000.000,-

*Jumlah realisasi dana Program Bina Lingkungan yang terertribusi pada tahun 2012 adalah sebesar **Rp.2. 045.000.000** yang telah disalurkan diseluruh wilayah Indonesia sebagai berikut :*

No.	Uraian	Realisasi 2012
1.	Bantuan BUMN Peduli	410.000.000,-
2.	Bantuan Bencana Alam	17.000.000,-
3.	Bantuan Pendidikan dan Pelatihan	199.000.000,-
4.	Bantuan Peningkatan Kesehatan	29.000.000,-
5.	Bantuan Prasarana dan Sarana Umum	200.000.000,-
6.	Bantuan Sarana Ibadah	312.000.000,-
7.	Bantuan Pelestarian Alam	68.000.000,-
8.	Biaya Operasional lainnya	81.000.000,-
	Jumlah,	2.045.000.000,-

PEMBINAAN MITRA BINAAN PKBL PT. BKI (PERSERO)



Penyaluran dana Bina Lingkungan pada Taman Kanak-Kanak Islam Ummul Qura Jakarta Selatan bulan Maret Tahun 2012.



Bantuan Bina Lingkungan Masjid di Boyolali Jawa Tengah bersama pejabat Kementerian BUMN yaitu dihadiri oleh Kepala Divisi Keuangan BKI Sdr. Herman Yuska, SE. MM dan Bagya Mulyanto Kabid Jasa Ic Kementerian BUMN pada bulan April tahun 2012.



Bantuan Bina Lingkungan pada Masjid Al-Barokah di Boyolali Jawa Tengah disertai dengan peresmian penggunaan Masjid yang ditandatangani oleh Sdr. Herman Yuska Kepala Divisi Keuangan PT. BKI (Persero) dan Bupati Boyolali, Bp. Drs. Seno Samodro

Help Community Development at Masjid Al-Barokah in Central Java Boyolali accompanied with the inauguration of the use of the mosque which was signed by Mr.. Herman Yuska Finance Division Head PT. BKI (Persero) and Regent Boyolali, Bp. Drs. Seno Samodro.

Sejuta Pohon untuk Indonesia (One Billion Indonesia Trees - "OBIT")



Sebagaimana tertuang dalam komitmen Manajemen pada tanggal 20 Maret 2012 yang lalu, yang menyatakan bahwa BKI sebagai BUMN mendukung penuh Program OBIT sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26% pada tahun 2020 mendatang yang dipertegas oleh Kementerian BUMN untuk membangun dan mengembangkan 2 juta hektar hutan rakyat di Pulau Jawa hingga 2014.

Pada tahun 2012, BKI berhasil melakukan penanaman sebanyak 1.500 pohon dari rencana penanaman sebanyak 1.000 pohon atau pencapaian 150%

PROGRAM PELESTARIAN LINGKUNGAN LAINNYA

Komitmen Kami untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dilaksanakan melalui berbagai program, baik di lingkungan internal maupun di lingkungan masyarakat. Dampak lingkungan yang timbul akibat operasional Perusahaan harus ditekan serendah mungkin dan BKI bertanggung jawab atas dampak tersebut.

Oleh sebab itu, praktik ramah lingkungan harus dilaksanakan di setiap kegiatan operasi Perusahaan. Hal ini dijalankan bukan saja dalam rangka mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan, tetapi lebih jauh dari itu, untuk mengikuti etika, norma, dan standar yang berlaku secara universal terutama dalam mengatasi perubahan iklim.

Terkait dengan itu, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, BKI memiliki komitmen yang tinggi untuk ikut serta mengatasi perubahan iklim melalui berbagai program ramah lingkungan.

Perusahaan pada tahun 2012 telah menyalurkan pinjaman dana sebesar Rp 4.345 juta untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dana tersebut berasal dari penyisihan laba, sebagaimana telah disebutkan dalam keputusan RUPS dan dari pengembalian pinjaman.

Tujuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah mengembangkan dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan menjaga tata hubungan yang mendorong tumbuhnya kondisi saling menunjang antara BUMN, koperasi dan swasta khususnya pengusaha kecil dan koperasi serta mendorong koperasi dan usaha kecil sebagai lembaga ekonomi rakyat yang mampu melaksanakan, meningkatkan dan mengembangkan usahanya secara lebih efektif dan efisien serta dapat memberi nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi para anggotanya maupun masyarakat di sekitar.

Adapun sasarannya adalah terciptanya kesempatan usaha dan lapangan kerja yang lebih luas bagi usaha kecil dan koperasi sampai ke masyarakat pedesaan, serta terselenggaranya sistem manajemen yang lebih rasional dan efisien yang diikuti dengan peningkatan kemampuan baik permodalan, personil, administrasi, keuangan maupun kemandirian wirausaha. Prioritas pembinaan tahun 2011 kepada usaha kecil baik perorangan maupun badan dan Koperasi (KUD) terutama KUD calon mandiri.

Jumlah realisasi dana yang terdistribusi pada tahun 2011 sebesar Rp 1.555 juta yang disalurkan kepada 5 wilayah binaan, yaitu :

Wilayah	Anggaran (Juta Rp)	Realisasi (Juta Rp)
DKI Jakarta	665	660
DI Yogyakarta	300	330
Jawa Timur	250	300
Jawa Barat	250	635
Jawa Tengah	300	375
Jumlah	1.765	2.300

In 2012, the company has granted fund loans amounting to IDR 4,345 million for the Partnership and Community Development Program. The funding comes from retain profit, as already mentioned in the decision of the RUPS and loan repayment.

The purpose of the Partnership and Community Development Program is to develop and create a healthy business climate and keep shaping the conditions that encourage mutual support between the BUMN, cooperatives and the private entrepreneurs ,especialy small entrepreneurs and to encourage cooperatives and small businesses as people's economic institutions capable of implementing, improving and develop their business more effectively and efficiently and can provide added value and greater benefits for its members and the community around.

The goal is the creation of business opportunities and greater job opportunities for small businesses and cooperatives to rural communities, as well as the implementation of the management system more rational and efficient, followed by an increase in both the ability of capital, personnel, administrative, financial and entrepreneurial independence. Development priority in 2011 to both individuals and small business entities and cooperatives (KUD), especially KUD independent candidate.

The disbursed amount of funds distributed in 2011 is IDR 1.555 million which is distributed to the five target areas, namely:

Tata Kelola Perusahaan

Konsep penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) dalam organisasi Perusahaan berlandaskan pada komitmen untuk menciptakan Perusahaan yang transparan, dapat dipertanggung jawabkan (accountable), dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penerapan praktik-praktik GCG merupakan salah satu langkah penting bagi BKI untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai Perusahaan (corporate value), mendorong pengelolaan Perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, mitra bisnis, serta pemangku kepentingan.

Mengingat pentingnya GCG maka telah dilakukan bentuk penguatan komitmen manajemen seluruh komisaris dan Direksi menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi BKI untuk memprioritaskan penerapan GCG.

Komitmen Kami untuk menerapkan instrumen GCG tidak hanya untuk mematuhi peraturan yang berlaku di pasar modal namun diyakini sebagai kunci sukses dalam upaya pencapaian kinerja usaha yang efektif, efisien serta berkelanjutan yang sangat diperlukan dalam memenangi persaingan pasar.

Tahun 2012 merupakan tahun penguatan penerapan GCG di seluruh Unit kerja dan Unit Produksi. Menyikapi transformasi organisasi menuju portfolio bisnis, maka Perusahaan memandang perlu untuk meningkatkan kualitas praktik GCG yang telah ada untuk dikuatkan lagi dalam sebuah komitmen GCG yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi BKI. Penguatan GCG dalam hal ini dimaksudkan agar penerapan GCG senantiasa melekat dan selaras dengan tuntutan bisnis dan kondisi industri saat ini.

Melalui Corporate Secretary penguatan GCG BKI dibangun sekaligus terus menerus memperbaiki praktik GCG yang telah ada menuju diterapkannya pengelolaan Perusahaan yang beretika (GCG as ethics) dan menjadikan GCG sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari mengelola Perusahaan (GCG as knowledge) serta terintegrasinya pengelolaan GCG dan manajemen risiko Perusahaan.

Selain itu, sebagai Perusahaan publik yang patuh pada peraturan, BKI menerapkan dan menjunjung tinggi kebijakan serta nilai-nilai yang terkandung dalam praktik tata kelola Perusahaan yang penerapannya mengacu pada international best practices serta Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Indonesia ("Indonesia Code of GCG") yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) di Indonesia.

Corporate Governance

The application concept of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the organization of the Company is based on the Company's commitment to create a transparent, accountable, and reliable through business management that can be justified.

Implementation of good corporate governance practices is one of important steps for BKI to increase and maximize the value of the Company (corporate value), encourage the management of the Company's professional, transparent and efficient by increasing the principles of openness, accountability, trustworthy, responsible and fair so as to meet obligation either to the Shareholders, the Board of Commissioners, business partners, and stakeholders.

Given, the importance of good corporate governance has been made the strengthening of management commitment form of all BKI's Commissioners and Directors demonstrating the seriousness to prioritize the implementation of GCG.

Our commitment to implement GCG instrument is not only to comply with the regulations of the capital market, but it is believed to be the key to success in achieving business performance that is effective, efficient and sustainable indispensable in winning market competition.

The year 2012 is a year of strengthening the implementation of good corporate governance throughout the unit of work and Production Units. Addressing the organizational transformation towards business portfolio, the Company deems it necessary to improve the quality of good corporate governance practices that have been around for a strengthened again in a GCG commitment signed by BKI Board. Strengthening good corporate governance in this case is meant that GCG always attache and align with the demands of the business and current industry conditions.

Through the strengthening of the good corporate governance Corporate Secretary, BKI is built at the same time continuously improving the good corporate governance practices applied to the ethical management of the Company (GCG as ethics) and made GCG as an integral part in its daily lives to manage the Company (GCG as knowledge) and its integration of the management of the Company's good corporate governance and risk management.

In addition, as a public company which obey the rules, BKI apply and uphold the policies and values contained in the Company's corporate governance practices which their application based on the international best practices as well as the Indonesia Good Corporate Governance Guidelines issued by the National Committee on Governance (KNKG) in Indonesia.

Sejauh ini BKI telah berkomitmen untuk melakukan kajian dan audit menyeluruh untuk menjamin rancangan yang efektif dan terintegrasi dalam laporan keuangan Perusahaan yang menghendaki tanggung jawab dari pihak manajemen BKI terhadap pembuatan, pemeliharaan dan pengevaluasian terhadap efektivitas prosedur dan pengendalian pengungkapan untuk memastikan kesesuaian informasi yang diungkapkan dalam laporan dengan Exchange Act dan telah dicatat, diproses, dirangkum dan dilaporkan dalam periode waktu yang tersedia untuk kemudian diakumulasikan dan dikomunikasikan kepada manajemen Perusahaan, termasuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan & SDM, untuk kepentingan pengambilan keputusan terkait dengan pengungkapan yang diperlukan. BKI juga mematuhi dan tunduk terhadap ketentuan yang berlaku mengenai independensi anggota Komite Audit.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik memberikan manfaat besar bagi kinerja Perusahaan secara keseluruhan. Tata kelola perusahaan yang baik juga menjadi sarana perusahaan dalam mengembangkan asset dan akuntabilitas kepada para stakeholder. Pada saat laporan ini disusun sedang dalam proses assesment oleh Assesor Independen.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organisasi perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS berhak memperoleh seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan dan meminta pertanggungjawaban Komisaris dan Direksi yang berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan. Pada tahun 2012, Perusahaan telah mengadakan RUPS pertanggungjawaban Laporan Manajemen tahun 2011 pada tanggal 26 April 2012 di Jakarta dan RUPS Pengesahan RKAP 2013 pada tanggal 4 Januari 2013 di Jakarta.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan masukan kepada Direksi demi kepentingan Perusahaan, Pemegang Saham serta pihak yang berkepentingan pada umumnya. Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan agar Direksi dalam kondisi apapun mempunyai kemampuan menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris secara teratur memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi agar selalu sesuai dengan tujuan perusahaan, arahan Pemegang Saham dan anggaran Dasar Perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris selalu mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dapat menggunakan saran profesional yang mandiri dan atau membentuk Komite-komite bila diperlukan.

So far BKI has committed to conduct a thorough review and audit to ensure that the design of effective and integrated in the financial reports of the Company who want the responsibility of the management of BKI towards making, maintaining and evaluating the effectiveness of the procedures, and the disclosure controls to ensure the suitability of the information disclosed in the report with the Exchange Act and its have been recorded, processed, summarized and reported within the time periods available to then accumulated and communicated to the Company's management, including President Director and Director of Finance & Human Resources, for the sake of decision making related to disclosures. BKI also comply with and be subject to the applicable provisions regarding the independence of the Audit Committee.

The Implementation of the good corporate governance contribute the benefit of the Company's overall performance. Good corporate governance is also a means to develop the company's assets and akuntabilitas to stakeholders. At the time, this report is compiled in the process of assessment by an independent assessor.

General Meeting of Shareholders (RUPS)

General Meeting of Shareholders (GMS) of the company is the organ that holds the ultimate power in the company and holds all the authority is not submitted to the Board of Directors or Board of Commissioners. GMS is entitled to all relevant information about the company and ask for accountability of Commissioners and the Board of Directors relating to the Company's management. In 2012, the Company has entered into GMS Management accountability report in 2011 on April 26, 2012 in Jakarta and GMS 2013 on the Ratification of CBP on January 4, 2013 in Jakarta.

Board of Commissioners

Board of Commissioners is responsible to oversee and advise the Board of Directors in the interest of the Company, Shareholders and interested parties in general. Board of Commissioners is responsible to ensure that Board of Directors in any circumstances has the ability to carry out their duties. Board of Commissioners regularly monitor the effectiveness of policy implementation and decision-making process conducted by the Board of Directors to comply with company goals, and Shareholders directions.

Susunan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-155/MBU/2009 tanggal 28 Juli 2009 dan Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS no. SK-132/MBU/2012 tanggal 7 Maret 2012, adalah sebagai berikut :

Susunan Dewan Komisaris berdasarkan

Keputusan Menteri BUMN No. SK-322/MBU/2012. tanggal 11 September 2012 adalah sebagai berikut :

1. Komisaris Utama : Machfud Sidik
2. Komisaris : Minto Widodo
3. Komisaris : Faisal Halimi
4. Komisaris : Erwin Rosmali
5. Sekretaris Dekom : Merlantie

Board of Commissioners based on Ministerial Decree No. KEP-155/MBU/2009 dated July 28, 2009 and a decision outside the GMS of Shareholders no. SK-132/MBU/2012 dated March 7, 2012, are as follows:

Board of Commissioners based on Ministerial

Decree No. SOE. SK-322/MBU/2012. September 11, 2012 is as follows:

1. *Chairman* : *Machfud Sidik*
2. *Commissioner* : *Minto Widodo*
3. *Commissioner* : *Faisal Halimi*
4. *Commissioner* : *Erwin Rosmali*
5. *Secretary,Commissioner* : *Merlantie*

Profil Dewan Komisaris

1. **Machfud Sidik**

Tanggal Lahir : Jombang, 18 Agustus 1946
Pendidikan : S1 FEUI (1981), S2 Carnegie Mellon University (1985), S3 UGM (1998)
Pengalaman : Konsultan Pajak Dr. Machfud Sidik & Partner

2. **Minto Widodo**

Tanggal Lahir : Semarang, 11 April 1952
Pendidikan : S1 Ekonomi UGM (1981), Master of Art Economics dari Colorado State University USA (1989)
Pengalaman : Kementerian Keuangan (1981), Sekretaris Bapeksta Keuangan (1996), Kepala Pusat Sistem Informasi Keuangan Daerah (1996 - 2004).

3. **Faisal Halimi**

Tanggal Lahir : L. Inong, 6 April 1969
Pendidikan : IIP Jakarta (1996)
Pengalaman : Komisaris PT. Terminal Petikemas Surabaya (2011 - 2012), Komisaris PT. Biro Klasifikasi Indonesia (2012 - sekarang)

4. **Erwin Rosmali**

Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Juli 1955
Pendidikan : Akademi Ilmu Pelayaran
Pengalaman : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Komisaris PT. BKI (Persero) Oktober 2012 - sekarang.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, dimana 8 (delapan) diantaranya dilakukan bersama Direksi, 1 bersama Direktur Utama, 1 bersama KAP Kanaka Puradiredja Suhartono serta 15 (lima belas) rapat internal Dewan Komisaris. Rapat dilakukan dalam rangka pembahasan perencanaan perusahaan, evaluasi kinerja perusahaan, kegiatan pengawasan dan pembahasan kegiatan korporasi lainnya. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dinamika rapat. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melakukan monitoring dan evaluasi Cabang Singapura pada bulan Februari 2012, Cabang Utama Surabaya pada bulan Juni 2012, Cabang Pontianak dan Makassar pada bulan Juli 2012. Di samping itu, Dewan Komisaris menghadiri kegiatan internal yang dilakukan oleh korporasi seperti seminar teknik di Hotel Borobudur pada tanggal 27 Juni 2012, yang diselenggarakan dalam rangkaian acara HUT BKI ke-48, Rapat Kerja dan TOMSI tanggal 24-28 September 2012 di Bali dan acara Launching Tim Kajian Bersama Pembahasan Kewajiban Klasifikasi Kapal tanggal 15 Oktober 2012.
2. Memberikan tanggapan, pendapat dan saran kepada Pemegang Saham atas kinerja perusahaan dan kinerja Direksi, kegiatan pengawasan Dewan Komisaris dan hal lain yang dimintakan pendapat oleh Pemegang Saham. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dimaksud, maka Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan penilaian atas kinerja Direksi kepada Pemegang Saham. Berdasarkan arahan Pemegang Saham atas laporan penilaian kinerja dimaksud, maka Dewan Komisaris telah meminta bantuan tenaga ahli/pihak independen untuk melaksanakan pekerjaan jasa untuk evaluasi penerapan governance Direksi tahun 2011 dalam implementasi GCG pada bulan Maret 2012. Berdasarkan penilaian / evaluasi Dewan Komisaris dan memperhatikan laporan tenaga ahli atas evaluasi penerapan governance Direksi tahun 2011 dimaksud, maka sesuai kewenangan Dewan Komisaris berdasarkan anggaran dasar perusahaan, maka Dewan Komisaris telah memberhentikan sementara Direktur Utama (Sdr. Captain Purnama) dan Direktur Operasi dan Pemasaran (Sdr. Setuju Dankeng) pada tanggal 27 April 2012 melalui SK Dekom Nomor: KU.002/Dekom.101/IV/2012 tanggal 27 April 2012.

Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

1. *The Board of Commissioners has conducted a meeting by 25 (twenty five) times, where 8 (eight) were performed with the Board of Directors, 1 joint Managing Director, 1 along Kanaka Puradiredja Suhartono and 15 (fifteen) BOC internal meetings. Meetings conducted in the framework of the discussion of corporate planning, corporate performance evaluation, monitoring activities and discussion of other corporate activities. Meeting outcomes outlined in the minutes of meetings and documented in accordance meeting dynamics. To supervise the management policies, the maintenance of the course by the Board of Directors, including the supervision of the implementation of the Annual Work Plan and Budget by the Articles of Association, the GMS decision, as well as the laws and regulations in force, including monitoring and evaluation branch of Singapore in February 2012, Main Branch Surabaya in June 2012, Pontianak and Makassar Branch in July 2012. In addition, the Board of Commissioners to attend internal activities undertaken by corporations such as engineering seminar at Hotel Borobudur on June 27, 2012, which was held in a series of events BKI 48th anniversary, and Tomsi Working Meeting on 24 to 28 September 2012 in Bali and events launching the Joint study Team Discussion Liability Ship Classification dated October 15, 2012.*
2. *Provide feedback, opinions and suggestions to the Shareholders on the company's performance and the performance of the Board of Directors, the Board of Commissioners oversight activities and anything else that is requested by the Shareholder opinion. In the exercise of supervisory functions over the course of policy administration and management of the Company by the Board of Directors referred to, the Board of Commissioners has submitted a valuation report on the performance of the Board of Directors to the Shareholders. Shareholders under the direction of performance appraisal report referred to above, the Board of Commissioners has requested the assistance of experts / independent party to carry out the evaluation of the application of governance services to the Board of Directors in 2011 in GCG implementation in March 2012. Based on the assessment / evaluation of the Board of Commissioners and pay attention to the report on the evaluation of the application of expert governance referred to the Board of Directors in 2011, then the appropriate authority of the Board of Commissioners by the articles of association, the Board of Commissioners has temporarily Managing Director (Mr. Captain Purnama) and Director of Operations and Marketing (Bro. Setuju Dankeng) on April 27, 2012 through Decree No. Dekom: KU.002/Dekom.101/IV/2012 dated 27 April 2012.*

Keputusan pemberhentian sementara dimaksud kemudian ditindaklanjuti Pemegang Saham dengan pemberhentian semua jajaran Direksi dan mengangkat Direktur Utama yang baru berdasarkan Keputusan Pemegang Saham No. 203/MBU/2012 tanggal 25 Mei 2012 serta pengangkatan 2 orang Direktur berdasarkan Keputusan Pemegang Saham No. SK-284/MBU/2012 tanggal 3 Agustus 2012. Dewan Komisaris juga mengusulkan penetapan KAP sebagai pelaksana audit atas Laporan Keuangan dan Laporan PKBL tahun buku 2012 sesuai hasil seleksi pengadaan KAP yang dilaksanakan.

3. Memberikan tanggapan, pendapat dan arahan atas hal-hal yang bersifat strategis di perusahaan sesuai kewenangan Dekom, seperti persetujuan perpanjangan fasilitas garansi bank, arahan terhadap penunjukan KAP pelaksana audit laporan keuangan perusahaan tahun buku 2012 dan persetujuan atas restrukturisasi organisasi perusahaan. Di samping itu, diberikan persetujuan atas perjalanan dinas Direksi ke Malaysia dalam rangka rencana kerja sama dengan Asia Lab (Malaysia) Sdn. Bhd pada bulan Maret dan perjalanan dinas Direksi ke China di bulan Juni dalam rangka delivery kapal MT. Geudondong, perjalanan dinas Direksi ke India di bulan Oktober dalam rangka ACS Executive Committee Meeting perjalanan dinas Direksi ke Inggris di bulan November dalam rangka Sidang IMO Council Ke-109
4. Mereview dan menindaklanjuti masukan serta rekomendasi dari Komite Audit diantaranya mengenai RKAP Tahun 2012, Laporan Manajemen Tahun 2011 (unaudited dan audited), Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2012, Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2012, Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2012, RKAP Tahun 2013, perubahan struktur organisasi dan penilaian efektivitas audit laporan keuangan perusahaan tahun buku 2011 oleh eksternal auditor serta LHP SPI Triwulan III dan IV Tahun 2011 serta LHP SPI Triwulan I Tahun 2012.
5. Mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan pengembangan Dewan Komisaris, seperti keikutsertaan dalam workshop COSO Framework dalam Meningkatkan Pengawasan Dewan Komisaris atas Pengendalian Internal BUMN-BUMD dan Anak Perusahaan BUMN-BUMD yang diadakan oleh Centre of Finance and Investment Studies (Pusat Studi Investasi dan Keuangan) di Yogyakarta tanggal 17-19 Februari 2012, menghadiri acara sosialisasi rightsizing BUMN di Batam pada tanggal 14 Juni 2012 yang diselenggarakan Kementerian BUMN dan mengikuti Raker Kementerian BUMN di Yogyakarta pada tanggal 10 Oktober 2012 yang dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan menghadiri seminar yang diselenggarakan Komite Ekonomi Nasional.

Suspension decision is then followed by the dismissal of all the Shareholders of the Board of Directors and Managing Director of the newly raised by Decree No. Shareholders. 203/MBU/2012 dated May 25, 2012 and the appointment of two Directors by Shareholders Decision No. SK-284/MBU/2012 dated August 3, 2012. The Board also proposed the establishment of the firm as a managing audit the Financial Statements and Report of the financial year 2012 in accordance PKBL the selection of procurement conducted KAP

3. *Provide feedback, opinions and guidance on matters that are strategic in companies Dekom appropriate authority, such as the approval of the extension of the bank guarantee facility, referral to the appointment of the firm managing the company's financial statement audit the financial year 2012 and approval of the company's organizational restructuring. In addition, given the approval of the Board of Directors on a business trip to Malaysia in order to plan cooperation with Lab Asia (Malaysia) Sdn. Bhd. in March and Directors official travel to China in June in order to delivery the vessel MT. Geudondong, Board official travel to India in October in order to ACS Executive Committee Board of Directors Meeting business trip to England in November in the framework of the IMO Assembly Council 109th.*
4. *Review and follow up on the input and recommendations of the Audit Committee include the CBP in 2012, Management Report Fiscal Year 2011 (unaudited and audited), Management Reports First Quarter 2012, Reports Management Quarter 2012 Third Quarter Management Report in 2012, CBP in 2013, changes in organizational structure and assessment of the effectiveness of the audit of financial statements for financial year 2011 by the company's external auditors and LHP SPI Quarter III and IV in 2011 and the LHP SPI Quarter 2012.*
5. *Following activities that can increase the development of the Board of Commissioners, such as participation in workshops COSO Framework to Improve Oversight Board of Commissioners on Internal Control state-enterprises and state-owned-enterprises Subsidiaries held by the Centre for Finance and Investment Studies (Center for Investments and Finance) in Yogyakarta 17-19 February 2012, attended the rightsizing state socialization in Batam on June 14, 2012 held the Ministry of Enterprise and the Ministry of Enterprise and follow Raker in Yogyakarta on October 10, 2012 which was chaired by President Susilo Bambang Yudhoyono and attend a seminar organized by the Committee National economy.*

6. Mengikuti program pengenalan buat anggota Dewan Komisaris yang diangkat pada bulan Maret 2012 yaitu Bpk. Avianto Muhtadi dalam acara cek posisi perusahaan sd triwulan I/2012. Dalam acara dimaksud, diundang Kepala Biro Hukum KBUMN untuk mensosialisasikan pen-yesuaian anggaran dasar dan mekanisme korporasi pada tanggal 10 Mei 2012. Terkait dengan pengangkatan Direksi baru pada bulan Mei 2012, Dewan Komisaris juga telah beraudiensi dengan Direktur Utama dan membahas mengenai permasalahan dan hal-hal strategis perusahaan yang masih pending penyelesaiannya.
7. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-322/MBU/2012 tanggal 11 September 2012 telah ditetapkan Pemberhentian dan Pen-gangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia. Dewan Komisaris yang lama telah menyerahkan Berita Acara Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Hal-Hal yang Pending dari Rencana Program Kerja Dewan Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Tahun 2012
8. Terkait dengan dimulainya pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, dilaksanakan paparan bisnis PT. BKI (Persero) yang diselenggarakan tanggal 15 Oktober 2012 dalam rangka Program Pengenalan Dewan Komisaris baru yaitu Bpk. Machfud Sidik sebagai Komisaris Utama, Bpk. Erwin Rosmali, Bpk. Minto Widodo dan Bpk. Faisal Halimi masing-masing sebagai Komisaris. Di samping itu, Dewan Komisaris menetapkan pembagian tugas Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris No. KU- 004/Dekom. 101/X/2012 dan menetapkan Komite Audit yang baru melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor No. KU.005/Dekom.101/ /X/KI-2012 tanggal 30 Oktober 2012.
9. Menyusun rencana kegiatan dan key performance indicators Dewan Komisaris tahun 2013.

Remunerasi Komisaris

Remunerasi adalah imbalan yang diberikan kepada Komisaris atas peran yang diberikan untuk pengurusan dan pengawasan perusahaan adalah melalui RUPS 26 April 2012 dan keputusan Pemegang Saham diluar RUPS No. 08/D4-MBU/2012 tanggal 04 Juni 2012 tentang penetapan penggunaan laba dan penetapan remunerasi Direksi dan Komisaris serta Keputusan Direksi No. DU.126/KP.310/KI-12 tanggal 09 Juli 2012 tentang Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :

6. Following the introduction of the program for any member of the Board of Commissioners are appointed in March 2012 that Mr. Avianto Muhtadi check the company's position in the event till first quarter of 2012. In the event referred to, are invited Head of Legal KBUMN to socialize base budget adjustments and corporate mechanism on May 10, 2012. Associated with the appointment of a new Board of Directors in May 2012, the Board of Commissioners also has an audience with the President and discuss the issues and strategic matters that are still pending completion.

7. Based on the Decree of the State Minister for State-Owned Enterprises No. SK-322/MBU/2012 dated 11 September 2012 has been set Termination and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Indonesian Classification Bureau. The old Board of Commissioners has awarded the Minutes of the Board of Commissioners and the Implementation Task Matters pending from Work Program Plan Board of Commissioners of the Bureau Classification Indonesia (Persero) in 2012.
8. Associated with the start of the implementation of the duties of the Board of Commissioners, conducted business exposure PT. BKI (Persero), held on October 15, 2012 in order to program the introduction of the new Board of Commissioners Mr. Machfud Sidik as Commissioner, Mr. Erwin Rosmali, Mr. Minto and Mr. Widodo. Faisal Halimi each as Commissioner. In addition, the Board of Commissioners Board of Commissioners set the job description through Decree No. BOC. KU-004/Dekom. 101/X/2012 and establish new ones through the Audit Committee of the Board of Commissioners Decision No. KU.005/Dekom. 101/X/KI-2012 dated October 30, 2012.
9. Draw up action plans and key performance indicators Board of Commissioners in 2013.

Remuneration of Commissioners

Remuneration is a reward given to the Commissioner of the role given to the management and supervision of the company is through the GMS 26 April 2012 and the decision of Shareholders outside the GMS No. 08/D4-MBU/2012 dated June 4, 2012 regarding the determination of the use of income and determination of the remuneration of Directors and Commissioners and Directors Decision No. DU.126/KP.310/KI-12 dated July 9, 2012 on Remuneration of Directors and the Board of Commissioners as follows:

(dalam ribuan rupiah)

No.	Jabatan	Nama	Honorarium
1.	Komisaris Utama	Machfud Sidik	24.000
2.	Komisaris	Minto Widodo	21.600
3.	Komisaris	Faisal Halimi	21.600
4.	Komisaris	Erwin Rosmali	21.600
5.	Sekretaris Dekom	Susi Meyrista Tarigan	9.000
6.	Staf Dekom	Royanata	4.500



Selain remunerasi tersebut diatas, kepada Dewan Komisaris dan Sekretaris juga diberikan fasilitas kendaraan dinas operasional masing-masing 1 (satu) unit sesuai azas kepentasan dan kemampuan perusahaan.

Efektifitas Kerja Komisaris

Komisaris mengadakan rapat 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu untuk membicarakan berbagai permasalahan dan bisnis Perusahaan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Perusahaan. Panggilan rapat Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Dalam panggilan rapat dicantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat. Semua rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Semua keputusan dalam rapat Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang dapat menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil serta pernyataan keberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat. Risalah rapat ditanda-tangani Pimpinan rapat Komisaris dan oleh salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir. Setiap anggota Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Komisaris, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.

Pada tahun 2012 Dewan Komisaris telah melakukan rapat internal sebanyak 15 (lima belas) kali, dengan prosentase kehadiran sebagai berikut :

- Abdul Gani (Komisaris Utama) : 100%
- Riyadi Widiasmoro (Komisaris) : 100%
- Liliek Mayasari (Komisaris) : 100%
- Avianto Muhtadi (Komisaris) : 100%

Sedangkan prosentase kehadiran susunan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-322 /MBU/2012. tanggal 11 September 2012 adalah sebagai berikut :

- Machfud Sidik (Komisaris Utama) : 100%
- Erwin Rosmali (Komisaris) : 75%
- Minto widodo (Komisaris) : 75%
- Faisal Halimi (Komisaris) : 62,%

Direksi

Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, mengurus dan mengelola bisnis untuk kepentingan Perusahaan yang sebesar-besarnya. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas Perusahaan. Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi menggunakan wewenang dan sum-ber daya yang dimiliki Perusahaan semata-mata hanya untuk kepentingan Perusahaan.

In addition to the above remuneration, the Board of Commissioners and the Secretary was also given the facility operational service vehicles each 1 (one) unit according the principles of merit and ability of the company.

Remuneration of Commissioners

Board of Commissioners met every 1 (one) month and at any time if deemed necessary to discuss various issues and business enterprise and evaluation of company performance. Call meeting of Board of Commissioners is made in writing by President Commissioner or by a member of Board of Commissioners appointed by President Commissioner. In a meeting call were included the agenda, date, time and place. All meetings chaired by the President Commissioner. In the case of President Commissioner is absent or unavailable; the meeting is headed by a Commissioner appointed by the President Commissioner. All decisions taken at a meeting were taken with deliberation and consensus. In each meeting the minutes of the meeting which can describe the situation envolving, the decision making process, the arguments presented, the conclusions drawn and the statement of objections to the conclusion of the meeting if there is not unanimity of opinion. Minutes of the meeting signed by the Chairman of the meeting and one member of the Commissioners appointed by and from among those present. Each member of the Commissioner is entitled to receive a copy of the minutes of meetings although does not attend the meeting.

In 2012 the Board of Commissioners has conducted internal meetings as many as 15 (fifteen) times, with percentage of attendance as follows:

- *Abdul Gani (Commissioner)* : 100%
- *Riyadi Widiasmoro (Commissioner)* : 100%
- *Liliek Mayasari (Commissioner)* : 100%
- *Avianto Muhtadi (Commissioner)* : 100%

While the percentage composition of the Board of Commissioners by the presence of Ministerial Decree No. SOE. SK-322 /MBU/2012. September 11, 2012 is as follows:

- *Machfud Sidik (Commissioner)* : 100%
- *Erwin Rosmali (Commissioner)* : 75%
- *Minto widodo (Commissioner)* : 75%
- *Faisal Halimi (Commissioner)* : 62,%

Directors

Directors in good faith and responsibly, taking care of and manage the business for Company interest as big as possible. In performing their duties, the board due regard to balance the interests of all parties related to Company activities. Board of Directors acted very carefully, be cautious and consider about various important aspects which are relevant in performing their duties. Directors use the authority and resources owned by the Company solely for Company interest.

Direksi mempunyai tugas utama :

- Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan. Menerapkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang sehat dalam perusahaan.
- Bertugas sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS serta peraturan lainnya.
- Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui RUPS.

Susunan Direksi berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS No.KEP-259/MBU/2010 tanggal 06 Desember 2010, adalah :

Direktur Utama : Purnama

Direktur Teknik & Pengembangan : Ajatiman

Direktur Operasi & Pemasaran : Setudju Dangkeng

Direktur Keuangan & Personalia : Edy Cahyono

Sesuai Keputusan Dekom No. 002/Dekom.101/ IV/2012 Tanggal 27 April 2012, susunan Direksi adalah :

Plt Direktur Utama merangkap

Dir. Keuangan & Personalia : Edy Cahyono

Direktur Teknik & Pengembangan merangkap Direktur Operasi & Pemasaran : Ajatiman

Sesuai Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS No. SK-203/MBU/2012 tanggal 25 Mei 2012, pengurus perseroan adalah :

Direktur Utama : Ibnu Wibowo

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-284/MBU/2012 tanggal 03 Agustus 2012, ditetapkan pengangkatan :

Direktur Teknik & Operasi : Iman Satria Utama
Direktur Keuangan & SDM : Anang Sundana

Sehingga pengurus perseroan pada akhir periode 2012 adalah :

Direktur Utama : Ibnu Wibowo
Direktur Teknik & Operasi : Iman Satria Utama
Direktur Keuangan & SDM : Anang Sundana

Profil Direksi BKI

Profile of Directors BKI

1. Ibnu Wibowo
Tanggal Lahir : Yogyakarta, 18 September 1952
Pendidikan : Sarjana Ekonomi Perusahaan Universitas Islam Indonesia (1978), MBA Finance St. Louis University, Amerika Serikat (1989)
Pengalaman : Direktur Utama PT. PANN (2004 - 2012), Bank Mandiri (1999 - 2004), Bank Dagang Negara (1980 - 1999)
2. Iman Satria Utama
Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Agustus 1960
Pendidikan : AIP (1984), S1 Sospol (1997), S2 (Jakarta)
Pengalaman : Kasubdit Nautis, Teknis & Radio Kapal Ditkapel (2009 - 2011), Kepala Kantor Adpel Palembang (2011 - 2012)
3. Anang Sundana
Tanggal Lahir : Kuningan, 8 Agustus 1958
Pendidikan : Sarjana Ekonomi Universitas Jayabaya (1986)
Pengalaman : Direktur Umum & SDM, Plt Direktur Utama PT. Berdikari (2007 - 2009), Direktur Keuangan & Adminis trasi PT. Sarinah (2009 - 2012)

Direktors have the primary duties:

- Lead and manage the company in accordance with its aims and objectives.
- Improve efficiency and effectiveness of the company.
- Apply the practices of good corporate governance within the company.
- Assigned based on Company's statutes, the decision of AGM and other rules.

The Board of Directors based on the Ministry of State Enterprises as No.KEP-259/MBU/2010 GMS dated December 6, 2010, are:

Director : Purnama

Director of Engineering & Development : Ajatiman

Director of Operations & Marketing : Setudju Dangkeng

Director of Finance & Personnel : Edy Cahyono

According to the Decree No. 002/Dekom.101/ IV/2012 Date 27 April 2012, the Board of Directors are:

Acting Director of concurrent

Dir. Finance & Personnel : Edy Cahyono

Director of Engineering & Development cum Director of Operations & Marketing : Ajatiman

According to the Decree No. Shareholders GMS Outside. SK-203/MBU/2012 dated May 25, 2012, the board of the company is:

Director : Ibnu Wibowo

Based on Ministerial Decree No. SOE. SK-284/MBU/2012 dated August 3, 2012, set the appointment:

Director of Engineering & Operations : Iman Satria Utama
Director of Finance & HR : Anang Sundana

So that the company's board at the end of 2012 are:

Director: Ibnu Wibowo
Director of Engineering & Operations : Iman Satria Utama
Director of Finance & HR : Anang Sundana

Remunerasi Direksi

Remunerasi adalah imbalan yang diberikan kepada Direksi atas peran yang diberikan untuk pengurusan dan pengelolaan Perusahaan adalah sesuai dengan Keputusan RUPS tanggal 26 April 2012 dan Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS No. 08/D4-MBU/2012 tanggal 04 Juni 2012 tentang penetapan penggunaan laba dan penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta Keputusan Direksi No. DU.126/KP.310/KI-12 tanggal 09 Juli 2012 tentang remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :

Remuneration of Directors

Remuneration is a reward given to the Board of Directors of the role given to the maintenance and management of the Company are in accordance with the Decree of GMS dated 26 April 2012 and Decision of Shareholders outside the GMS No. 08/D4-MBU/2012 dated June 4, 2012 regarding the determination of the use of profits and remuneration of Directors and the Board of Commissioners and Board of Directors Decision No. DU.126/KP.310/KI-12 dated July 9, 2012 on the remuneration of Directors and the Board of Commissioners as follows:

(dalam ribuan Rupiah)

No	Jabatan	Nama	Honorarium	Tunjangan Perumahan	Tunjangan Operasional
1.	Direktur Utama	Ibnu Wibowo	60.000	18.000	5.000
2.	Direktur Keuangan & SDM	Anang Sundana	54.000	16.200	4.500
3.	Direktur Teknik & Operasi	Iman Satria Utama	54.000	16.200	4.500

Selain remunerasi di atas kepada Direktur Utama setiap bulan diberikan tambahan fixed cash allowances sebesar Rp 15 juta. Direksi juga diberikan fasilitas kendaraan dinas operasional masing-masing 1 (satu) unit sesuai dengan azas kepentasan dan kemampuan perusahaan.

In addition to the above remuneration to the Directors were also given the facility operational service vehicles each 1 (one) unit in accordance with the principles of merit and ability of the company.

Efektifitas Kerja Direksi

Secara umum efektifitas dan kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham. Direksi mengadakan rapat 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan. Dalam panggilan rapat tersebut dicantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Panggilan rapat terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat. Pada tahun 2012, Direksi melakukan rapat internal sebanyak 12 kali dan melakukan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris sebanyak 8 kali, dengan prosentase kehadiran sebagai berikut :

- CaPT. Purnama, MM : 33% (4 kali)
- Edy Cahyono ST, MSM : 42% (5 kali)
- Ir. Ajatiman : 42% (5 kali)
- Ir. Setudju Dangkeng : 33% (4 kali)

Sedangkan prosentase kehadiran Direksi baru sebagai berikut :

- Ibnu Wibowo : 67% (8 kali)
- Iman Satria Utama : 42% (5 kali)
- Anang Sundana : 42% (5 kali)

Job effectiveness of the Board of Directors

In general, the effectiveness and performance of the Board of Directors determined that the duties listed in the legislation in force and the Company's articles of association as well as the mandate of the Shareholders. Board of Directors meeting held 1 (one) month and at any time if deemed necessary by one or more members of the Board of Directors. Board of Directors meeting calls made in writing by the Board of Directors is entitled to represent the Company. In calling the meeting included the event, date, time and place of the meeting. Call the first meeting is not required if all members of the Board of Directors present at the meeting. In 2012, the Board of Directors held a meeting on 12 occasions and internal coordination meeting with the Board of Commissioners as much as 8 times, with percentage of attendance as follows:

- Capt. Purnama, MM : 33% (4 times)
- Edy Cahyono ST, MSM : 42% (5 times)
- Ir. Ajatiman : 42% (5 times)
- Ir. Setudju Dangkeng : 33% (4 times)

While the percentage presence of the new Board of Directors as follows:

- Ibnu Wibowo : 67% (8 times)
- Imam Satria Utama : 42% (5 times)
- Anang Sundana : 42% (5 times)



Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam hal dianggap perlu, Komisaris dapat berinisiatif menyelenggarakan rapat konsultatif dengan Direksi untuk membicarakan masalah perusahaan yang relevan. Demikian pula bila dianggap perlu, Direksi dapat berinisiatif menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Komisaris untuk membicarakan masalah perusahaan yang relevan. Dalam setiap pertemuan, informasi dan data yang penting untuk pemahaman Dewan Komisaris akan diberikan secara tertulis sebelum pertemuan untuk menjamin tersedianya waktu bagi Dewan Komisaris untuk memahami per-masalahan yang akan dibahas. Bila perlu Direksi membuat ringkasan bahan tersebut sepanjang tidak mengurangi esensi informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam setiap rapat konsultatif tersebut dibuat risalah rapat yang dapat menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diam-bil, serta pernyataan keberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat. Selama tahun 2012, Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan rapat konsultatif sebanyak 8 kali.

Komite Audit

Telah dibentuk Komite Audit Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku melalui Surat Keputusan Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) no. KU.002/Dekom.101/X/KI-09 tanggal 22 Oktober 2009 dan penunjukan Ketua Komite Audit secara formal melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Ketua : Riyadi Widiasmoro
2. Anggota : Tri Ashadi Suwarno

Sesuai dengan masa tugas Komite Audit yang berakhir sesuai aturan, maka berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) nomor KU.005/ Dekom.101/X/KI-12 tanggal 30 Oktober 2012, ditetapkan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Kegiatan Komite Audit tahun 2012 :

1. Rapat dengan SPI mengevaluasi LHP SPI triwulan III dan IV tahun 2011 serta triwulan I tahun 2012.
2. Mengevaluasi rencana pemeriksaan SPI periode selanjutnya.
3. Rapat dengan pengurus Dana Pensiun membahas usulan Direksi untuk kenaikan manfaat pensiun.
4. Monitoring kinerja Cabang Utama Surabaya.
5. Memberikan tanggapan atas Laporan Manajemen Tahun 2011, Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2012, dan usulan kenaikan manfaat pensiun.
6. Mengikuti cek posisi kinerja PT. BKI seluruh cabang. Rapat dengan KAP untuk memonitor pelaksanaan
7. Audit Laporan Keuangan tahun buku 2011 dan memberikan masukan.
8. Rapat intern Komite Audit untuk penyusunan evaluasi atas pelaksanaan audit oleh KAP guna bahan tanggapan Dewan Komisaris kepada Direksi.
9. Bersama dengan Komisaris melakukan kunjungan ke Cabang Makassar dan Pontianak.

Working relationship between Board of Commissioners and Directors

In case considered necessary, Board of Commissioners may initiate Coordination Meeting with Board of Directors to discuss relevant company's issues. Similarly, if deemed necessary, Directors may initiate Coordination Meeting with Board of Commissioners to discuss relevant company's issues. In each meeting, information and data important for the understanding of Board of Commissioners will be given in writing before the meeting to ensure time availability for the Board to understand issues discussed. If necessary, Board of Directors can make a summary of material provided as long as they do not reduce the essential information that can influence in decision making. In each consultative meeting will be made the minutes of meeting which can describe the situation evolving, decision-making process, arguments presented, conclusions drawn, and statement of objections to meeting conclusion when there is no opinion unanimity. During year 2012, Board of Directors and Board of Commissioners have held coordination meetings as many as 8 (eight) times.

Audit Committee

Our Audit Committee has been established according to regulations by Decree Commissioner of the Bureau Classification Indonesia (Persero) no. KU.002/Dekom.101/X/KI-09 dated October 22, 2009 and the appointment of the Chairman of the Audit Committee formally through meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors with the membership as follows:

- | | |
|-------------|--------------------------|
| 1. Chairman | : Riyadi Widiasmoro |
| 2. Members | : Tri Ashadi and Suwarno |

The period ending task of the Audit Committee by the rules, the decision by the Board of Commissioners of PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) number KU.005 / Dekom.101/X/KI-12 dated October 30, 2012, the composition of the Audit Committee are set as follows:

Activities of the Audit Committee in 2012:

1. *Meeting with SPI evaluating SPI LHP third and fourth quarters of 2011 and first quarter 2012.*
2. *Evaluate the SPI plan next period.*
3. *Meeting with the board of the Pension Fund Board of Directors to discuss the proposed increase in pension benefits.*
4. *Monitoring performance Main Branch Surabaya.*
5. *Management responded to the report in 2011, Management Reports First Quarter 2012, and the proposed increase in pension benefits.*
6. *Following checks the position of the PT. BKI all branches.*
7. *Meeting with KAP to monitor the implementation of the Audit of Financial Statements for financial year 2011 and provide input.*
8. *Internal Audit Committee meeting for the preparation of an evaluation of the implementation of the audit by the accounting firm BOC to material response to the Board.*
9. *Commissioner along with a visit to Pontianak and Makassar Branch.*



10. Peninjau dalam setiap sidang pada acara Raker dan TOMSI tahun 2012.
11. Mengevaluasi usulan RKAP Tahun 2013 dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris.
12. Mengevaluasi kesesuaian usulan RKAP Tahun 2013 dengan Share Holder Aspiration.
13. Mengevaluasi usulan perubahan struktur organisasi dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris.

Sistem Pengendalian Internal

Perusahaan telah memelihara sistem pengendalian internal keuangan yang menjamin keandalan sistem akuntansi. Sistem pengendalian internal keuangan diberlakukan untuk memberikan jaminan yang wajar dalam hubungannya dengan menjaga asset dari penyalahgunaan dan peralihan kepemilikan secara tidak sah, menjaga keabsahan catatan-catatan akuntansi dan keandalan informasi keuangan yang dapat dipercaya yang digunakan dalam Perusahaan maupun yang dipublikasikan.

Pelaksanaan tugas pengendalian internal merupakan tanggung jawab seluruh unit/satuan kerja. Perusahaan menetapkan Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai unit yang bertanggung jawab atas efektivitas sistem pengendalian internal. Selain itu perusahaan juga membentuk Satuan Jaminan Mutu (Satjamtu) sebagai penanggung jawab diterapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan persyaratan standar ISO 9001:2008 sebagai wujud komitmen manajemen dalam meningkatkan kepuasan pemakai jasa (customer satisfaction) dan penyempurnaan yang berkesinambungan (continuous improvement). Dalam mendukung aktivitas pengendalian internal, Perusahaan senantiasa menjamin independensi SPI dan Satjamtu dalam melaksanakan audit serta meningkatkan kompetensi para auditornya. SPI selama tahun 2012 telah melakukan audit operasional terhadap 16 (enam belas) unit kerja, sedangkan Satjamtu telah melakukan audit terhadap 30 (tiga puluh) unit kerja, meliputi Kantor Pusat dan Unit Produksi.

Auditor Eksternal

Melalui surat Dewan Komisaris no. A.012/ DK.201/IV/KI-12 tanggal 24 April 2012, Dewan Komisaris menyampaikan evaluasi efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor. Sesuai keputusan RUPS tanggal 26 April 2012 RUPS memberikan kuasa kepada Dewan

Komisaris untuk menunjuk KAP yang akan bertindak sebagai auditor independen untuk melaksanakan audit atas laporan tahunan dan perhitungan tahunan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tahun buku 2012. Melalui surat no. A.028/ DK.201/VIII/KI-12 tanggal 31 Agustus 2012, Dewan Komisaris meminta bantuan Direksi untuk membentuk Tim Pengadaan KAP. Selanjutnya, berdasarkan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip GCG, Dewan Komisaris telah menunjuk KAP Husni Mucharam Rasyidi sebagai auditor atas laporan keuangan PT. BKI (Persero) untuk tahun buku 2012. Melalui surat no. A.036/DK.201/XII/KI-12 tanggal 13 Nopember 2012,

10. Observer in each session at the Raker and Tomsi in 2012.
11. Evaluate the proposed RKAP in 2013 and provides advice to the Board of Commissioners.
12. Evaluate the suitability of the proposed RKAP in 2013 with a Share Holder Aspiration.
13. Evaluating proposed changes in organizational structure and provide advice to the Board of Commissioners.

Internal Control System

The company has been maintaining internal control system which ensures the reliability of financial accounting systems. Financial internal control system put in place to provide reasonable assurance in relation to the keeping of assets from misuse and unauthorized transfer of ownership, maintaining the validity of accounting records and the reliability of reliable financial information used by the Company those were published.

The implementation of tasks of internal control is the responsibility of all working units. The Company provided an Internal Audit Unit (IAU) as the unit responsible for the effectiveness of internal control system. The company also established the Quality Assurance Unit as the one which is responsible for the implementation of Quality Management System based on ISO standard requirements 9001:2008 as a part of its commitment to improve management of customer satisfaction and continuous improvement. In supporting internal control activities, the company has ensured the independence of ISU and Quality Assurance Unit in conducting audits and increased auditors' competence. SPI during year 2010 has conducted operational audits of 16 (sixteen) business units, while Quality Assurance Unit has conducted audits of 30 (thirty) business units, including Head Office and Production Units.

External Auditor

BOC by letter no. A.012/DK.201/IV/KI-12 dated 24 April 2012, the Board of Commissioners would like to evaluate the effectiveness of the external auditor's duties. At the discretion of RUPS dated 26 April 2012 RUPS the Board of Commissioners to appoint the firm that will act as an independent auditor to perform the audit of the annual report and financial statements of PT. Bureau Classification Indonesia (Persero) fiscal year 2012. Through letter no. A.028/ DK.201/VIII/KI-12 dated August 31, 2012, the Board of Commissioners requested the help of the Board of Directors to establish a Procurement Team KAP. Furthermore, based on the procurement process in accordance with applicable regulations and the principles of good corporate governance, the Board has appointed the firm as an auditor Husni Mucharam Rasyidi the financial statements. BKI (Persero) for the financial year 2012. Through letter no. A.036/DK.201/XII/KI-12 dated 13 November 2012,

Dewan Komisaris menyampaikan arahan mengenai penetapan KAP untuk jasa pekerjaan audit atas laporan keuangan tahun buku 2012. Auditor eksternal tersebut terbebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perusahaan, serta perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketatazasan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Tugas auditor eksternal adalah melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan dan memberikan pendapat (opini) secara independen terhadap kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standart Akuntansi Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menjamin proses penunjukan auditor eksternal dan pelaksanaan audit dilakukan secara independen tanpa pengaruh Direksi dan pihak-pihak diluar Perusahaan. Besarnya jasa audit yang dibayarkan Perusahaan untuk laporan keuangan tahun 2012 yaitu Rp 214,5 juta termasuk PPN 10%. Kantor Akuntan Publik Husni Mucharam Rasyidi tidak memberikan jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan.

Integritas dalam berusaha

Penerapan standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip GCG melandasi seluruh aktivitas Perusahaan dalam menjalankan usahanya.

Seluruh jajaran Perusahaan telah mensosialisasikan GCG Code ini untuk mempertahankan kejujuran, transparansi, independensi, akuntabilitas, integritas, dan keadilan dalam proses kerja dan transaksi di lingkungan masing-masing. Perusahaan telah menerapkan fungsi pengawasan dengan menggunakan audit berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar tindakan-tindakan ilegal, tidak fair dan pelanggaran atas norma-norma dan peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi, baik administrasi, maupun perdata. Menjadi kewajiban setiap unit kerja untuk senantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan. Perusahaan telah menetapkan kebijakan melarang anggota Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perusahaan dan pihak yang terkait melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip GCG. Apabila transaksi tersebut terbukti terjadi, maka setiap pihak yang terlibat langsung akan dikenai sanksi administratif dan tuntutan sesuai hukum yang berlaku. Pengertian yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip GCG digunakan untuk menggambarkan setiap transaksi bisnis yang dikategorikan melawan hukum atau bertentangan dengan integritas Perusahaan. Transaksi tersebut, antara lain pemberian atau penerimaan suap dan hadiah yang diberikan dalam upaya mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan.

the Board of Commissioners would like guidance on the determination of the firm for the services of audit work on the financial statements of fiscal year 2012. External auditors are free from the influence of the Board of Commissioners, Directors and interested parties in the Company, and the company is obliged to provide all accounting records and supporting data necessary to enable the external auditor the external auditor gives his opinion on the fairness, and appropriateness ketaatazasan financial statements with the Company's standard Indonesian Financial Accounting. External auditor task is to audit the financial statements of the Company and provide opinions (opinions) are independent of the fairness and appropriateness of the Company's financial statements with the Financial Accounting Standard and legislation in force. The company ensures the appointment of external auditors and the audit conducted independently without the influence of the Board of Directors and parties outside the company. The amount of audit services were paid for the 2012 financial statements of Rp 214.5 million including 10% VAT. Public Accounting Firm Husni Mucharam Rasyidi not provide other consulting services to the company.

Integrity in business

Ethical standards in all business activities based on GCG principles underlie all activities of the company to run its business.

All levels of the company have socialized this Code GCG to maintain honesty, transparency, impartiality, accountability, integrity and fairness in work processes and transactions in their respective environment. The Company has implemented a monitoring function by using audits based on correct principles and generally accepted and always strive to be illegal, unfair and a violation of the norms and regulations can be subject to sanctions, both administrative and civil liability. It has been the responsibility for each business unit to constantly follow up on any audit findings submitted by the supervisory function. The Company has established a policy to prohibit Board of Commissioners, Directors and all employees and related parties engaged in transactions that violate the law and principles. When these transactions are proven to occur, then each party which is directly involved will be given administrative sanction and demand in accordance with applicable law. Understanding that violate the law and principles of GCG is used to describe any business transaction categorized unlawful or contrary to the integrity of the company. Such transactions are, among others, giving or receiving bribes and gifts in an effort to influence decisions related to corporate business.



Hubungan dengan Pemegang Saham

Perusahaan telah melakukan hubungan dengan Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan berusaha keras agar memberikan kontribusi yang optimal dan berkesinambungan bagi Pemegang Saham. Perusahaan selalu berusaha agar terjadi pertumbuhan yang berkesinambungan.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Pelestarian Lingkungan

Perusahaan selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestariaan lingkungan. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang prima dan tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan perusahaan jangka panjang.

Perusahaan telah mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja. Perusahaan telah mengusahakan agar pegawai memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk maksud tersebut Perusahaan telah memastikan bahwa asset-asset dan lokasi usaha serta fasilitas lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestariaan lingkungan.

Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk senantiasa melengkapi dan menyediakan alat, sarana dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja agar seluruh surveyor dan inspektor dapat bekerja aman dan selamat. Dalam prakteknya, Perusahaan memiliki HSE (Health, Safety & Environment) Manual sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian aspek kesehatan, keselamatan dan perlindungan lingkungan kerja.

Pengadaan dan Hubungan dengan Rekanan

Perusahaan telah menerapkan proses pengadaan sesuai prinsip GCG, antara lain menjunjung prinsip-prinsip keterbukaan, kompetitif, fair dan dapat dipertanggung jawabkan (accountable). Proses pengadaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pengadaan barang dan jasa, Perusahaan memiliki peraturan yang jelas dan tertulis untuk menjamin bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut diatas. Proses yang demikian akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan Perusahaan dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua rekanan untuk berkompetisi dalam proses pengadaan sesuai dengan kemampuan dan pengalaman mereka. Dalam pemilihan rekanan untuk proses pengadaan tidak diperbolehkan menunjuk rekanan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Komisaris, Direksi, pejabat ataupun personil di BKI. Selain itu dalam pemilihan barang atau rekanan, diupayakan semaksimal mungkin untuk mempergunakan produk dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan aspek kualitas, efisien dan efektivitas serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Relation with Shareholders

Company has made relation with the Shareholders in accordance with laws and regulations. Company always tries hard to give an optimal and sustainable contribution to the Shareholders. Company always tries to make sustainable growth.

Safety and Occupational Health and Environmental Conservation

Company always gives priority to safety, health and environmental conservation. The Company recognizes that the management of good occupational health and environmental responsibility is very important for long-term corporate success.

The Company has taken appropriate action to avoid accidents and health problems in the workplace. Company always makes sure that employees work in a safe and healthy workplace. For this purpose the Company has ensured that the asset, work location and other facilities, meet the applicable statutory regulations with respect to health and safety requirements and environmental conservation.

The Company also has an obligation to always complete and provide tools, facilities and safety and health equipment in order that all surveyors and inspectors can work securely and safely. In practice, the Company has HSE (Health, Safety & Environment) Manual as a reference in the implementation and control of Health, Safety and Environmental Protection Work aspects.

The process of Procurement and Relationship with Partners

The Company has implemented a procurement process in accordance with GCG, among others, upholding the principles of openness, competitive, fair and accountable. The procurement process does not conflict with applicable legislation. For goods and service procurement, the Company has clear, written rules to ensure that the implementation of the goods and service procurement in line with principles mentioned above. Such processes will provide maximum benefit for company interest and provide equal opportunity to all partners to compete in procurement process in accordance with their capabilities and their experience. In choosing a partner for the procurement process, it was not allowed to appoint a partner that could cause conflict of interest with Board of Commissioners, Directors, officers or personnel in BKI. Also in the selection of goods or partner, sought as maximally as possible to use the product in the country by staying consider aspects of quality, economical and financial aspects so that do not conflict with legislation.



Kemitraan dengan Masyarakat Sekitar

Perusahaan tanggap dan memperhatikan masalah-masalah masyarakat, khususnya yang tinggal dalam wilayah operasi Perusahaan. Perusahaan telah menegakkan komitmen bahwa dimanapun Perusahaan beroperasi hubungan baik dengan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan. Menyadari bahwa masing-masing masyarakat sekitar mempunyai karakteristik yang berbeda, sudah seharusnya Perusahaan berusaha memahami dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan membantu masyarakat dengan cara yang wajar dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan serta ketentuan yang berlaku. Perusahaan sangat menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial Perusahaan. Kemitraan dengan masyarakat sekitar telah dilaksanakan oleh Unit PKBL.

Penerapan Teknologi

Perusahaan selalu berupaya, mengadopsi teknologi dan standar yang diakui dalam mengembangkan dan mempublikasikan Rules & Regulation BKI sebagai acuan bagi BKI melakukan pelayanan jasa survey dan sertifikasi. Penerapan teknologi informasi juga telah dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan jasa dan percepatan proses produksi serta pelaporan keuangan dan sistem pelaporan lainnya.

Manajemen Risiko

Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa operasi Perusahaan tidak terbebas dari berbagai risiko, baik risiko yang berada di bawah kendali Perusahaan maupun risiko yang berada di luar kendali Perusahaan. Perusahaan telah mengendalikan dan meminimalkan risiko-risiko yang bersifat internal dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential management) dan prinsip-prinsip manajemen risiko. Sedangkan risiko-risiko yang bersifat eksternal, Perusahaan berusaha mengidentifikasi secara seksama dan mengevaluasi peluang terjadinya dan dampaknya terhadap Perusahaan. Perusahaan melakukan identifikasi terhadap kemungkinan munculnya risiko-risiko baik eksternal maupun internal tersebut. Atas dasar identifikasi itu, Perusahaan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya risiko tersebut, dengan merancang kontrak sedemikian rupa sehingga secara legal Perusahaan terlindungi dari risiko yang tidak perlu atau dengan melakukan teknik analisis keuangan tertentu sedemikian rupa sehingga resiko yang mungkin timbul tidak mengurangi nilai perusahaan secara drastis. Namun demikian, perusahaan juga menyadari adanya risiko yang berada di luar kendali yang tidak dapat diminimalkan dampaknya oleh upaya-upaya internal.

Hubungan dengan Pejabat Negara

Adalah kebijakan Perusahaan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap jajaran pejabat negara yang memiliki wewenang pada bidang operasi Perusahaan dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum.

Partnership with the Neighborhood Community

Company is responsive and paying attention to community issues, especially those who live in operation area. The Company has established a commitment that wherever the Company operates a good relationship with surrounding communities is a basic foundation for long term success of the Company. Realizing that each community has different characteristic, the company should try to understand and interact with surrounding communities and help people with a reasonable way by taking into account the ability of the Company and applicable regulations. Company appreciates any partnership activities that contribute to the community and enhance Company's social value.

Technology Application

The Company always strives to adopt technology and standards that are recognized in developing and publish BKI Rules & Regulations as a reference for BKI to conduct survey and certification services. The application of information technology has also been developed in order to improve service and production process acceleration and financial reporting and other reporting system.

Risk Management

Company is fully aware that the company is not free from risk, whether risk is under control and the risks that are beyond the company's control. The Company has controlled and minimized the risk of internal activities by applying prudential management and risk management principles. Whereas external risks, the Company is carefully trying to identify and evaluate opportunities and their impact for the Company. Based on the basis of this identification, the Company made necessary efforts to minimize such risks, by designing contracts so that company is legally protected from unnecessary risks or to perform certain financial analysis techniques in such a way that risks that may arise does not reduce Company's value drastically. However, the Company is also aware of risks beyond the control of which can not be minimized its impact by the effort internally.

Relationship with State Officials

It is company policy to develop and maintain good relationships and effective communication with all levels of state officials who have authority in the field of company's operation within tolerance limits allowed by law.

Kemitraan dengan Masyarakat Sekitar

Perusahaan tanggap dan memperhatikan masalah-masalah masyarakat, khususnya yang tinggal dalam wilayah operasi Perusahaan. Perusahaan telah menegakkan komitmen bahwa dimanapun Perusahaan beroperasi hubungan baik dengan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan. Menyadari bahwa masing-masing masyarakat sekitar mempunyai karakteristik yang berbeda, sudah seharusnya Perusahaan berusaha memahami dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan membantu masyarakat dengan cara yang wajar dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan serta ketentuan yang berlaku. Perusahaan sangat menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial Perusahaan. Kemitraan dengan masyarakat sekitar telah dilaksanakan oleh Unit PKBL.

Penerapan Teknologi

Perusahaan selalu berupaya, mengadopsi teknologi dan standar yang diakui dalam mengembangkan dan mempublikasikan Rules & Regulation BKI sebagai acuan bagi BKI melakukan pelayanan jasa survey dan sertifikasi. Penerapan teknologi informasi juga telah dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan jasa dan percepatan proses produksi serta pelaporan keuangan dan sistem pelaporan lainnya.

Manajemen Risiko

Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa operasi Perusahaan tidak terbebas dari berbagai risiko, baik risiko yang berada di bawah kendali Perusahaan maupun risiko yang berada di luar kendali Perusahaan. Perusahaan telah mengendalikan dan meminimalkan risiko-risiko yang bersifat internal dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential management) dan prinsip-prinsip manajemen risiko. Sedangkan risiko-risiko yang bersifat eksternal, Perusahaan berusaha mengidentifikasi secara seksama dan mengevaluasi peluang terjadinya dan dampaknya terhadap Perusahaan. Perusahaan melakukan identifikasi terhadap kemungkinan munculnya risiko-risiko baik eksternal maupun internal tersebut. Atas dasar identifikasi itu, Perusahaan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya risiko tersebut, dengan merancang kontrak sedemikian rupa sehingga secara legal Perusahaan terlindungi dari risiko yang tidak perlu atau dengan melakukan teknik analisis keuangan tertentu sedemikian rupa sehingga resiko yang mungkin timbul tidak mengurangi nilai perusahaan secara drastis. Namun demikian, perusahaan juga menyadari adanya risiko yang berada di luar kendali yang tidak dapat diminimalkan dampaknya oleh upaya-upaya internal.

Hubungan dengan Pejabat Negara

Adalah kebijakan Perusahaan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap jajaran pejabat negara yang memiliki wewenang pada bidang operasi Perusahaan dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum.

Partnership with the Neighborhood Community

Company is responsive and paying attention to community issues, especially those who live in operation area. The Company has established a commitment that wherever the Company operates a good relationship with surrounding communities is a basic foundation for long term success of the Company. Realizing that each community has different characteristic, the company should try to understand and interact with surrounding communities and help people with a reasonable way by taking into account the ability of the Company and applicable regulations. Company appreciates any partnership activities that contribute to the community and enhance Company's social value.

Technology Application

The Company always strives to adopt technology and standards that are recognized in developing and publish BKI Rules & Regulations as a reference for BKI to conduct survey and certification services. The application of information technology has also been developed in order to improve service and production process acceleration and financial reporting and other reporting system.

Risk Management

Company is fully aware that the company is not free from risk, whether risk is under control and the risks that are beyond the company's control. The Company has controlled and minimized the risk of internal activities by applying prudential management and risk management principles. Whereas external risks, the Company is carefully trying to identify and evaluate opportunities and their impact for the Company. Based on the basis of this identification, the Company made necessary efforts to minimize such risks, by designing contracts so that company is legally protected from unnecessary risks or to perform certain financial analysis techniques in such a way that risks that may arise does not reduce Company's value drastically. However, the Company is also aware of risks beyond the control of which can not be minimized its impact by the effort internally.

Relationship with State Officials

It is company policy to develop and maintain good relationships and effective communication with all levels of state officials who have authority in the field of company's operation within tolerance limits allowed by law.



Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi

Catatan yang akurat dan terandalkan mengenai aktivitas usaha dan operasional Perusahaan telah dipelihara setiap waktu. Setiap pembayaran uang, pengalihan kepemilikan, penyelesaian pemberian layanan, dan transaksi lainnya harus terefleksikan secara penuh dan detail pada sistem akuntansi dan catatan bisnis Perusahaan. Semua pihak harus mengungkapkan semua informasi yang relevan dan bekerja sama sepenuhnya dengan auditor internal dan eksternal dalam proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya. Kebijakan Perusahaan telah melarang Komisaris, Direksi dan karyawan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia mengenai Perusahaan atau pelanggan kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar Perusahaan. Mengingat bahwa pengungkapan informasi rahasia tersebut dapat merugikan Perusahaan atau pelanggan dan memberikan keuntungan kepada pihak lain, maka pemberian informasi rahasia menurut keperluannya harus melalui persetujuan Direksi. Perusahaan juga bekerja dengan data khusus milik pelanggan, rekanan, dan mitra usaha. Hal ini merupakan kepercayaan yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian utama dari Perusahaan untuk menghargai kerjasama yang berkelanjutan dari pelanggan, rekanan, dan mitra usaha lainnya. Oleh karena itu tidak seorangpun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak luar tanpa persetujuan Direksi atau pejabat yang ditunjuk oleh Direksi, atau tidak seorangpun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada yang lain kecuali berdasarkan kebutuhan kedinasan seperlunya.

Keterbukaan Informasi

Perusahaan telah mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangannya kepada Pemegang Saham dan instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif. Perusahaan menyampaikan informasi kepada khalayak umum, antara lain, melalui website, customer meeting, pertemuan Komite Konsultansi Klasifikasi Indonesia (K3I), presentasi, BUMN online, brosur, Company Profile, Annual Report dan promosi di sejumlah media massa.

Karyawan dan Hubungan Industrial

Perusahaan telah mengembangkan kualitas sumber daya manusianya, sesuai dengan kebutuhan, visi dan misi, serta program jangka panjang Perusahaan. Perusahaan mempunyai unit bisnis yang beroperasi di berbagai daerah dengan agama, budaya, tradisi, adat istiadat, kondisi karyawan serta peraturan setempat yang berbeda-beda. Meskipun peka terhadap perbedaan tersebut, Perusahaan tetap menerapkan prinsip-prinsip yang didasarkan pada ketentuan GCG. Direksi memperlakukan pegawai secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal-usul, kelompok, jenis kelamin, agama dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja dan indikator lain yang bersifat objektif. Perusahaan telah menetapkan beberapa kebijakan mengenai pegawai dan hubungan industrial, antara lain :

Company Data and Information Confidentiality

Accurate and reliable records about company's business and operational activities has been maintained all times. Any payment of money, transfer of ownership, the completion of delivery services and other transactions should be reflected in full and in detail on accounting system and business records of the Company. All parties must disclose all relevant information and fully cooperate with internal and external auditors in compliance audit process or other investigation. Company policy also prohibits Board of Commissioners, Directors and employees to disclose confidential information concerning the Company or its customers to third parties, both inside and outside the company. Considering that the disclosure of such confidential information could harm the Company or its customers and provide benefits to other parties, then the provision of confidential information should get the approval from Board of Directors. The company also works with special data of customers, suppliers and business partners. This is a very important trust and must receive primary attention from the company to appreciate the continuing cooperation of customers, suppliers and other business partners. Therefore, no person may disclose confidential information to outside parties without approval of Directors or officers appointed by Board of Directors, or no person may disclose confidential information to others except as necessary based on service needs.

Information Disclosure

The Company has revealed important information in annual report and financial report to shareholders and relevant government agencies in accordance with applicable laws and regulations in timely, accurate, clear and objective. Company submitted information to public, among others, through the website (www.klasifikasiindonesia.com), customer meetings, meetings Classification Consultancy Committee of Indonesia (K3I), presentation, online State Owned Companies, brochures, company profile, annual report, exhibition and promotion in a number of mass media.

Personnel and Industrial Relation

The company has developed its human resources in accordance with needs, vision and mission, and company's long-term program. The Company has business units that operate in various regions with different religion, culture, traditions, customs, employees' condition and local regulations. Although sensitive to these differences, the Company has adopted the principles based on GCG provision. Directors treat employees fairly and free from bias due to differences in ethnicity, origin, group, sex, religion and origin of birth and matters unrelated to performance and objective other indicators. The Company has established several policies related to personnel and industrial relations, among others:



- Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi pegawai.
- Melindungi pegawai dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.
- Memberikan hak kepada pegawai untuk berkumpul dan berserikat sesuai peraturan perundungan yang berlaku.
- Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi yang bersangkutan serta sesuai dengan kebutuhan Perusahaan baik saat ini maupun pada masa yang akan datang.
- Mengusahakan agar skema remunerasi yang diterima pegawai, secara umum mengikuti peraturan / ketentuan yang berlaku dan sesuai kemampuan Perusahaan.
- Memberikan bonus dan insentif prestasi kepada pegawai sesuai kinerjanya.
- Direksi memiliki kewenangan penuh untuk bertindak tegas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan menjunjung prinsip-prinsip GCG terhadap pegawai yang terbukti menimbulkan keresahan, melanggar norma disiplin pegawai, dan merusak suasana kerja yang kondusif.

Pegawai juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Perusahaan. Kewajiban pegawai terhadap Perusahaan antara lain:

- Setiap pegawai wajib mentaati Peraturan Pokok Kepegawaian (Perpok), nilai-nilai Perusahaan dan semua peraturan yang dikeluarkan Perusahaan.
- Setiap pegawai wajib mendahulukan kepentingan Perusahaan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tanggung jawabnya.
- Setiap pegawai wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diserahkan kepadanya.
- Setiap pegawai wajib menjaga harta milik dan nama baik Perusahaan.
- Setiap pegawai yang menjadi atasan wajib membina dan memberikan teladan pada pegawai di lingkungan kerjanya.

Pernyataan Palsu, Klaim Palsu, dan Konspirasi

Seluruh jajaran BKI yang berkaitan dengan tugas pemasaran, drawing approval, pelaksanaan survey dan inspeksi, proses sertifikasi, pembuatan kontak / perjanjian dan administrasi keuangan termasuk akuntansi, telah menyadari pentingnya membuat pernyataan yang akurat dan klaim yang benar kepada Pimpinan, Pemerintah maupun kepada pihak lain. Hal ini mencakup setiap pernyataan lisan dan tertulis yang disampaikan kepada pimpinan pihak lain atau yang digunakan oleh Perusahaan. Kesengajaan menyampaikan pernyataan atau klaim yang tidak benar atau yang menyesatkan atau yang melibatkan adanya konspirasi dengan orang lain untuk merugikan pihak lain dapat mengakibatkan dikenakannya hukuman administratif, pidana, perdata bagi personil yang bersangkutan dan pihak lain yang terlibat, termasuk mitra kerja Perusahaan dan pegawainya.

- *Provided good and safety working conditions for employees.*
- *Protected employees from all forms of possibility that endanger the safety and health in workplace.*
- *Gave employees a right to assemble and association in accordance with applicable legislation.*
- *Provide opportunities for employees to participate in education, training and further development in line with relevant competence and in accordance with the Company's needs both present and future.*
- *Ensured that employees received remuneration schemes, generally follow the applicable rules / regulations and in accordance with company's ability.*
- *Provide incentives and performance bonuses to employees based on performance.*
- *Board of Directors has full authority to act in strict accordance with applicable provisions and regulations to uphold GCG principles to employees who are proven to cause restlessness, violating the norms of discipline of employees, and damaging conducive working atmosphere.*

Employees also have various obligations that must be fulfilled to the Company, among others:

- *Every personnel shall obey the Principal Civil Service Regulation, Company values and all regulations issued by the Company.*
- *Every personnel shall prioritize company interest which relates directly or indirectly with their responsibilities.*
- *Every personnel shall mobilize all resources and efforts in implementing the job tasks entrusted to them.*
- *Every personnel shall maintain the property and good name of the Company.*
- *Every personnel who became a supervisor shall develop and provide an example of employees in work environment.*

False Statement, False Claims, and Conspiracy

Whole range of BKI related to marketing tasks, drawing approval, execution of survey and inspection, certification process, the making of contracts / agreements and financial administration including accounting, have realized the importance of making an accurate statement, and right claim to the Chairman, Government or to any other party. This includes any verbal or written statement submitted to the other party or used by the Company. Intentionality in submitting a statement or claim that is untrue or misleading or which involve any conspiracy with others to harm the other party could result in administrative punishment, criminal, civil liability for the relevant personnel and other parties involved, including partners of the Company and its employees.

Benturan Kepentingan

BKI mendefinisikan benturan kepentingan sebagai situasi terjadinya pertentangan kepentingan pribadi Dewan Komisaris, Direksi, atau karyawan dengan kepentingan Perusahaan. Benturan ini dapat melibatkan kepentingan pemakai jasa, instansi lain yang berkepentingan dengan jasa BKI, rekanan, karyawan (pensiunan, aktif, atau calon karyawan) atau bahkan anggota masyarakat di tempat Perusahaan beroperasi.

Terdapat dua prinsip utama yang telah diikuti untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya:

- Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dan atau untuk kepentingan orang dan atau pihak lain yang terkait.
- Menghindari setiap aktivitas di luar dinas yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan; aktivitas dimaksud tentunya merupakan aktivitas yang dapat bertentangan dengan kinerja jabatan atau yang dapat merugikan citra dan reputasi Perusahaan.

Benturan Kepentingan dalam Keputusan Hasil Survey / Inspeksi

BKI sebagai Perusahaan yang memprioritaskan aspek keselamatan telah menyadari bahwa hasil survey, laporan, dan sertifikat yang diterbitkan mempunyai implikasi terhadap aspek keselamatan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain pemilik kapal, pemilik cargo, asuransi, galangan, penumpang, awak kapal, Pemerintah, dan masyarakat umum secara luas. Untuk itu seluruh jajaran Direksi, para Kepala Divisi, Kepala Satuan, Kepala Unit Produksi dan Wakilnya, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Surveyor, Inspektor dan staf teknik Kantor Pusat selalu menjaga independensinya dalam pengambilan keputusan, memberikan rekomendasi, keputusan hasil survey, dan pembuatan laporan. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka pertimbangan aspek keselamatan adalah mutlak menjadi prioritas utama dengan mengacu peraturan dan regulasi yang berlaku.

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan Karyawan tidak boleh berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu Perusahaan dimana yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan mempunyai andil atau kepemilikan saham yang signifikan, atau mempunyai kepentingan finansial tertentu. Adapun yang dimaksud dengan berpartisipasi dalam proses pengadaan adalah:

Conflict of Interest

BKI defines a conflict of interest as a situation of conflict of personal interest for commissioners, directors, or employees with company interest. This conflict can involve interest of service users, other agencies concerned with BKI services, partners, employees (retired, active or prospective employees), or even members of community in which it operates.

There are 2 (two) main principles that have been followed to prevent conflict of interests and are often caused further implications:

- *Not utilize the function in office for personal benefit or for benefit of people and or other related party.*
- *Avoid any activity outside agencies that can influence negatively on the independence and objectivity in decision-making consideration. Activity is certainly an activity that may conflict with job performance or that could harm the image and reputation of the Company.*

Conflict of Interest in Survey / Inspection Decision

BKI as a company that prioritizes the safety aspect has realized that the survey results, reports and certificates issued have implications for safety aspects required by parties concerned, including ship owners, cargo owners, insurance, shipbuilding, passengers, crew, Government, and public. For that all Directors, Heads of Division, Head of Unit, Head of Production Unit and Deputy, Head of Department, Head of Division, Surveyors, Inspectors and Headquarters technical staff always maintain their independence in decision making, decision recommending the survey results and preparing reports. In the event of a conflict of interest, then consideration of safety absolutely becomes priority in accordance with applicable rules and regulations.

Conflict of Interest in Goods Procurement

Board of Commissioners, Directors, Management and Employees must not participate in any procurement activity involving the company where the individual or family concerned have an interest or significant share ownership or has certain financial interest. As it meant by participating in procurement process are:

- Mengundang, memberikan persetujuan, atau membahas pekerjaan di masa mendatang dengan kontraktor dan pemasok yang berkompetisi, yaitu setiap entitas usaha yang kemungkinan di masa mendatang dapat menjadi pesaing atau pemenang kontrak dari Perusahaan.
- Meminta atau menerima uang, pemberian / hadiah, atau hal-hal lain yang bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kontraktor dan pemasok yang berkompetisi.
- Berusaha untuk memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait dengan proses pengadaan, dan sebaliknya. Pemasok barang dan jasa/kontraktor yang diundang untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan harus memenuhi persyaratan menghindari benturan kepentingan yang sama sebagaimana yang diberlakukan pada Komisaris, Direksi, Manajemen dan karyawan Perusahaan.

Benturan Kepentingan dengan Aktivitas Sampingan

Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan karyawan dapat diizinkan melakukan aktivitas lain di luar jam kerja yang telah ditetapkan, dengan syarat bahwa aktivitas tersebut tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perusahaan dan atau aktivitas tersebut tidak menurunkan kemampuan untuk memenuhi tugas yang telah diamanatkan. Keterlibatan dalam aktivitas lain di luar Perusahaan tidak boleh mengurangi independensi dan objektivitas dalam mengambil keputusan atau mempengaruhi efektivitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan karyawan yang bersangkutan. Setiap karyawan harus menjunjung tinggi standar kinerja tanpa terkecuali dan sedapat mungkin bertindak objektif dan independen dalam setiap kegiatan sehari-hari. Apabila kemudian Direksi dan atau karyawan Perusahaan merasakan kemungkinan timbulnya benturan kepentingan dalam kegiatan yang dilaksanakan, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Direksi.

- Ada kemungkinan konflik kepentingan
- Kegiatan di luar perusahaan berasal dari pengetahuan yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kerja dalam perusahaan.
- Aktivitas di luar adalah kegiatan yang tumpang-tindih dengan jam kerja perusahaan.
- Kegiatan-kegiatan tersebut melebihi 6 (enam) jam kerja pada hari kerja tertentu atau lebih dari 20 (dua puluh) jam bekerja pada seminggu kerja tertentu.
- Dapat mengganggu kepentingan perusahaan, dan / atau tugas dan tanggung jawab karyawan tersebut.

- *Invite, give approval or discuss future employment with contractors and suppliers who compete, which is any business entity which that in the future can be a competitor or winning a contract from the company.*
- *Solicit or accept money, gift or other things of value, either directly or indirectly from competing contractors and suppliers.*
- *Try to obtain or disclose information related to the procurement process and vice versa. Suppliers of goods and services (contractors) who are invited to participate in the procurement process must meet the requirements to avoid conflicts of similar interest as that imposed on Board of Commissioners, Directors, management and employees.*

Conflict of Interest by Side Activities

Board of Commissioners, Directors, management and employees may be allowed to do other activities outside working hours determined by the requirement that such activities do not cause conflict of interests with company interest and / or the activity does not reduce the ability to fulfill the tasks that have been mandated. Involvement in other activities outside the Company may not reduce the independence and objectivity in making decision or influence the effectiveness and timeliness of work completion of those employees. Each personnel must uphold the standards of performance, without exception, and wherever possible to act objectively and independently in each of their daily activities. If then the Directors and / or employees of the company felt the possibility of conflict of interest in activities conducted, then the concerned shall notify it in writing to Board of Directors. The allowance to perform sideline activities must be submitted and approved by appointed authorized officer before the relevant employees run jobs or consultancy activities after work in the event of one or more of the following:

- *There is a possibility of conflict of interest.*
- *The activities outside the company come from the knowledge gained both directly and indirectly with the work within the company.*
- *Outside activities are activities that overlap with company working hours.*
- *Such activities exceed 6 (six) hours of work on a particular workday or more than 20 (twenty) hours of work on a particular work week.*
- *May interfere the company interest and / or duties and responsibilities of those employees.*

Permohonan izin untuk melakukan aktivitas sampingan harus disampaikan dan mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang yang ditunjuk sebelum karyawan yang bersangkutan menjalankan pekerjaan sampingan tersebut atau melakukan kegiatan konsultansi selepas kerja apabila terjadi salah satu atau lebih dari beberapa hal-hal berikut:

- Terdapat kemungkinan benturan kepentingan.
- Aktivitas luar dinas tersebut merupakan hasil pengetauan yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pekerjaan di Perusahaan.
- Aktivitas luar dinas tersebut merupakan aktivitas yang tumpang tindih dengan hari dan jam kerja Perusahaan.
- Aktivitas tersebut melebihi enam jam kerja pada suatu hari kerja tertentu atau lebih dari 20 jam kerja pada minggu kerja tertentu.
- Dapat mengganggu kepentingan Perusahaan dan atau tugas dan tanggung jawab pokok karyawan yang bersangkutan.

Penyelewengan, Penyimpangan dan Sejenisnya

Perusahaan telah menetapkan kebijakan untuk melarang setiap bentuk penyelewengan dan penyimpangan serta senantiasa menerapkan prosedur yang wajib ditaati dan diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap kecurigaan adanya penyelewengan dan penyimpangan.

Penyelewengan dan penyimpangan yang dimaksud adalah:

- Pelanggaran terhadap peraturan Perusahaan.
- Melakukan ketidakjujuran atau kebohongan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan.
- Melakukan penggelapan, penghilangan, atau pemindahtempahan segala sesuatu yang dapat merugikan Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Melakukan pemalsuan atau manipulasi surat berharga Perusahaan seperti cek, giro, sertifikat, dan lain-lain.

Menyalahgunakan asset Perusahaan.

- Melakukan pengalihan kas, surat berharga atau asset Perusahaan untuk penggunaan atau keuntungan pribadi.

Melakukan penanganan dan pelaporan transaksi bisnis dan keuangan Perusahaan yang tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

- Melakukan pemalsuan atas catatan akuntansi Perusahaan atau laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang merugikan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

Applications for permission to perform a sideline activity must be submitted and approved by the competent authority prior to the employee's designated run the second job or consultancy activities after work in case one or more of the following few things:

- *There is a possibility of conflict of interest.*
- *Activities outside the agency is the result of knowledge acquired either directly or indirectly with the Company's work.*
- *Activities outside the agency are activities that overlap with the Company working day.*
- *Activities that exceed six hours a day working on a particular job or work more than 20 hours in a particular workweek.*
- *Can interfere with the interests of the Company and or duties and responsibilities of the employee concerned.*

Fraud, irregularities and its kinds

The Company has established a policy to prohibit any form of fraud and irregularities and continue to implement procedures that must be obeyed and followed related to finding, recognition, reporting, inquiry and investigation on suspicion of fraud and irregularities.

Fraud and irregularities referred are:

- *The violation of company rules.*
- *Conduct of dishonesty or deceit related to job duties.*
- *Conduct fraud, omission, or alienation of everything that could hurt the company directly or indirectly.*
- *Conduct fraud or manipulation of company's securities such as checks, demand deposits, certificates and others.*
- *Abuse of company assets.*
- *Transfer cash, securities or assets of the company for personal use or interest.*
- *Conduct the handling and reporting of business and financial transaction of the company that do not comply with the procedures and regulations.*
- *Perform falsification of accounting records or Company's financial statement for personal interests or other interests that can harm the company either directly or indirectly.*

Kinerja Keuangan

Financial Performance

Laporan keuangan konsolidasi BKI yang telah diaudit dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laba Rugi Pendapatan

Pendapatan Usaha perusahaan pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 25,47% dibandingkan dengan tahun 2011. Kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan usaha berasal dari pertumbuhan pendapatan segmen Klasifikasi & Statutoria sebesar 27,19% dan pendapatan segmen Konsultansi & Supervisi sebesar 22,35%.

Pendapatan netto tahun 2012 sebesar Rp 419,176 miliar atau 0,52% di atas anggarannya Rp 417 miliar.

Beban Usaha

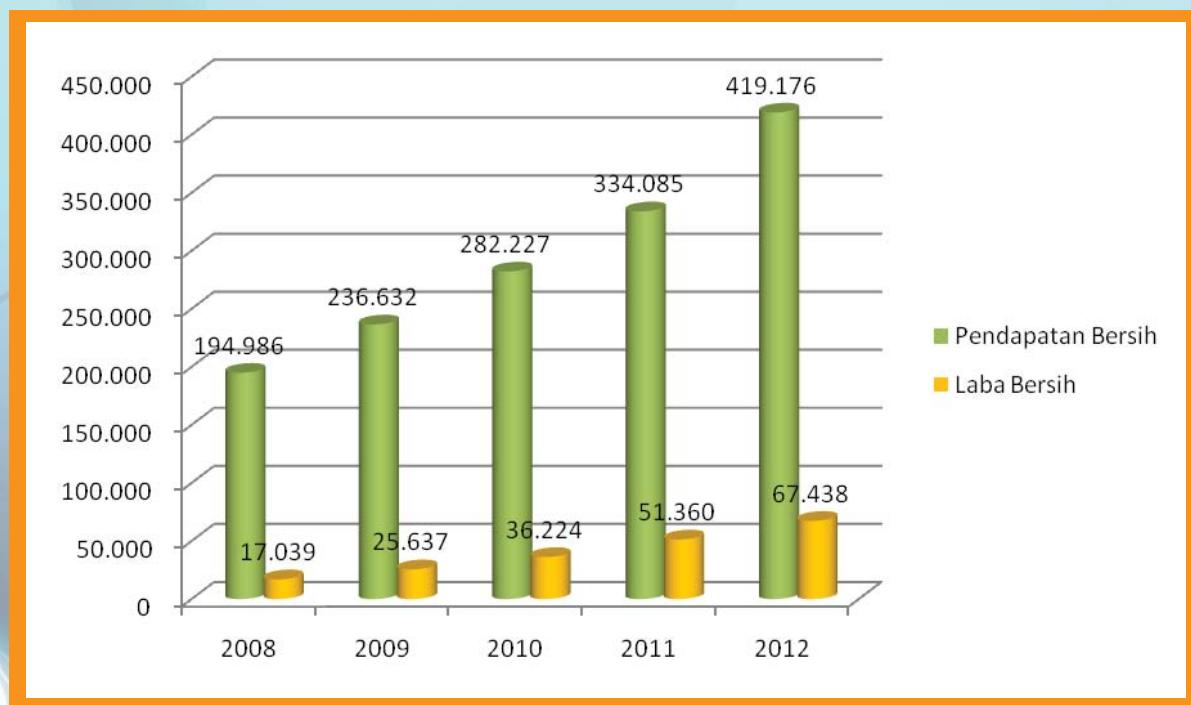
Realisasi beban usaha tahun 2012 sebesar Rp 330,865 miliar atau 0,90% di atas anggarannya sebesar Rp 327,930 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 23,78% dibandingkan tahun 2011.

Laba Usaha

Realisasi laba usaha mencapai Rp 88,311 miliar atau 0,85% di bawah anggarannya sebesar Rp 89,070 miliar. Pertumbuhan laba usaha perusahaan pada tahun 2012 mencapai 32,23% dibandingkan laba usaha pada tahun 2011. Sehingga laba bersih setelah pajak mencapai Rp 67,438 miliar atau tumbuh 31,30% dari laba bersih tahun 2011.

Operating Ratio sebesar 78,93% atau 0,29% di bawah anggaran sebesar 78,64%.

Grafik : Net Revenue (2008-2012) Net Profit (2008-2012)



BKI consolidated financial statement already audited in this Annual Report shall be prepared based on the generally applicable accountancy standards in Indonesia.

Profit Loss Revenue

The company's operating revenue in 2012 increases by 25.47% compared to 2011. Contribution to revenue growth comes from Classification & Statutory segment by 27.19% and Consultation & Supervision segment by 22.35%.

Net income in 2012 amounted Rp 419.176 billion or 0.52% above its budget of Rp 417 billion.

Operating Expenses

Realization of operating expenses in 2012 is Rp 330.865 billion or 0.90% below its budget of Rp 327.930 billion and increases by 23.78% compared to 2011.

Operating Income

Realization of operating profit is Rp 88.311 billion 0.85% below its budget of Rp 89.070 billion. The growth of company's operating profit in 2012 reaches 32.23% compared to 2011. Therefore, earning after tax reaches Rp 67.438 billion or grows 31.30 % compared to 2011.

Operating Ratio is 78.93% or 0.29% below its budget of 78.64%.

2. Rasio Keuangan

a. Rasio Likuiditas

- Rasio lancar tahun 2012 sebesar 308,94% lebih tinggi dari rasio lancar tahun 2011 sebesar 293,33%.
- Rasio kas tahun 2012 sebesar 113,65% dan tahun 2011 sebesar 97,30%. Ini menunjukkan ada peningkatan dalam penyediaan kas untuk pembiayaan operasional dan atau pembayaran kewajiban jangka pendeknya.

b. Solvabilitas

Total Debt to Equity Ratio tahun 2012 sebesar 30,91% dan tahun 2011 sebesar 32,98%. Mengingat hutang yang ada tidak menimbulkan beban bunga (hanya hutang transaksi operasi / dagang), maka adanya hutang tersebut sangat mendukung dalam penyediaan modal kerja serta berpeluang meningkatkan laba perusahaan.

c. Return on Investment Ratio (ROI)

Return on Investment Ratio tahun 2012 sebesar 38,21% dan tahun 2011 36,04%.

d. Aktivitas

• Total Asset Turn Over

Perputaran asset pada tahun 2012 untuk meraih pendapatan adalah sebesar 1,58 kali atau naik 0,06 kali dari TATO tahun 2011 sebesar 1,52 kali.

• Collecting Period

Rata-rata hari pencairan piutang tahun 2012 selama 96 hari atau 7 hari lebih lambat dari tahun 2011 sebesar 89 hari.

Dari rasio-rasio di atas terlihat bahwa likuiditas Perusahaan tahun 2012 meningkat dibandingkan dengan tahun 2011. Hal ini disebabkan upaya melakukan efisiensi dalam menggunakan dana untuk membiayai operasional dan investasi. Ditinjau dari solvabilitas menunjukkan kondisi financial Perusahaan cukup aman dengan hutang-hutangnya dijamin modal sendiri serta Perusahaan mampu meningkatkan laba.

2. Financial Ratio

a. Liquidity Ratio

- *Current ratio is 308.94% which higher than current ratio in 2011 (293.33%).*
- *Cash ratio is 113.65% in 2012 and 97.30% in 2011. This shows that there is increase in available cash for operational financing and or short term liabilities payment.*

b. Solvability

Total Debt to Equity Ratio in 2012 is 30.91% and in 2011 was 32.98%. Considering that the existing loans do not accrue interest expense (only operating / commercial transaction loans), they will really support in making working capital available and providing opportunity to increase company's profit.

c. Return on Investment Ratio (ROI)

Return on Investment Ratio in 2012 is 38.21% and in 2011 is 36.04%.

d. Activities

• Total Asset Turn Over

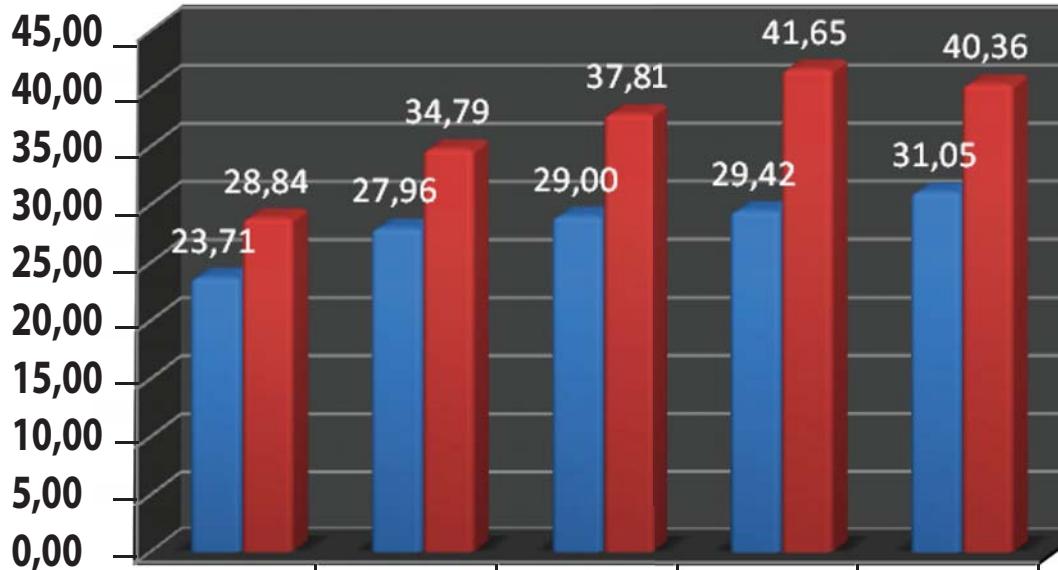
Total Asset Turn Over in 2012 to reach company's income is 1.58 times, decreasing from 2011 which was 1.52 times.

• Collecting Period

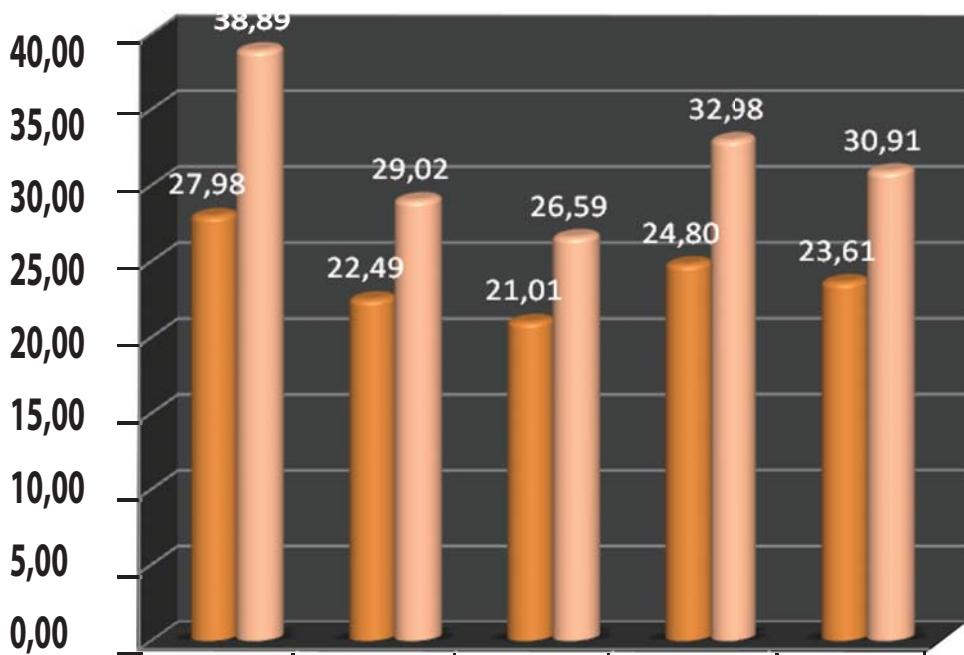
Collecting period in 2012 is 96 days or 7 days slower than in 2011 which was 89 days.

From the above ratios, it seems that company's liquidity in 2012 increases compared to 2011. This result from the efforts to utilize fund in more efficient way for operational and investment. Reviewed from solvability aspect, it is considered that the financial condition of the company is sufficiently safe because the company's loans are equity secured and company can increase its income.





Total Debt to Total Asset (2008-2012)
Debt to Equity Ratio (2008-2012)



3. Tingkat Kesehatan Perusahaan

Kriteria penilaian Perusahaan didasarkan pada SK Menteri Negara BUMN RI no. Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002. Materi yang dinilai mencakup :

- Aspek keuangan
- Aspek operasional
- Aspek administrasi

3. Company's Health Level

Criteria used to evaluate company's health level is in accordance with Decree of State Minister for SOE no. Kep-100/MBU/2002 dated 4 June 2002. The materials to be evaluated include :

- Financial aspect*
- Operational aspect*
- Administrative aspect.*

Summary of Balance Sheet

in million rupiah

No	Description	2008	2009	2010	2011	2012
I	ASSETS					
1	Current Assets	58.094	67.338	98.429	152.024	186.003
2	Fixed Assets	45.812	59.299	66.687	77.549	115.036
3	Other Assets	1.821	1.686	2.011	2.720	3.141
	TOTAL ASSETS	105.727	128.323	167.127	232.293	304.180
II	LIABILITIES					
1	Short Term Liability	26.466	24.992	30.195	51.827	60.207
2	Long Term Liability	3.139	3.957	4.913	5.780	11.608
3	Equity	76.122	99.373	132.019	174.686	232.365
	TOTAL LIABILITIES	105.727	128.323	167.127	232.293	304.180

Summary of Income

in million rupiah

No	Description	2008	2009	2010	2011	2012
I	Net Income					
A	Classification	119.389	147.758	180.036	215.442	274.011
B	Consultancy & Supervision	75.597	86.597	102.191	118.643	145.165
	Total (I)	194.986	234.355	282.227	334.085	419.176
II	Operation Expenses					
A	Service Expense	122.951	136.369	162.608	193.983	76.527
B	Marketing Expense	3.408	3.934	4.969	5.004	5.996
C	Administration & Overhead	43.972	59.203	66.940	68.310	248.342
	Total (II)	170.331	199.506	234.518	267.297	330.865
III	Net Operation Income (I-II)	24.655	37.127	47.709	66.788	88.311
IV	Other Incomes (Expenses)	414	(1.276)	752	1.555	6.147
V	Profit Before Tax	25.069	35.850	48.461	68.343	94.458
VI	Tax	(8.031)	(10.213)	(12.237)	(16.983)	(27.020)
VII	Profit After Tax	17.039	25.637	36.224	51.360	67.438



Financial Ratio

No	Description	2008	2009	2010	2011	2012
I	PROFITABILITY					
	ROA	23,71	27,96	29,00	29,42	31,05
	ROE	28,84	34,79	37,81	41,65	40,36
	Operating Ratio (%)	87,36	84,11	83,10	80,01	78,93
	Net Profit Margin (%)	8,80	10,84	12,84	15,37	22,53
II	ACTIVITY					
	Collecting Period (days)	75	72	77	89	96
	Fixed Assets Turnover (x)	4,26	4,08	4,34	4,31	3,64
III	LIQUIDITY					
	Current Ratio	219,50	270,56	325,98	293,33	308,94
	Cash Ratio	43,00	59,41	117,01	97,30	113,65
IV	CAPITALIZATION					
	Total debt/Total Asset (%)	27,98	22,49	21,01	24,80	23,61
	Debt/Equity (%)	38,89	29,02	26,59	32,98	30,91

Key Performance Indicator (KPI) year 2012

No	IPK	Formula	Satuan	Bobot	Target	Real.	Skor
PERSPEKTIF KEUANGAN							
1.	Tingkat kesehatan perusahaan	Kep-100/MBU/2002	Skor	5	100	96,50	4,65
2.	Opini auditor independen	Standar Pemeriksaan Akuntan Publik	Opini	5	WTP	WTP	5,00
3.	Return On Asset	Laba sebelum pajak / Total Aset	%	3	32,30	31,05	2,77
4.	Profit margin	Laba sebelum pajak / Pendapatan bersih	%	3	21,33	22,53	3,42
5.	Rasio operasi	Beban usaha/pendapatan usaha	%	3	78,64	78,93	2,98
6.	Kolektibilitas Piutang	Piutang tahun lalu tertagih tahun ini / jumlah piutang tahun lalu	%	4	75	89,12	5,88
7.	Pertumbuhan pendapatan usaha	Pendapatan usaha tahun ini / pendapatan usaha tahun lalu	%	2	120,00	125,47	2,23
	Sub Total			25			26,93
PERSPEKTIF PELANGGAN							
1.	Tingkat kepuasan pelanggan	Index Survey CSM	Index	4	100	100	4,00
2.	Produksi Klasifikasi	Realisasi Produksi Klas	Point	8	214.843.478	221.994.642	8,67
3.	Produksi KS	Realisasi / Target	Mandays	6	157.000	145.165	5,10
4.	Penambahan klas berlaku	Realisasi / Target	Kapal	4	536	1.978	8,00
5.	Penambahan customer KS untuk nilai kontrak > Rp 50 Jt	Realisasi / Target	Customer	3	20	22	3,75
	Sub Total			25			29,52
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL							
1.	Kinerja PKBL	Jumlah dana yang disalurkan / jumlah dana yang tersedia	%	3	100	91,65	2,50
	• Efektifitas penyaluran						
	• Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman	Rata2 tertimbang kolektibilitas pinjaman kemitraan / jumlah pinjaman yang disalurkan	%	3	75	77,89	3,29
2.	Penyempurnaan blue print / struktur organisasi dan job description	Memenuhi pengarahan Dewan Komisaris	Keputusan Direksi	5	1	1	5,00
3.	Penyerapan belanja modal	Realisasi / Anggaran	%	1	100	71,33	0,47
	• Program tercapai						
	• Fisik tercapai						
4.	Pengembangan rules / regulation	Penyempurnaan rules hasil riset mandiri tahun 2012	Rules	2	1	2	2,00
	Sub Total			15			15,03

PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN							
1.	Peningkatan kualitas SDM	Program Diklat Utama	Program Diklat	1	29	26	0,79
2.	Penyempurnaan kebijakan KPI Direksi, Unit Kerja dan Individual	Buku Pedoman	Keputusan Direksi	1	1	1	1,00
3.	Implementasi penilaian KPI	IPK individu Direksi dan kepala unit kerja	%	1	100	100	1,00
4.	Penyusunan master plan SDM	Buku Pedoman	Keputusan Direksi	2	1	0	0,00
5.	Penyusunan kebijakan manajemen risiko	Buku Pedoman	Keputusan Direksi	1	1	0	0,00
6.	Tingkat pengendalian risiko / mitigasi risiko	Realisasi / Target	Cabang Utama	1	5	0	0,00
7.	Penyusunan master plan IT	Buku Pedoman	Keputusan Direksi	2	1	0	0,00
8.	Tercapainya kenaikan	Maksimal 20%	Keputusan	1	15-20%	20%	1,00

Dewan Komisaris, Direksi dan Staf Board of Commissioner, Director & Staff

Board of Commissioner

Chairman
Commissioner

: Machfud Sidik
: Erwin Rosmali
Faisal Halimi
Minto Widodo

Board of Director

President Director
Technical & Operating Director
Marketing & Deployment
Finance & Personnel Director

: Ibnu Wibowo
: Iman Satria Utama
: Ibrahim Gause
: Anang Sundana

Senior Vice President (SVP)

SVP of Ship Admission
SVP of Ship In Service
SVP of Marine & Industrial
SVP of Asset Management

: Hadi Sutrisno
: Zilzal HM
: Yansen Miri
: Pryo Santosa



Vice President (VP)

Corporate Secretary (VP)
VP of Internal Audit
VP of R&D Center
VP of Quality Assurance
VP of Machinery & Electrical Division
VP of Statutory Division
VP of Hull Division
VP of Oil & Gas Unit
VP of Finance Division
VP of General Affairs Division

: Saifuddin Wijaya
: Asep Sutrisna Sumirat
: Agus Widjaja
: Jeffrey B. Massie
: Sugeng Yulianto
: Arief Budi Permana
: Rachmady S.
: Abdul Ghofar
: Taufik Hidayat
: Nasaruddin

Branch VP and Manager

VP of Tanjung Priok Main Branch
VP of Surabaya Main Branch
VP of Batam Main Branch
VP of Samarinda Main Branch
Deputy VP of Tanjung Priok Main Branch
Deputy VP of Surabaya Main Branch
Deputy VP of Batam Main Branch
Deputy VP of Samarinda Main Branch
Manager of Singapore Middle Branch
Manager of Belawan Middle Branch
Manager of Cilegon Middle Branch
Manager of Semarang Middle Branch
Manager of Palembang Middle Branch
Manager of Banjarmasin Middle Branch
Manager of Pekanbaru Branch
Manager of Jambi Branch
Manager of Cirebon Branch
Manager of Bitung Branch
Manager of Makassar Branch
Manager of Pontianak Branch
Manager of Ambon Branch
Manager of Sorong Branch

: Mochammad Cholil
: Imam Kusnandar
: Nurdin Gading
: Bambang Noeljanto
: Yunasri Zainal
: Beni Hermawan
: Edy Sutrisno
: Farid Rahman Rahim
: Arief Nurtjahjo
: Endro Djoko S.
: Acep Subarkah
: Alfonsus Susilarso
: Syamsul Bahri
: Suwandi
: Andi Solihin Rizal
: Syarif Nuhung
: Manggarseta Djatnika
: Bambang Riyanto
: Muhammad Idi
: Azhar
: Ahmad Rifaid
: Misbahudin Aidy

Marine & Industrial (M & I) Unit

VP of Marine & Industrial Unit Jakarta
Manager of Inspection M & I Unit Jakarta
Manager of Testing M & I Unit Jakarta
Manager of Marine M & I Unit Jakarta
Manager of Marine & Industrial Unit Batam
Manager of Marine & Industrial Unit Surabaya
Manager of Marine & Industrial Unit Balikpapan
Manager of Marine & Industrial Unit Pekanbaru

: Arsalan Latief
: Rima N. Bangun
: Yudas Pasomba
: Siswanto
: Budiman
: Yunan Hilmi
: Rusdin Haluddin
: Hendra Kesuma



Komite Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)

The Biro Classification Indonesia Committee

Adalah komite yang terdiri dari wakil dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan jasa BKI meliputi : shipowner, industri maritim, asuransi, perguruan tinggi dan pejabat pemerintah. Komite ini secara periodik mengadakan pertemuan dan memberikan masukan-masukan kepada manajemen BKI terhadap segala permasalahan yang berkembang, dukungan dan konsultansi dalam rangka kemajuan usaha BKI dan peningkatan pelayanan jasa.

SUSUNAN PENGURUS KOMITE

KETUA	: Johson W. Sutjipto
SEKRETARIS	: Saifuddin Wijaya

KOMITE TEKNIK

KETUA	: Budhi Halim
SEKRETARIS	: Saifuddin Wijaya
ANGGOTA	: DR. Aries Sulisetyono - M. Firmansyah Arifin - Tjahjono Roesdianto - Ir. Sunaryoko - Ir. Romi Lesmana - Dr. Ir. Ganding Sitepu, Dipl-Ing - Budi Halim - Ooi Ka lok - DR. R.O. Saut Gurning - Capt. Abdul Rochman - Ir. Sugeng Yulianto - Ir. Agus Salim - Capt. Asmari Herry - Prof. DR.- Ing. M. Yamin Jinca - Ir. Salvinus Patangke - Prof. Ir. Soegiono - Widihardja Tanudjaja - Luki Lestiwati - Prof. Ir. Eko Budi Djatmiko M.Sc Ph.D - Ir. Agung Wicaksono

KOMITE KLASIFIKASI

KETUA	: Bimo Wicaksono
SEKRETARIS	: Ir. Zilzal HM
ANGGOTA	: Capt. Yan Risuandi, MSc - M. Yudhie R.F - Frank Menaro - Johnson W. Sutjipto - Jussabella Sahea - Danang S. Baskoro - Bimo Wicaksono - Amir Gunawan - Ir. Eko Wari Santoso - L. Sudjatmiko - Sjarifuddin Mallarangan - Sugiman Layanto - Teddy Yusaldi - Paulis A. Djohan - Ir. Rachmady

Kerjasama Cooperation

Statutoria

Government	Type of Cooperation
Government of Republic of Indonesia (Sea Communication)	Authorization
Government of Mongolia (Mongolia Maritime Administration / MMA)	Authorization

Classification

Classification Bureau	Type of Cooperation
American Bureau of Shipping (ABS-USA)	Dual Class
Bureau Veritas (BV-France)	Dual Class
China Classification Society (CCS-China)	Mutual Representative
Det Norske Veritas Classification AS (DnV-Norway)	Dual Class
Germanischer Lloyd (GL-Germany)	Mutual Representative
Hellenic Register of Shipping (HRS-Greece)	Mutual Representative
Indian Register of Shipping (IRS-Indian)	Mutual Representative
International Register of Shipping (IRS)	Mutual Representative
Korean Register of Shipping (KRS)	Mutual Representative
Korean Classification Society DPR of Korea (KCS-DPR of Korea)	Mutual Representative
Lloyd's Register of Shipping (LR-UK)	Dual Class
Nippon Kaiji Kyokai (NK-Japan)	Mutual Representative
Rinave Portuguesa (Portugal)	Mutual Representative
Ships Classification Malaysia (SCM-Malaysia)	Mutual Representative
China Cooperation of Shipping (CCS)	Mutual Representative
Vietnam Register (VR-Vietnam)	Mutual Representative
Italian Register of Shipping (RINA)	Dual Class

Consultancy & Supervision

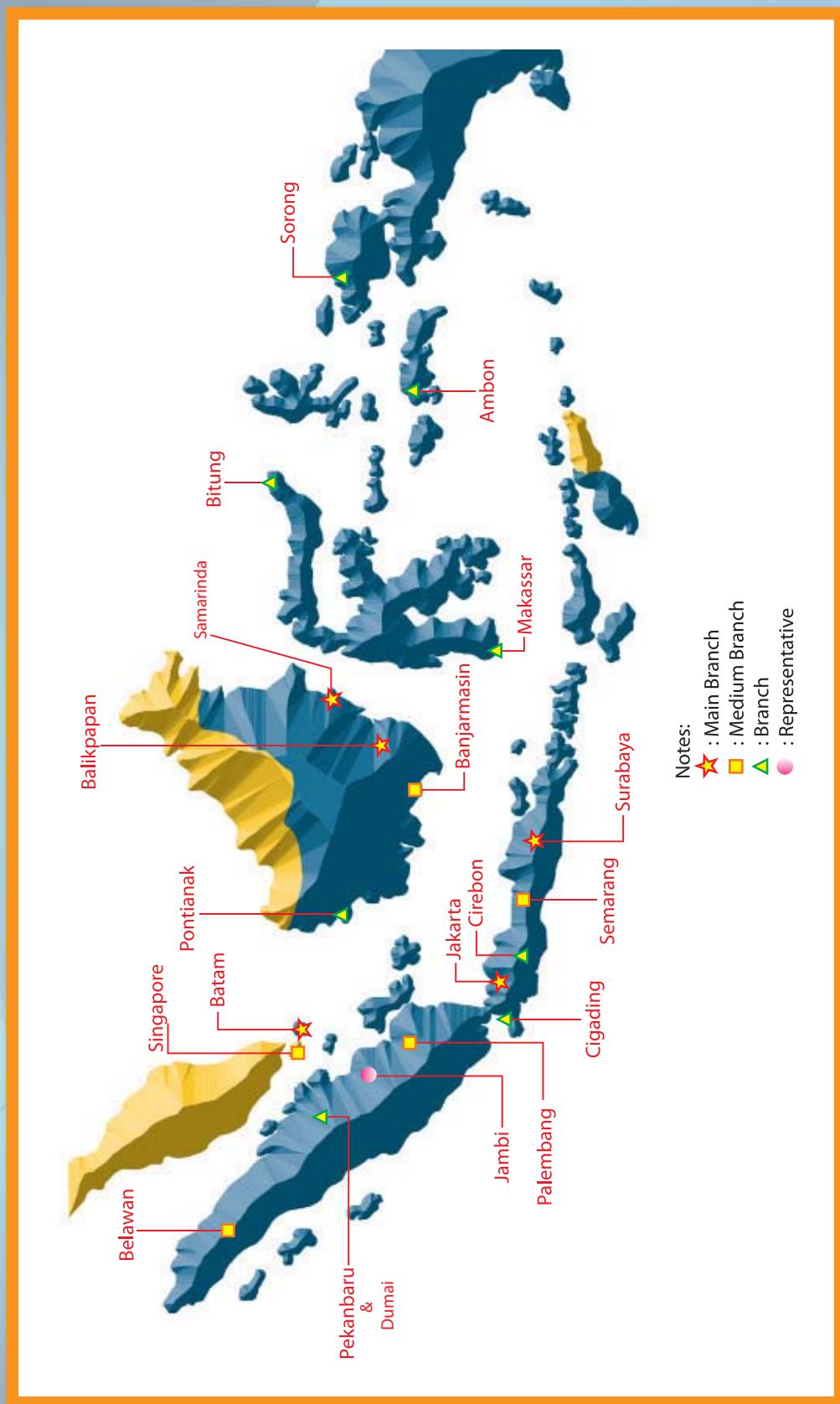
Organization	Type of Cooperation
Det Norske Veritas (DnV-Norway)	Offshore Services
Korean Register of Shipping (KRS-ROK)	Industrial Inspection
TUV Rheinland (Germany)	Industrial Inspection
TUV Nord (Germany)	Industrial Inspection
Germanischer Lloyd (GL Germany)	Industrial Inspection
PT. ASDP	-Ship Maintenance Supervision -Employee Education & Training
PT. PELINDO I	
Metal Performance Assessment Group (MPAG)	Engineering Consulting
PT. Dirgantara Indonesia	HRD and Testing Laboratory
Insurance Consortium	Assets Protection Insurance Program
PT. Enggong Sayap Perkasa (ESP)	Inspection & NDT In Oil and Gas Sector

Research & Development

Institution
Technological Development & Application Agency (BPPT)
Centre of Oil and Natural Gas Energy Development (PPT MIGAS)
Office of Technical Materials and Objects Research and Development (B4T)
National Atomic Energy Body (BATAN)
Research Laboratory of ITB (LAPI ITB)
Institute of Technology Sepuluh Nopember Surabaya (ITS)
University of Hasanuddin (UNHAS)
University of Indonesia (UI)
Indonesian Corrosion Association



Jaringan Oprasional Operational Network



Daftar Kontak

List of Contact

Ambon

Address : Jl. Raya Pelabuhan, Komplek Pelabuhan, Ambon 97216
Telephone : (0911) 349607
Facsimile : (0911) 352745
E-mail : bkiab@klasifikasiindonesia.com

Balikpapan

Address : Jl. MT. Haryono No. 8 Ring Road Balikpapan 76111
Telephone : (0542) 876637, 876641, 876642, 876643
Facsimile : (0542) 876639, 876645
E-mail : bkibp@klasifikasiindonesia.com

Banjarmasin

Address : Jl. Skip Lama No. 19 Banjarmasin 70117
Telephone : (0511) 3350175, 3358311, 3350893
Facsimile : (0511) 3350175
E-mail : bkibj@klasifikasiindonesia.com

Batam

Address : Graha BKI Jl. Yos Sudarso Kav. 5, Batam 29421
Telephone : (0778) 433388, 429023-24, 451288
Facsimile : (0778) 429020, 429021
E-mail : bkibm@klasifikasiindonesia.com

Belawan

Address : Jl. Veteran No. 218, Belawan 20411
Telephone : (061) 6941025, 6941276, 6941157
Facsimile : (061) 6941276
E-mail : bkibn@klasifikasiindonesia.com

Bitung

Address : Jl. Babe Palar No. 53, Madidir Unet, Bitung 95516
Telephone : (0438) 38720, 38721
Facsimile : (0438) 21282
E-mail : bkibt@klasifikasiindonesia.com

Cigading

Address : Jl. Gerem Raya No. 1 KM 5, Pulau Merak, Cilegon 42438
Telephone : (0254) 573955, 573417
Facsimile : (0254) 571007
E-mail : bkicg@klasifikasiindonesia.com

Cirebon

Address : Jl. Tuparev KM 3, Cirebon 45153
Telephone : (0231) 205266
Facsimile : (0231) 205266
E-mail : bkicn@klasifikasiindonesia.com



Dumai

Address : Jl. Arifin Ahmad No. 40 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru 28282
Telephone : (0761) 7662160, 7662170
Facsimile : (0761) 7662180
E-mail : bkidm@klasifikasiindonesia.com

Jambi

Address : Jl. Raden Bahrun No. 11 RT 11 RW 04 Kel. Sungai Putri Kec. Telanai Putra Jambi
Telephone : (0741) 671107
Facsimile : (0741) 671108
E-mail : bkijb@klasifikasiindonesia.com

Makassar

Address : Jl. Sungai Cerekang No. 28 Makassar 90115
Telephone : (0411) 311993, 315460
Facsimile : (0411) 315460
E-mail : bkims@klasifikasiindonesia.com

Palembang

Address : Jl. Perintis Kemerdekaan, 5 Ilir, Palembang 30115
Telephone : (0711) 713171, 717151, 713712, 713680
Facsimile : (0711) 713173
E-mail : bkipb@klasifikasiindonesia.com

Pekanbaru

Address : Jl. Arifin Ahmad No. 40 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru 28282
Telephone : (0761) 7662160, 7662170
Facsimile : (0761) 7662180
E-mail : bkipr@klasifikasiindonesia.com

Pontianak

Address : Jl. Gusti Hamzah No. 211, Pontianak 78116
Telephone : (0561) 739579, 743107
Facsimile : (0561) 739579, 743107
E-mail : bkipk@klasifikasiindonesia.com

Semarang

Address : Jl. Pamularsih No. 12 Semarang 50148
Telephone : (024) 7610399, 7610744
Facsimile : (024) 7610422
E-mail : bkism@klasifikasiindonesia.com

Singapore

Address : 150 Changi Road #02-01 Aguthrie building – Singapore 419973
Telephone : (065) 68830651, 68830643, 68830634
Facsimile : (065) 63393631
E-mail : bki_sb@pacific.net.sg



Surabaya

Address : Jl. Kalianget No. 14, Surabaya 60165
Telephone : (031) 3295448, 3295449, 3295450, 3295451, 3295465
Facsimile : (031) 3294520, 3205451
E-mail : bkisb@klasifikasiindonesia.com

Sorong

Address : Jl. Jenderal Sudirman No. 140, Sorong 98414
Telephone : (0951) 322600
Facsimile : (0951) 323870
E-mail : bkisr@klasifikasiindonesia.com

Tanjung Priok

Address : Jl. Yos Sudarso 38-39-40, Tanjung Priok, Jakarta 14320
Telephone : (021) 4301017-18-19, 4301703, 4300993, 4353291-92, 43933021
Facsimile : (021) 4301702, 497020
E-mail : bktp@klasifikasiindonesia.com

Marine & Unit Jakarta

Address : Jl. Yos Sudarso 38-39-40, Tanjung Priok, Jakarta 14320
Telephone : (021) 4301017-18-19, 4301703, 4300993, 4353291
Facsimile : (021) 43900972, 4300139
E-mail : bkiks@klasifikasiindonesia.com

Samarinda

Address : Jl.Cipto Mangunkusumo No. 10
 Ruko Kapak Indah
Telephone : (0541) 261 423, 261 419
Facsimile : (0541) 261 425
E- Maile : opski.bp@Klasifikasiindonesia.com



PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL REPORT

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 1 Maret 2012
(Dengan angka perbandingan untuk tahun yang berakhir 1 maret 2011)

Beserta
Laporan Auditor Independen

ANNUAL REPORT 2012

2012

LAPORAN KEUANGAN

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
DISERTAI LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**



PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero)

Address : Jl. Yos Sudarso 38-40 Tanjung priok ,Jakarta-14320, INDONESIA
Phone : (62-021) 4301017, 4301703, Fax : (62-021) 43936175, 4391973, PO.BOX: 1010/JKU
E-mail : bki@klasifikasindo.com, Website : www.klasifikasindo.com

DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Auditor Independen

Pernyataan Direksi

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan	1-2
Laporan Laba Rugi Komprehensif	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Calatan alas Laporan Keuangan	6-39



Nomor : LAI/GA/13029

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Perserib)

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2012 serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern. Laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern adalah tanggung jawab Manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern berdasarkan audit kami. Laporan keuangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2011 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 2 Maret 2012 berisi pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" atas laporan keuangan tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu, audit mencakup pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap kontrak, persyaratan bantuan, dan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan serta kepatuhan terhadap pengendalian intern. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2012, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seperti yang diungkapkan pada Catatan 27 atas laporan keuangan, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di tahun buku 2012 secara retrospektif. Oleh karena itu, Laporan Keuangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2011 serta Laporan Posisi Keuangan (Neraca) tanggal 1 Januari 2011/31 Desember 2010 telah disajikan kembali.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah dengan laporan kami nomor: LAI/UU/13029 dan LAI/IC/13029 tanggal 8 Maret 2013.

Kantor Akuntan Publik
Husni, Mucharam & Rasidi

Arry Syarief Gunawan, CPA

Izin Praktik : AP.0085

Izin KAP : KEP-662/KM.17/1998

8 Maret 2013



PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero)

HEAD OFFICE

Address : Jl. Yos Sudarso No. 38 - 39 - 40, Tanjung Priok, JAKARTA - 14320, INDONESIA
Phone : (62 - 021) 4301017, 4301703, 4300993 Facsimile : (62 - 021) 43936175, 43901973
PO BOX : 1010/JKU
E-mail : bki@klasifikasiindonesia.com, Website : www.klasifikasiindonesia.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2012 dan 2011

PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

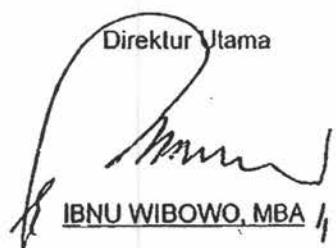
Kami atas nama Direksi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero);
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
3. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Kami bertanggung jawab atas pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Maret 2012

Direktur Utama



IBNU WIBOWO, MBA

Direktur Keuangan & SDM



ANANG SUNDANA, SE
NIP.: 060064978

PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 1 JANUARI 2011 / 31 DESEMBER 2010

(dalam rupiah)

	Catatan	31 DESEMBER 2012	31 DESEMBER 2011	1 JANUARI 2011/ (Disajikan Kembali)	31 DES' 2010 (Disajikan Kembali)
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	3b, 4, 27c	68,422,636,682	50,485,267,562	35,404,112,526	
Piutang Usaha (setelah dikurangi penyisihan piutang sebesar : tahun 2012 Rp.9.389.661.713, tahun 2011 Rp.2.692.929.061 dan tahun 2010 Rp. 2.417.968.605)	3c, 5, 24a	110,887,931,361	61,629,443,841	59,647,525,493	
Tagihan Bruto	3d, 3k, 6, 27a	4,391,104,979	1,725,100,296	1,272,335,164	
Aset dimiliki untuk dijual	3j, 8	-	928,050,471		
Aset Lancar lainnya	7, 27b, 27d	2,301,687,513	1,751,996,550	1,779,515,249	
JUMLAH ASET LANCAR		186,003,360,535	136,619,858,820	98,103,488,432	
ASET TIDAK LANCAR					
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar tahun 2012 Rp. 69.693.595.586, tahun 2011 Rp. 62.522.683.635 dan tahun 2010 Rp. 51.660.639.929)	3g, 8	115,036,025,662	77,549,575,477	66,686,662,424	
Aset pajak tangguhan	3l, 13	2,981,968,560	2,509,684,486	1,832,717,834	
Aset tidak lancar Lainnya	9, 27 d	158,731,396	153,790,196	104,576,902	
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		118,176,725,618	80,213,050,159	68,623,957,160	
JUMLAH ASET		304,180,086,153	216,732,908,979	166,727,445,592	

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 1 JANUARI 2011/31 DESEMBER 2010

(dalam rupiah)

	Catalan	31 DESEMBER 2012	31 DESEMBER 2011	1 JANUARI 2011/ (Disajikan Kembali)	31 DES' 2010 (Disajikan Kembali)
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Uang Usaha	10, 24b	3,844,956,038	878,190,000	4,329,325	
Uang Lain-lain	11, 24b	13,089,412,174	5,038,403,338	6,055,388,553	
Uang Biaya	12, 24 b	18,124,330,158	14,488,332,705	14,019,596,889	
Uang pajak	13c, 27b, 24b	22,088,634,966	13,829,506,168	8,359,268,789	
Uang Bruto	14	3,053,871,800	1,994,011,335	1,322,306,287	
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	15, 24b	5,850,000	38,600,000	34,418,000	
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		60,207,055,136	36,267,043,546	29,795,307,843	
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Provisi Imbalan Jangka Panjang Karyawan	3m, 16	11,607,704,906	5,780,331,124	4,912,902,730	
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		11,607,704,906	5,780,331,124	4,912,902,730	
JUMLAH LIABILITAS		71,814,760,042	42,047,374,670	34,708,210,572	
EKUITAS					
Modal saham		17, 25			
Modal dasar 180.000 saham dengan nilai nominal per saham Rp1.000.000					
Modal ditempatkan dan diselot penuh sebesar 45.000 saham		45,000,000,000	45,000,000,000	45,000,000,000	
Saldo laba					
Saldo laba yang dicadangkan	18, 25	119,927,106,309	78,325,389,788	50,794,879,894	
Saldo laba yang belum dicadangkan		67,438,219,802	51,360,144,521	36,224,355,125	
JUMLAH EKUITAS		232,365,326,111	174,688,634,309	132,319,235,019	
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		304,180,086,153	216,732,908,979	136,727,445,592	

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
 Laporan Laba Rugi Komprehensif
 Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

dalam rupiah

	Catatan	2012	2011
PENDAPATAN	3k, 19	419,176,067,983	Disajikan Kembali 334,085,339,757
BEBAN JASA	3k, 20, 27e	<u>76,526,899,593</u>	<u>67,987,653,609</u>
LABA KOTOR		<u>342,649,168,390</u>	<u>266,117,686,148</u>
BEBAN USAHA			
Beban Pemasaran & Humas	21	5,996,069,278	5,004,589,888
Beban Administrasi & Umum	22, 27e	<u>248,341,554,710</u>	<u>194,324,997,688</u>
		<u>254,337,623,988</u>	<u>199,329,587,576</u>
LABA USAHA		<u>98,311,544,402</u>	<u>66,788,093,572</u>
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	23		
Pendapatan lain-lain		7,480,968,471	3,350,541,663
Beban lain-lain		(1,334,295,395)	(1,795,692,366)
Pendapatan (beban) lain-lain bersih		<u>6,146,673,076</u>	<u>1,554,849,297</u>
LABA SEBELUM PAJAK		<u>94,458,217,478</u>	<u>68,342,947,869</u>
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Beban Pajak Kini	3 k, 13	(27,492,281,750)	(17,659,770,000)
Manfaat (beban) Pajak Tangguhan	13 e	<u>472,284,074</u>	<u>676,966,652</u>
Jumlah Pajak Penghasilan		<u>(27,019,997,676)</u>	<u>(16,982,803,348)</u>
LABA BERSIH		<u>67,438,219,802</u>	<u>51,360,144,521</u>
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan selelah pajak		-	-
Total pendapatan komprehensip tahun berjalan		-	-
LABA RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>67,438,219,802</u>	<u>51,360,144,521</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO).
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

Keterangan	Catatan	Modal Disetor	Saldo laba Dicadangkan	Saldo laba belum dicadangkan	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2010		45,000,000,000	50,794,879,894	36,224,355,125	132,019,235,019
Pembentukan cadangan umum					
Pembagian laba					
Dividen			27,530,509,894	(27,530,509,894)	
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	18				
Laba tahun berjalan				51,360,144,521	51,360,144,521
Saldo per 31 Desember 2011		45,000,000,000	78,325,389,788	51,360,144,521	174,685,534,309
Pembentukan cadangan umum					
Pembagian laba					
Dividen			41,601,716,521	(41,601,716,521)	
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	18				
Laba tahun berjalan				67,438,219,802	67,438,219,802
Saldo per 31 Desember 2012		45,000,000,000	119,927,106,309	67,438,219,802	232,365,326,111

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
 dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

	2012	2011
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	390,977,440,928	311,809,412,661
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	<u>(305,281,333,927)</u>	<u>(256,980,552,424)</u>
Kas yang diperoleh dari operasi	<u>85,696,107,001</u>	<u>54,828,860,237</u>
 Penerimaan (pembayaran) lain-lain		
Pembayaran Pajak penghasilan	6,705,033,134	1,798,964,868
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	<u>(21,194,259,247)</u>	<u>(13,149,358,746)</u>
	<u>71,206,880,888</u>	<u>43,478,466,359</u>
 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penambahan aset tetap	(43,500,829,868)	(19,648,939,898)
Penambahan uang jaminan	<u>(10,254,000)</u>	<u>19,001,628</u>
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(43,511,083,868)</u>	<u>(19,629,938,270)</u>
 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran dividen	(7,704,022,000)	(7,244,871,025)
Pembayaran dana program kemitraan dan bina lingkungan	<u>(2,054,406,000)</u>	<u>(1,448,974,206)</u>
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(9,758,428,000)</u>	<u>(8,693,845,231)</u>
 KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		
	17,937,369,020	15,154,682,858
 KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		
	50,485,267,662	35,330,584,804
 KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		
	<u>68,422,636,682</u>	<u>50,485,267,662</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

1. Umum

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), selanjutnya disebut "Perusahaan" merupakan peralihan dari PN Biro Klasifikasi Indonesia yang didirikan tanggal 1 Juli 1964 . Peralihan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1977. Akta pendirian Perusahaan dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 57 tahun 1977 tanggal 21 April 1977 yang diperbaiki dengan Akta Nomor 35 tanggal 19 Oktober 1978 dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.A.5/345/1978 tanggal 7 November 1978 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1979 tanggal 6 Februari 1979 (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tahun 1999).

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan H. Umaran Mansjur, SH, Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut mengenai penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 45, dan perkembangan kebutuhan pengelolaan Perusahaan, perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan, perubahan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan dan diseluruh penuh. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-03102AH.01.02 tahun 2009 tanggal 14 Januari 2009.

Perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1977 berubah menjadi PT (Persero) yang merupakan peralihan dari PN Biro Klasifikasi Indonesia yang didirikan tanggal 1 Juli 1964. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) bertugas untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang jasa klasifikasi, sertifikasi, konsultansi dan supervisi di bidang kelautan serta industri jasa pada umumnya, agar terjamin keselamatan jiwa dan benda dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas yang mandiri.

Sesuai dengan Anggaran Dasarnya, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah sebagai berikut:

a) Bidang Usaha Klasifikasi dan Registrasi Kapal, yaitu:

- Pemeriksaan konstruksi, pengawasan dan pengujian serta pencatatan sertifikasi klas dan registrasi kapal;
- Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai;
- Pengujian dan sertifikasi material dan komponen;
- Pengujian dan penerbitan sertifikasi kualitas juru las, inspektor las dan ahli las;
- Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi aktivitas statutoria yang mendapat otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia, maupun pemerintah negara lain;
- Bertindak sebagai agen dan/atau mewakili klasifikasi asing/konsultan asing; dan
- Melaksanakan sertifikasi sesuai standar Internasional.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

b) Bidang Konsultasi dan Supervisi

- Konsultansi dan supervisi di bidang kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
 - Penilaian, perencanaan, dan pengawasan dibidang teknologi kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
 - Pengujian material dan komponen;
 - Konsultansi teknik / engineering sesuai standar nasional internasional;
 - Pelatihan keahlian teknik dan non teknik dibidang teknologi kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
 - Melakukan sertifikasi teknik pada umumnya;
 - Kegiatan jasa rekayasa, jasa konstruksi dan jasa pemborongan non konstruksi dibidang instalasi minyak dan gas, panas bumi serta industri pertambangan pada umumnya.
- c) - Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk properti, perkantoran, apartemen, dan perhotelan.

Kantor Pusat PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) berdomisili di Jakarta Jl Yos Sudarso No 38-40, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14320. Unit kerja Perusahaan terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 18 (delapan belas) Kantor Cabang, 1 (satu) Kantor Perwakilan dan 1 (satu) unit usaha Konsultansi dan Supervisi dengan rincian:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Kantor Pusat Jakarta | 12. Cabang Bitung |
| 2. Cabang Utama Tanjung Priok | 13. Cabang Cigading |
| 3. Cabang Utama Batam | 14. Cabang Cirebon |
| 4. Cabang Utama Balikpapan | 15. Cabang Dumai |
| 5. Cabang Utama Surabaya | 16. Cabang Makassar |
| 6. Unit Konsultansi & Supervisi-Jakarta | 17. Cabang Pontianak |
| 7. Cabang Madya Palembang | 18. Cabang Singapore |
| 8. Cabang Madya Semarang | 19. Cabang Surong |
| 9. Cabang Madya Belawan | 20. Cabang Pekarbaru |
| 10. Cabang Madya Banjarmasin | 21. Perwakilan Jambi |
| 11. Cabang Amboin | |

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: A.0802/PL.202/KI-11 tanggal 24 Februari 2011, Nomor: 0700/KP.203/KI-11 tanggal 17 Februari 2011 dan Nomor: A.0859/KU.203/KI-11 tanggal 1 Maret 2011 tentang Relokasi Kanlor Cabang Padang dan Cabang Kendari, sehingga sejak tanggal 1 Maret 2011 cabang Padang menjadi tergabung ke cabang Dumai dan perwakilan Kendari menjadi tergabung ke cabang Makassar.

Seluruh unit produksi menangani segmen Klasifikasi (Klas) dan segmen Konsultansi & Supervisi (KS), kecuali Unit Konsultansi & Supervisi (UKS) Jakarta dan cabang Pekanbaru hanya menangani segmen KS, cabang utama Tanjung Priok dan cabang Dumai (di Pekanbaru) hanya menangani segmen Klas.

2. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan mulai tanggal 11 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep- 322/MBU/2012 adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama	: Dr. Machfud Sidik, MSc
Komisaris	: Drs. Minto Widodo, MA
Komisaris	: Capt. Erwin Rosmali, Msi
Komisaris	: Drs. Faisal Halimi, M.Si

Sekretaris Dewan Komisaris	: Susi Meyrista Tarigan, S.E. Ak
----------------------------	----------------------------------

Sedangkan susunan Dewan Komisaris Perusahaan sampai dengan 11 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep- 155/MBU/2009 tanggal 28 Juli 2009 dan Nomor : SK. 132/MBU/2012 tanggal 7 Maret 2012 adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama	: Capt. Abdul Gani
Komisaris	: Drs. Riyadi Widiasmoro, M.Si
Komisaris	: Liliek Mayasari, SE
Komisaris	: Avianto Muhtadi

Sekretaris Dewan Komisaris	: Susi Meyrista Tarigan, S.E. Ak
----------------------------	----------------------------------

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

Direksi

Susunan Dewan Direksi, yaitu untuk Direktur Utama mulai 25 Mei 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-203/MBU/2012, dan Direksi lainnya mulai tanggal 3 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-284/MBU/2012 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Ibnu Wibowo, MBA
Direktur Keuangan & SDM	:	Anang Sundana, SE
Direktur Teknik & Operasi	:	Capt. Iman Satria Utama, MM

Sedangkan susunan Dewan Direksi sampai tanggal 25 Mei 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-259/MBU/2010 tanggal 6 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Capt. Purnama, MM
Direktur Keuangan & Personalia	:	Edy Cahyono, ST, MSM
Direktur Teknik & Pengembangan	:	Ir. Ajatiman
Direktur Operasi & Pemasaran	:	ir. Setiyo Danckeng

Komite Audit

Susunan Komite Audit Perusahaan mulai tanggal 30 Oktober 2012 sesuai dengan SK Dewan Komisaris No. 005/Dekom.101/X/2012 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Drs. Minto Widodo, MA
Anggota	:	Nur Sodiq
Anggota	:	Soedjasmanoor

Sedangkan susunan Komite Audit sampai dengan 30 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KU.002/Dekom.101/X/KI-09 tanggal 22 Oktober 2009 dan surat perpanjangan masa tugas Nomor : KU. 001/Dekom.101/X/KI-11 tanggal 23 Oktober 2011 adalah sebagai berikut :

Ketua	:	Drs. Riyadi Widiasworo, Msi
Anggota	:	Tri Ashadi
Anggota	:	Swarno

Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, jumlah karyawan Perusahaan adalah 746 dan 616 orang dengan rincian sebagai berikut:

	Per 31-12-2012			Per 31-12-2011		
	Tetap	Tidak Tetap	Jumlah	Tetap	Tidak Tetap	Jumlah
- Teknik	349	80	429	297	34	331
- Administrasi	196	73	269	193	40	233
- Penunjang	14	34	48	19	33	52
Jumlah	559	187	746	509	107	616

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi terperinci yang digunakan Perusahaan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, yaitu yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun tertentu dinyatakan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan Keuangan disajikan dengan menggunakan dasar akrual (*accrual basis*), kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung (*direct method*) dan dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari uang kas, uang yang ada di bank serta deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak dijaminkan. Sebagai Aset Keuangan, Kas dan Setara kas dicatat pada tanggal perolehannya pada nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi.

c. Piutang Usaha

Piutang Usaha disajikan sebesar jumlah yang diperkirakan dapat direalisasi yaitu jumlah tercatat awal dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Piutang Usaha mencerminkan jumlah yang telah ditagihkan kepada pelanggan atas jasa yang telah dilakukan. Adapun jumlah yang ditagihkan mengacu pada termin kontrak yang telah disepakati dengan pelanggan.

Penyisihan Piutang tak tertagih dihitung secara kolektif dengan menggunakan *roll - rate model*. Adapun parameter *probability of default* dan *loss given default* yang dipergunakan dalam model tersebut diperoleh dari hasil survei data empiris Perusahaan selama 3 sampai dengan 5 tahun terakhir.

d. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja mencerminkan pekerjaan jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar biaya jasa yang terjadi, ditambah laba (rugi) yang diakui, dikurangi dengan termin penagihan yang telah diajukan.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

e. Transaksi dengan Pihak-Pihak Yang Berelasi

Pengungkapan pihak-pihak yang berelasi berdasarkan PSAK 7 (Revisi 2010) menyatakan bahwa karyawan kunci adalah termasuk pihak-pihak yang berelasi, pada paragraph 16 mensyaratkan pengungkapan Kompenasasi terhadap manajemen kunci. Berdasarkan definisi pada paragraf 09 menyatakan sebagai berikut: "Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari entitas".

Dengan ketetapan kepada PSAK tersebut, pengungkapan kompensasi terhadap manajemen kunci adalah sebagai berikut:

Jumlah gaji & tunjangan untuk beban Komisaris dan Direksi

<u>2012</u>	<u>2011</u>
Rp8,987,986,579	Rp6,022,252,528

Definisi terkait lainnya adalah "Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah". Pengungkapan transaksi dengan BUMN berupa rekening bank dan deposito, piutang dan utang kepada BUMN adalah sebagaimana disajikan pada butir 4, 5 dan 31 dalam laporan ini.

f. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing yang terjadi sepanjang tahun dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan kedalam Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi nilai tukar yang diakibatkan penjabaran dikreditkan atau dibebankan ke perhitungan laba rugi periode berjalan.

Kurs tengah yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebagai berikut:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Dolar Amerika (USD)	9,670	9,068
Dolar Singapura (SGD)	7,907	6,974
Euro	12,810	11,739

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

g. Aset Tetap

Perusahaan telah menerapkan PSAK 16 (Revisi 2011) mengenai "Aset Tetap" dengan memilih menggunakan model biaya dalam mengukur aset tetapnya sebagaimana tersebut dalam paragraf 30. Sesuai dengan metode tersebut, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusulannya dan akumulasi rugi penurunan nilai (jika ada). Aset tetap kecuali hak atas tanah, disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (double declining method), kecuali bangunan/ gedung disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) sesuai dengan tarif penyusutan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Umur Manfaat (tahun)	
Bangunan	20 - 40	tahun
Kendaraan bermotor roda 2	4 - 5	tahun
Kendaraan bermotor roda 4	5 - 8	tahun
Inventaris	4 - 16	tahun

Biaya Perolehan Aset Tetap setelah dikurangi estimasi nilai residuanya disusutkan selama estimasi umur manfaat Aset Tetap yang bersangkutan. Setiap akhir periode pelaporan keuangan dilakukan kaji ulang terhadap estimasi umur manfaat dan nilai residu aset tetap. Penyesuaian beban penyusutan sebagai hasil kaji ulang tersebut diperlakukan secara prospektif.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya pemugaran, dan penambahan dalam jumlah signifikan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PSAK No. 16 (Revisi 2011) tentang aset tetap, dikapitalisasi. Aset yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusulannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap yang bersangkutan tercermin dalam operasi tahun berjalan.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*estimated recoverable amount*) maka nilai tersebut dilurunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

h. Aset Tak Berwujud

Pengukuran aset tak berwujud adalah berdasarkan PSAK 19 (revisi 2010) dalam paragraf 08 didefinisikan bahwa Aset tak berwujud adalah aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Jika piranti lunak bukan merupakan bagian integral dari perangkat kerasnya, maka piranti lunak komputer diperlakukan sebagai aset tak berwujud, namun jika piranti lunak merupakan bagian integral dari perangkat kerasnya maka diperlakukan sebagai aset tetap.

i. Aset Dalam Pembangunan

Aset dalam pembangunan meliputi bangunan dan prasarana lainnya, yang dinyatakan berdasarkan biaya pembangunan, biaya pegawai langsung, biaya tidak langsung dalam pembangunan tersebut dan biaya-biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai aset selama masa pembangunan. Akumulasi biaya aset dalam pembangunan akan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan dan kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat pembangunan selesai dan aset tersebut siap untuk dipergunakan.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

j. Aset Dimiliki Untuk Dijual

Aset dimiliki untuk dijual merupakan aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi dan sudah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara untuk dijual. Aset ini dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumasi penyusutannya. Jika nilai buku aset belum mencapai Rp 1, maka penyusutan untuk tahun bersangkutan hanya selama beberapa bulan sampai diterbitkannya Surat Persetujuan dari Menteri Negara BUMN. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap yang bersangkutan tercermin dalam operasi tahun berjalan.

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan Beban Jasa secara bertahap sesuai tahap kemajuan yang dicapai pada tiap-tiap akhir bulan. Akun Tagihan Bruto di Laporan Posisi Keuangan mencerminkan pekerjaan yang masih dalam tahap penyelesaian pada akhir periode pelaporan keuangan.

Biaya operasi yang digolongkan sebagai beban jasa adalah meliputi biaya-biaya langsung dan overhead yang dapat dialokasikan langsung atau dialokasikan secara sistematis kepada tiap-tiap kontrak. Biaya-biaya yang tidak memenuhi kriteria biaya jasa digolongkan sebagai beban usaha.

l. Perpajakan

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak dalam tahun berjalan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku.

Pajak penghasilan tangguhan disajikan dengan jumlah penuh dengan menggunakan metode kewajiban. Pajak penghasilan tangguhan timbul akibat perbedaan temporer yang ada antara aset dan kewajiban atas dasar pajak dengan nilai tercatat aset dan kewajiban dalam laporan keuangan. Tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku digunakan dalam menentukan pajak penghasilan tangguhan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah diterima.

m. Imbalan Jangka Panjang Bagi Karyawan

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan jangka panjang bagi karyawan yaitu meliputi Imbalan Pensiun, Imbalan Balas Jasa dan Pengabdian, serta Imbalan Cuti Besar. Pengakuan dan pengukuran beban serta pembentukan provisi sebagai konsekuensi dari ketiga program imbalan tersebut dihitung secara aktuarial dengan menggunakan metode dan asumsi sebagai berikut :

1. Metode aktuarial yang dipergunakan : Projected Unit Credit,
2. Tingkat diskonto untuk menghitung nilai kini manfaat imbalan mengacu pada tingkat imbal hasil surat utang negara yang berdurasi relatif sama dengan rata-rata sisa masa kerja karyawan atau rata-rata sisa jatuh tempo pembayaran manfaat kepada karyawan,
3. Tingkat kenaikan gaji dasar mengacu pada rata-rata kenaikan gaji dasar pada periode-periode sebelumnya,
4. Laba / rugi aktuarial yang terjadi tidak diakui sekaligus, melainkan diamortisasi selama rata-rata sisa masa kerja karyawan untuk jumlah yang melebihi 10 % dari asset program atau 10 % dari nilai kini liabilitas,
5. Beban jasa lalu yang sudah vested diakui sekaligus, sedangkan untuk yang belum vested diamortisasi selama sisa periode sampai dengan menjadi vested.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

n. Aset keuangan dan kewajiban keuangan

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 50 (Revisi 2010) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012, kebijakan akuntansi atas aset dan kewajiban keuangan adalah sebagai berikut:

1. Aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut (i) aset keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman dan piutang, (iii) aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung pada tujuan saat aset keuangan tersebut diperoleh. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal.

(i) Aset keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang nilai wajarnya diakui di laporan laba atau rugi adalah aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset untuk diperdagangkan. Sebuah aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset untuk diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti yang menunjukkan latar belakang untuk mengambil keuntungan jangka pendek.

(ii) Pinjaman dan piutang

Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak terpengaruh oleh pasar aktif. Pinjaman dan piutang awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pinjaman dan piutang terdiri dari piutang usaha dan piutang lainnya.

2. Kewajiban keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan kewajiban keuangan dalam kategori (i) kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi dan (ii) kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

(i) Kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi

Kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi adalah kewajiban keuangan yang diklasifikasikan sebagai kewajiban yang diperdagangkan. Sebuah kewajiban keuangan diklasifikasikan sebagai kewajiban yang diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti yang menunjukkan latar belakang untuk mengambil keuntungan jangka pendek.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif yang dikelola dalam hubungannya dengan kewajiban keuangan yang dimaksud termasuk dalam "laba/rugi selisih kurs".

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

(ii) Kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Kewajiban keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah hutang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman, dan obligasi.

3. Estimasi nilai wajar

Perusahaan menggunakan harga pasar untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan yang aktif diperdagangkan di pasar.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Perusahaan menggunakan metode diskonto arus kas dengan menggunakan asumsi-asumsi yang didasarkan pada kondisi pasar pada tanggal neraca yang kemudian digunakan untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan.

o. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan Manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode tahun berjalan.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

4. KAS DAN SETARA KAS

	2012	2011
Kas		
Rupiah		
SGD (2012: SGD 268,31; 2011: SGD2.092,72)	436,474,783	242,371,233
	<u>2,121,527</u>	<u>14,594,629</u>
	<u>438,596,310</u>	<u>256,965,862</u>
Bank		
Rupiah:		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5,511,008,793	4,915,328,223
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8,519,169,755	4,216,801,799
PT Bank DKI		36,929,525
PT Bank Jabar Banten	179,104,764	187,707,335
Jumlah Valuta Rupiah	<u>14,209,283,312</u>	<u>9,356,766,882</u>
Mata uang asing:		
Dolar Amerika:		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012: USD14.337,60; 2011: USD18.560,88)	138,644,611	168,310,080
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2012:USD318.862,52; 2011: USD37.013,74)	3,083,400,567	335,640,594
Dolar Singapura:		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2012: SGD45.702,85; 2011: SGD37.013,74)	361,372,435	2,392,528,475
Overseas Express Bank Singapura (2012: SGD403.609,39; 2011: SGD283.202,72)	3,191,339,447	1,975,055,769
Jumlah Bank	<u>6,774,757,060</u>	<u>4,871,534,918</u>
	<u>20,984,040,372</u>	<u>14,228,301,800</u>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

4. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

Deposito berjangka

Rupiah:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Syariah	12,500,000,000	4,500,000,000
PT Bank BNI	2,000,000,000	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Syariah	13,500,000,000	4,500,000,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,000,000,000	1,000,000,000
PT Bank Jabar Banten	17,000,000,000	23,000,000,000
PT Bank DKI	-	3,000,000,000
Jumlah Deposito	<u>47,000,000,000</u>	<u>36,000,000,000</u>
Jumlah kas dan setara kas	<u>68,422,636,682</u>	<u>50,465,267,662</u>

Jumlah Kas dan Selera Kas sebesar Rp. 68.422.636.682 termasuk uang jaminan sebesar Rp. 155.466.400 yang digunakan sebagai jaminan pelaksanaan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Perusahaan dengan jangka waktu kurang dari 12 bulan.

Deposito berjangka:

Tingkat suku bunga	4,5% - 7%	6% - 8%
Jangka waktu	1 - 3 bulan	1 - 3 bulan

5. PIUTANG USAHA

Saldo piutang usaha dirinci berdasarkan jenis usaha jasa dan penyisihan piutang sebagai berikut

	2012	2011
Piutang Jasa Klasifikasi	76,593,625,673	51,074,092,372
Piutang Jasa Konsultansi & Supervisi	43,683,967,401	33,248,280,530
Sub Jumlah	<u>120,277,593,074</u>	<u>84,322,372,902</u>
Dikurangi penyisihan piutang	(9,389,661,713)	(2,692,929,061)
Jumlah bersih	<u>110,887,931,361</u>	<u>81,629,443,841</u>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

Rincian piutang berdasarkan umurnya adalah sebagai berikut:

	2012	2011
1 sampai dengan 12 bulan	111,106,953,086	77,736,420,731
13 sampai dengan 24 bulan	2,453,995,482	2,724,326,996
25 sampai dengan 36 bulan	1,067,293,445	1,298,292,226
Di atas 37 bulan	5,649,351,061	2,563,332,949
Jumlah	120,277,593,074	84,322,372,902

Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapannya" dan PSAK No. 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukurannya". Sesuai dengan PSAK tersebut, Perusahaan telah melakukan penilaian kecukupan penyisihan piutang tek tertagih pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, pada tanggal 31 Desember 2012 Perusahaan menambah penyisihan piutang usaha sebesar Rp6.696.732.652, sehingga saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2012 berjumlah Rp9.389.661.713. Tambahan penyisihan tersebut seluruhnya dibebankan pada tahun 2012. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan yang telah dibentuk cukup memadai untuk mengantisipasi kerugian piutang tek tertagih.

Perilisan mutasi saldo penyisihan piutang usaha per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Saldo awal tahun	2,692,929,061	2,417,968,605
Penyisihan (pemulihian) bersih	6,696,732,652	274,960,456
Saldo akhir tahun	9,389,661,713	2,692,929,061

6. TAGIHAN BRUTO

	2012	2011
Biaya Jasa yang telah terjadi	2,708,305,054	1,725,100,296
Laba (Rugi) Kotor yang diakui	1,682,799,925	-
-/- Penagihan Termin	-	-
Jumlah Tagihan Bruto	4,391,104,979	1,725,100,296

Seluruh saldo tagihan bruto di atas mencerminkan nilai pekerjaan segmen Konsultasi dan Supervisi yang per 31 Desember 2012 dan 2011 masih dalam tahap penyelesaian dan belum dilakukan penagihan termin.

7. ASET LANCAR LAINNYA

	2012	2011
Pendapatan bunga deposito yang akar diterima	138,763,617	168,807,677
Piutang karyawan	32,836,334	55,722,107
Uang muka pembelian barang & jasa	984,787,500	528,641,765
Pajak dibayar dimuka	171,736,321	-
Asuransi	298,952,958	379,872,201
Tunjangan perumahan	348,200,000	211,050,000
Survey klasifikasi	222,402,700	156,902,800
Sewa	71,900,000	251,000,000
Pemeliharaan kendaraan	32,108,083	-
Jumlah	2,301,687,513	1,751,996,550

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

8. ASET TETAP, ASET DALAM PEMBANGUNAN DAN ASET TERSEDIA UNTUK DIJUAL

	31 Desember 2012				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Nilai perolehan					
Pemilikan langsung					
- Tanah	12,111,562,933	-	-	2,140,803,885	14,252,366,818
- Bangunan	33,500,803,554	434,620,176	-	3,619,526,158	37,554,949,888
- Kendaraan bermotor	32,640,959,085	2,326,621,000	-	-	34,967,579,085
- Inventaris gol I	20,727,664,564	2,203,658,298	-	-	22,931,322,862
- Inventaris gol II	9,853,229,256	1,183,777,751	-	-	11,037,007,017
- Inventaris gol III	21,133,043,876	3,863,630,952	-	-	24,996,674,828
- Aset dalam pembangunan	10,104,996,834	33,488,521,691	-	(4,603,797,775)	38,989,720,750
Jumlah aset tetap	140,072,259,112	43,500,829,868	-	1,156,532,268	184,729,621,248
Aset tersedia dijual	1,270,486,777		113,954,509	(1,156,532,268)	-
Nilai Perolehan	140,072,259,112	43,500,829,868	113,954,509	-	184,729,621,248

	31 Desember 2012				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan					
Pemilikian langsung					
- Bangunan	9,142,871,729	833,955,422	-	304,111,306	10,280,938,457
- Kendaraan bermotor	21,918,631,389	571,289,422	-	-	22,489,920,811
- Inventaris gol I	17,165,342,377	2,561,886,321	-	-	19,727,228,698
- Inventaris gol II	7,523,442,781	801,481,392	-	-	8,324,924,173
- Inventaris gol III	6,772,395,359	2,098,188,088	-	-	8,870,583,447
Jumlah	82,522,683,635	6,866,800,645	-	304,111,306	69,693,595,586
Aset tersedia untuk dijual	342,436,306	-	38,325,000	(304,111,306)	-
62,865,119,941	6,866,800,645	38,325,000	-	69,693,595,586	-
Nilai Buku Aset Tetap					115,036,026,662

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

31 Desember 2011

Nilai perolehan	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Pemilikan langsung					
- Tanah	12,647,283,260	-	-	(535,720,327)	12,111,562,933
- Bangunan	31,740,718,673	3,266,096,750	853,184,619	(652,827,250)	33,500,803,554
Kendaraan bermotor	31,264,705,085	1,376,253,000	-	-	32,640,958,085
- Inventaris gol I	18,295,213,751	2,432,450,813	-	-	20,727,664,564
- Inventaris gol II	9,279,629,996	612,899,270	39,500,000	-	9,853,229,266
- Inventaris gol III	13,438,934,039	7,796,364,202	102,254,365	-	21,133,043,876
- Aset dalam pembangunan	1,680,617,549	8,424,379,285	-	-	10,104,996,834
Jumlah aset tetap	118,347,302,353	23,908,443,320	994,938,984	(1,188,547,577)	140,072,259,112
Aset tersedia untuk dijual	-	81,939,200	-	1,188,547,577	1,270,486,777
Nilai Perolehan	118,347,302,353	23,990,382,520	994,938,984	-	141,342,745,889

31 Desember 2011

Akumulasi Penyusutan	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Pemilikan langsung					
- Bangunan	3,448,119,611	1,514,586,167	477,397,743	(342,436,306)	9,142,871,729
- Kendaraan bermotor	16,431,850,268	5,486,781,120	-	-	21,918,631,389
- Inventaris gol I	14,728,136,387	2,437,205,990	-	-	17,165,342,377
- Inventaris gol II	6,817,966,993	706,298,705	822,917	-	7,523,442,781
- Inventaris gol III	5,234,566,669	1,574,128,965	36,300,275	-	6,772,395,359
Jumlah	51,660,639,929	11,719,000,948	514,520,935	(342,436,306)	62,522,683,635
Aset tersedia untuk dijual	-	-	342,436,306	342,436,306	
Nilai Buku Aset Tetap	51,660,639,929	11,719,000,948	514,520,935	-	62,865,119,941
Nilai Buku Aset tersedia untuk dijual	-	-	-	77,549,575,477	
				928,050,471	

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

Aset tersedia untuk dijual terdiri dari 3 (tiga) unit rumah dinas di Lebak Lestari-Cipele dan kantor lama cabang utama Batam yang telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham untuk dijual, yaitu sesuai dengan surat Menteri Negara BUMN No. : S-84/MBU/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan Penghapusan Aset Tetap PT.BKI (Persero).

Dalam tahun buku 2012 hanya berhasil terjual 1 (satu) rumah dinas dari 3 (tiga) rumah dinas di Lebak Lestari-Cipele dengan hasil penjualan bersih Rp. 947.615.000, nilai buku rumah dinas yang terjual tersebut sebesar Rp 75.629.509, dicalat pada pos pendapatan lain-lain sebesar Rp 871.985.491. Adapun 2 (dua) unit rumah dinas lainnya serta kantor lama Cabang Utama Batam yang belum terjual, direklasifikasi kembali ke Aset Tetap sesuai kaidah yang tertera di PSAK 58.

Seluruh Biaya Penyusutan dibebankan sebagai Beban Administrasi dan Umum.

Ikhtisar perubahan saldo Aset Dalam Pelaksanaan selama tahun 2012 dan tahun 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

	2012	2011
Saldo awal	10,104,996,834	1,680,617,549
Penambahan	33,488,521,691	11,467,913,535
Reklasifikasi ke aset bangunan	<u>(4,603,797,775)</u>	<u>(3,043,534,250)</u>
Penambahan	28,884,723,916	8,424,379,285
Per 31 Desember 2012	<u><u>38,989,720,750</u></u>	<u><u>10,104,996,834</u></u>

Rincian aset dalam penyelesaian per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut;

	2012	2011
Kantor Pusat	37,591,491,750	7,828,891,750
Cabang Ambon	-	26,476,000
Cabang Utama Batam	-	168,000,000
Cabang Utama Balikpapan	1,398,229,000	1,398,229,000
Cabang Sorong	-	278,206,284
Cabang Pekanbaru	-	405,193,800
Jumlah	<u><u>38,989,720,750</u></u>	<u><u>10,104,996,834</u></u>

Sebagian aset tetap perusahaan telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup untuk menutupi segala risiko yang mungkin timbul.

Manajemen perusahaan berpendapat bahwa tidak terdapat perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai Aset tetap.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

9. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	2012	2011
Jamirian Sewa Gedung kantor cabang Singapura	153,418,596	143,164,596
Nilai perolehan hak pakai atas tanah	15,938,400	15,938,400
dikurangi : akumulasi amortisasi	<u>(10,625,600)</u>	<u>(5,312,800)</u>
	<u>158,731,396</u>	<u>153,790,196</u>

Hak pemakaian atas tanah di atas adalah milik PT Pelabuhan Indonesia III yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk masa sampai dengan 2013.

10. UTANG USAHA

Akun ini merupakan kewajiban Perusahaan atas bagian kerjasama kepada partner asing maupun dalam negeri yang pembayarannya dilakukan secara periodik. Saldo hutang usaha per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2012	2011
American Bureau of Shipping	1,804,735,500	385,390,000
Nippon Kaiji Kyokai	2,040,220,538	-
PT Sucofindo (Persero)	-	492,800,000
Jumlah	<u>3,844,956,038</u>	<u>878,190,000</u>

11. UTANG LAIN-LAIN

	2012	2011
Intraco Lestari, PT	9,390,180,809	-
Koperasi BKI	502,754,545	554,810,300
Wearnes Automotive, Pte. Ltd.	1,130,701,000	-
Pratita Prama Nugraha, PT	153,068,877	186,212,034
ITB	160,000,000	-
Gamma Buana Persada, PT	158,375,000	-
Aprika Nusa Lintasartha, PT	136,570,500	-
Bina Karya, PT	107,800,000	-
KAP Kanaka Puradiredja	-	102,850,000
Mina Trisni Notaris	181,250,000	-
Indonesia Hijau Lestari, PT	70,000,000	-
dipindahkan	<u>11,990,700,731</u>	<u>843,872,334</u>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

11. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

	pindahan	2012	2011
Wigandri Teknikindo, PT	11,990,700,731	843,872,334	
Hotel Nam Centre	74,560,000		
Dept Metalurgi & Material UI	81,435,000		
Dynatech International	-	85,000,000	
Kawan Lama Sejahtera	-	893,027,200	
Printis Pribadi Usaha Prima	-	781,206,363	
Jamsostek	357,402,500	131,580,000	
Mitra Artha Gema	-	270,352,000	
Monas Adi Karya	63,570,850	57,200,000	
Moon Taylor	-	190,712,550	
Neo Dunia Persada	164,100,000	288,145,657	
Pasca Pari Bumi	-	221,218,750	
Purna Sarana Karya	68,000,000	115,500,000	
Toyota Astra Auto 2000	-	188,100,000	
Lain-lain (dibawah Rp50 juta sebanyak : -tahun 2012 : 25 kreditur; tahun 2011 : 45 kreditur)	239,643,093	165,250,000	
Jumlah	13,089,412,174	807,238,484	
		5,038,403,338	

12. UTANG BIAYA

	2012	2011
Beban Personel	12,519,060,590	11,279,271,987
Beban Direksi dan Komisaris	1,892,204,480	1,245,950,000
Beban Perjalanan Dinas	-	8,718,500
Beban produksi konsultansi & supervisi	3,068,003,915	1,378,412,991
Beban fasilitas kerja	320,387,718	279,404,189
Beban pengembangan operasi	55,356,000	112,736,525
Beban produksi klasifikasi	159,015,733	87,078,690
Beban pemasaran	90,754,990	66,794,800
Beban pemeliharaan	18,535,732	17,805,899
Beban pendidikan	-	7,871,350
Beban bank	-	500,000
Beban humas	1,011,000	3,787,774
Jumlah	18,124,330,158	14,488,332,705

Beban yang masih harus dibayar atas beban Personel dan beban Direksi dan Komisaris terdiri atas pembebaran atas insentif Jasa produksi karyawan dan tantiem Direksi yang ditelepon berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

13. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

	2012	2011
Pajak Penghasilan pasal 23	-	
Pajak Penghasilan pasal 25	-	
Saldo Pajak (PPN) Masukan dapat dikredikan	171,736,321	
Jumlah	171,736,321	-

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Taksiran Pajak Penghasilan

	2012	2011
Pajak kini	(27,492,281,750)	(17,659,770,000)
Penghasilan/(beban) pajak tangguhan	472,284,074	676,966,652
Jumlah	<u><u>(27,019,997,676)</u></u>	<u><u>(16,982,803,348)</u></u>

c. Utang Pajak

	2012	2011
Pajak Penghasilan Pasal 21 Wapu	7,542,119,757	6,062,722,036
Pajak Penghasilan Pasal 23 Wapu	43,186,806	26,814,262
Pajak Penghasilan Pasal 25	542,621,568	-
Pajak Penghasilan Pasal 29	6,854,457,232	2,099,755,291
PPH Final	121,763,636	-
PPN masukan - Wapu	1,249,732,041	-
Pajak Pertambahan Nilai (pajak keluaran)	5,734,753,926	5,640,214,579
Jumlah	<u><u>22,088,634,966</u></u>	<u><u>13,829,506,168</u></u>

d. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Laba sebelum pajak	94,458,217,478	68,342,947,869
<u>Beda tetap:</u>		
Pendapatan jasa giro	(186,513,253)	(166,727,685)
Pendapatan bunga deposito	(2,119,128,215)	(1,947,705,479)
Pengembangan perusahaan	750,000,000	603,759,336
Biaya perolehan proyek	8,365,610,074	563,090,800
Rekreasi dan olahraga	125,000,000	80,654,957
Koreksi beban pendapatan tahun lalu	678,852,145	-
Pengobatan	-	197,285,986
Listrik, air, telépon (rumah dinas)	78,515,918	109,259,542
Laba penjualan aktiva	(871,985,491)	-
Beban pajak tahun lalu	-	33,108,600
Cinderamata	50,000,000	23,958,571
Sumbangan dan biaya duka	54,690,000	91,581,379
dipindahkan	<u>101,383,258,656</u>	<u>67,931,213,876</u>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

	Pindahan	101,383,258,656	67,931,213,876
<u>Beda waktu:</u>			
Penyisihan piutang	6,696,732,652	274,980,456	
Provisi Imbalan Kerja Jangka Panjang Karyawan	5,827,373,784	867,428,394	
Penyusutan aset	(3,938,237,488)	1,565,477,758	
Taksiran laba kena pajak bersih tahun berjalan	109,969,127,604	70,639,080,484	
Taksiran laba fiskal dibulatkan	109,969,127,000	70,639,080,000	
Taksiran pajak penghasilan badan (25%)	27,492,281,750	17,659,770,000	
<u>Kredit pajak:</u>			
Pajak Penghasilan pasal 23	3,118,676,768	3,289,101,376	
Pajak Penghasilan pasal 25	17,519,147,750	12,270,913,333	
Jumlah kredit pajak	20,637,824,518	15,560,014,709	
Hutang (lebih bayar) Pajak Penghasilan Badan	6,854,457,232	2,099,755,291	

e. Aset pajak tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2012	Manfaat (bebani) Pajak tangguhan	31 Desember 2012
Kewajiban manfaat karyawan	1,445,082,781	1,456,843,446	2,901,926,227
Penyisihan piutang ragu-ragu	673,232,265	-	673,232,265
Penyusutan aset	391,369,440	(984,559,372)	(593,189,932)
	2,509,684,486	472,284,074	2,981,963,560
	1 Januari 2011	Manfaat (bebani) Pajak tangguhan	31 Desember 2011
Kewajiban manfaat karyawan	1,228,225,683	216,857,098	1,445,082,781
Penyisihan piutang ragu-ragu	604,492,151	68,740,114	673,232,265
Penyusutan aset	-	391,369,440	391,369,440
	1,832,717,834	676,966,652	2,509,684,486

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

14. UTANG BRUTO

	2012	2011
Bidang klasifikasi	2,255,142,800	1,265,432,335
Bidang konsultansi dan supervisi	798,729,000	698,391,500
Kantor Pusat (overhead)		30,187,500
Jumlah	<u>3,053,871,800</u>	<u>1,994,011,335</u>

Ulang Bruto untuk bidang klasifikasi dan bidang konsultansi dan supervisi adalah saldo uang muka survey yang diterima dari perusahaan pelayaran/rekanan yang akan diperhitungkan dengan invoice terbit yaitu pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan.

15. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

Akun ini merupakan iuran pegawai kepada DPLK BNI dan Dana Pensiun BKI serta kontribusi Perusahaan yang belum disetor, yaitu sebagai berikut:

	2012	2011
DPLK BNI	5,850,000	38,600,000
Jumlah	<u>5,850,000</u>	<u>38,600,000</u>

16. PROVISI IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG KARYAWAN

	2012	2011
Provisi Imbalan Pensiun	3,152,034,512	-
Provisi Imbalan Balas Jasa & Pengabdian	7,523,459,130	5,780,331,124
Provisi Imbalan Cuti Besar	932,211,264	-
Jumlah	<u>11,607,704,906</u>	<u>5,780,331,124</u>

a. Imbalan Pensiun

Manfaat Pensiun diberikan kepada karyawan yang telah memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja oleh sebab lainnya yang diatur dalam peraturan dana pensiun. Besarnya manfaat pensiun yang diberikan ditentukan oleh masa kerja karyawan dan besamya Penghasilan Dasar Pensiun terakhir (gaji pokok ditambah tunjangan keluarga).

Pendanaan program pensiun ini dibentuk setiap bulan dari iuran karyawan sebesar 6% dan iuran yang ditanggung Perseroan sebesar 15,4% dari gaji dasar karyawan.

Pengelolaan dana program pensiun dilakukan oleh Dana Pensiun PT Biro Klasifikasi Indonesia. Adapun peraturan dana pensiunnya yang terakhir kali ditetapkan oleh Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia No. B.0038D/KP903/KI-05 tanggal 01 Januari 2005 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-049/KM.12/2006 tanggal 03 Agustus 2006.

Rekonsiliasi status pendanaan program ini pada posisi 31 Desember 2012:

Aset Program	46,929,181,835
Nilai Tunai Manfaat Pensiun	88,579,099,110
Surplus (defisit) Pendanaan	<u>(41,649,917,275)</u>
Kewajiban Jasa Lalu yang belum diakui	32,117,002,803
Laba/Rugi Aktuarial belum diakui	6,380,879,960
Beban Pensiun Masih Harus Dibayar	<u>3,152,034,512</u> ✓

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

16. PROVISI IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG KARYAWAN (lanjutan)

Rekonsiliasi perubahan saldo Provisi Imbalan Pensiun selama tahun 2012:

Saldo awal tahun

Beban pensiun tahun berjalan

Kontribusi Iuran ke Dana Pensiun

Saldo akhir tahun

6,691,167,611

(3,539,133,099)

3,152,034,512

Adapun beban yang diakui pada tahun 2012 terdiri dari komponen sebagai berikut:

Beban jasa kini	3,995,301,336
Beban bunga	4,580,723,324
-/- Imbal Hasil investasi	(4,192,112,998)
Beban amortisasi Jasa Lalu	2,307,255,949
Amortisasi Laba/Rugi Aktuarial	
Beban yang diakui	<u>6,691,167,611</u>

Komposisi Aset Program Pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun PT Biro Klasifikasi Indonesia selama tahun 2012 terdiri dari:

a. Obligasi, Sukuk, Surat Utang Negara	56.2%
b. Deposito Berjangka	24.3%
c. Saham, Reksadana, Penempatan	12.9%
d. Properti	6.6%
Jumlah	<u>100.0%</u>

Pengalaman Penyesuaian pada Liabilitas dan Aset Program selama tahun 2012:

a. Pengalaman Penyesuaian Atas Aset Presentase	(693,211,917)
b. Pengalaman Penyesuaian atas Liabilitas Presentase	1.5% (9,067,996,637) 10.2%

b. Imbalan Balas Jasa dan Pengabdian Masa Kerja

Penyelenggaraan Program Balas Jasa didasarkan pada Peraturan Direksi No.DU.249a/KP.106/KI-08 tanggal 31 Desember 2008. Manfaat Balas Jasa berupa pembayaran jumlah lumpsum diberikan kepada karyawan yang memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja oleh sebab lain yang diatur dalam Peraturan Direksi tersebut. Adapun jumlah lumpsum yang diberikan ditentukan berdasarkan besarnya gaji terakhir dikalikan dengan angka Indeks tertentu yang besarnya ditentukan oleh golongan gaji pegawai yang bersangkutan.

Adapun Pengabdian masa kerja adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan yang telah bekerja selama 25 tahun. Imbalan diberikan berupa uang penghargaan 1 (satu) kali THP (*Take Home Pay*), peniti emas 8 gram dan piagam perlengkapan.

Penyelenggaraan program imbalan ini didanai secara Internal Perusahaan.

Rekonsiliasi status pendanaan program ini pada posisi 31 Desember 2012 dan 2011:

Aset Program	2012	2011
Nilai Tunai Kewajiban Manfaat	20,141,692,899	11,034,742,283
Defisit Pendanaan	(20,141,692,899)	(11,034,742,283)
Kewajiban Jasa Lalu yg belum diakui	6,166,126,471	
Laba/Rugi Aktuarial yg belum diakui	6,452,107,298	5,254,411,160
Provisi Balas Jasa & Pengabdian	(7,523,459,130)	(5,780,331,123)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

16. PROVISI IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG KARYAWAN (lanjutan)

Rekonsiliasi perubahan saldo Provisi 2012 dan 2011:

	2012	2011
Saldo Provisi awal tahun	5,780,331,124	4,912,902,730
Beban yang dibentuk	3,332,425,009	1,338,110,700
Imbalan yang dibayarkan	<u>(1,589,297,003)</u>	<u>(470,682,306)</u>
Saldo Provisi akhir tahun	<u>7,523,459,130</u>	<u>5,780,331,124</u>

Adapun beban yang dibentuk selama tahun 2012 terdiri dari:

	2012	2011
Beban jasa kini	1,297,444,629	651,264,132
Beban bunga	662,084,537	550,387,365
Amortisasi Beban Jasa Lalu	1,120,761,792	
Amortisasi Laba / Rugi Aktuarial	252,134,051	136,459,203
Beban Yang Diakui	<u>3,332,425,009</u>	<u>1,338,110,700</u>

Pengalaman Penyesuaian pada Liabilitas dan Aset Program selama tahun 2012:

	2012	2011
Pengalaman Penyesuaian Atas Aset	(1,577,546,742)	1,064,288,475
Presentase	7.8%	9.6%

c. Imbalan Cuti Besar

Perusahaan memberikan imbalan cuti besar sebesar 1 (satu) kali THP (*Take Home Pay*) yang diberikan setiap 5 tahun sekali pada saat karyawan menjalani hak cuti besar. Penyelenggaraan program imbalan ini didanai secara internal Perusahaan.

Rekonsiliasi status pendanaan program ini pada posisi 31 Desember 2012:

Aset Program	
Nilai Tunai Kewajiban Manfaat	932,211,264
Defisit Pendanaan	<u>(932,211,264)</u>
Kewajiban Jasa Lalu yang belum diakui	
Laba/Rugi Aktuarial yang belum diakui	
Provisi Imbalan Cuti	<u>(932,211,264)</u>

Rekonsiliasi perubahan saldo Provisi selama tahun 2012:

Saldo Provisi awal tahun	767,057,156
Beban yang dibentuk	439,756,820
Imbalan yang dibayarkan yang dibayarkan	<u>(274,602,712)</u>
Saldo Provisi akhir tahun	<u>932,211,264</u>

Adapun beban yang dibentuk selama tahun 2012 terdiri dari:

Beban jasa kini	177,093,294
Beban bunga	46,023,429
Beban amortisasi kewajiban transisi	
Amortisasi Laba/Rugi Aktuarial	216,640,097
Beban Yang Diakui	<u>439,756,820</u>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

16. PROVISI IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG KARYAWAN (lanjutan)

Asumsi Aktuarial

Perhitungan beban dan kewajiban aktuarial tersebut di atas dihitung oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama. Perhitungan aktuaris dilakukan dengan frekuensi setahun sekali, adapun asumsi aktuarial yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- (1) metode perhitungan yang dipergunakan : Projected Unit Credit,
- (2) tingkat bunga diskonto yang dipergunakan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah 6% p.a, dan 7% p.a.
- (3) tingkat bunga imbal hasil investasi aset program per 31 Desember 2012 adalah 10% p.a.,
- (4) tingkat kenaikan gaji berkala 5% per tahun,
- (5) tabel mortalitas yang dipergunakan: GAM-1971
- (6) usia pensiun 56 tahun.
- (7) jumlah pegawai peserta program imbalan di atas per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah 552 dan 510 orang.

17. MODAL SAHAM

Modal saham Perusahaan per 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp45.000.000.000 seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Nomor 14 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan H. Umaran Mansjur, SH., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyelanjutkan peningkatan modal dasar dari sebanyak 24.000 saham atau sebesar Rp24.000.000.000 menjadi sebanyak 180.000 saham atau sebesar Rp180.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan diselot penuh dari sebanyak 6.000 saham atau sebesar Rp6.000.000.000 menjadi sebanyak 45.000 saham atau sebesar Rp45.000.000.000 yang berasal dari kapitalisasi cadangan Perusahaan sebesar Rp39.000.000.000. Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-03102AH.01.02 tahun 2009 tanggal 14 Januari 2009.

18. PEMBAGIAN LABA

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : SK-08/D4. MBU/2012 tanggal 4 Juni 2012 dan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2011 pemegang saham telah mencapai penggunaan laba bersih tahun 2011 dan 2010 sebagai berikut:

	Pembagian laba tahun buku 2011	Pembagian laba tahun buku 2010
Pembagian dividen	7,704,022,000	7,244,871,025
Penyisihan dana kemitraan dan bina lingkungan	2,054,406,000	1,448,974,206
Penyisihan cadangan umum	41,601,716,521	27,530,509,894
	51,360,144,521	36,224,355,126

Saldo cadangan umum per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Saldo awal	78,325,389,788	50,794,879,894
Pemindahan dari laba	41,601,716,521	27,530,509,894
Saldo akhir	119,927,106,309	78,325,389,788

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

19.. PENDAPATAN JASA

	2012	2011
Jasa klasifikasi	276,059,218,043	215,583,143,288
Jasa konsultansi dan supervisi	148,764,087,758	119,521,402,636
Bagian partner kerjasama	(5,647,237,818)	(1,019,206,167)
Jumlah	<u>419,176,067,983</u>	<u>334,085,339,757</u>

Rincian pendapatan jasa klasifikasi, jasa konsultansi dan supervisi dan bagian partner kerjasama untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Jasa Klasifikasi

	2012	2011
a. Klas tunggal (Single Class)		
<u>Klas BKI (Dalam Negeri) oleh BKI</u>		
- Penerimaan klas	107,632,643,271	78,395,766,309
- Mempertahankan klas	72,176,658,688	58,717,830,820
- Material dan komponen	21,623,297,685	15,149,648,732
- Statutoria	33,148,830,245	24,939,467,379
	<u>234,581,429,889</u>	<u>177,202,713,243</u>
<u>Klas BKI (Luar Negeri) oleh BKI</u>		
- Penerimaan klas	6,603,624,411	13,074,589,843
- Mempertahankan klas	3,952,708,768	5,095,196,310
- Material dan komponen	1,710,969,352	1,267,989,200
- Statutoria	4,793,782,396	5,139,998,416
	<u>17,061,084,927</u>	<u>24,577,773,769</u>
Jumlah Klas tunggal BKI	<u>251,642,514,816</u>	<u>201,780,487,009</u>
b. Kerjasama dengan klas asing		
<u>Klas BKI (Luar Negeri) oleh asing</u>		
- Mempertahankan klas	10,700,000	-
- Statutoria	2,200,000	-
	<u>12,900,000</u>	<u>-</u>
<u>Klas ganda / dual class (Dalam Negeri)</u>		
- Penerimaan klas	4,238,629,358	2,407,524,936
- Mempertahankan klas	3,115,532,907	2,565,083,968
- Material dan komponen	283,153,430	115,316,415
- Statutoria	859,252,500	705,781,970
	<u>8,496,568,195</u>	<u>5,783,707,289</u>
<u>Klas ganda / dual class (Luar Negeri)</u>		
- Penerimaan klas	6,130,750,953	5,877,339,896
- Mempertahankan klas	9,247,708,421	1,637,565,570
- Statutoria	528,775,658	479,523,524
	<u>15,907,235,032</u>	<u>7,994,428,990</u>
<u>Klas asing di Indonesia</u>		
- Mempertahankan klas		14,520,000
		<u>14,520,000</u>
<u>Jumlah kerjasama dengan klas asing</u>	<u>24,416,703,227</u>	<u>13,802,656,279</u>
<u>Jumlah pendapatan Jasa klasifikasi</u>	<u>276,059,218,043</u>	<u>215,583,143,288</u>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

19. PENDAPATAN JASA (lanjutan)

B. Pendapatan Jasa Konsultansi dan Supervisi

	2012	2011
Bidang pengujian	50,620,934,345	43,079,641,489
Bidang inspeksi	56,176,134,569	46,842,276,776
Bidang rekayasa teknik	6,206,599,205	2,929,221,644
Bidang jasa marine	30,261,794,790	25,403,540,724
Lain-lain	5,498,624,849	1,266,722,003
Jumlah	148,764,087,758	119,521,402,636

C. Bagian Partner Kerjasama

	2012	2011
Kerjasama klas tunggal (<i>single class</i>)	-	(141,016,167)
Kerjasama klas ganda (<i>dual class</i>)	2,047,940,158	-
Kerjasama konsultansi dan supervisi	3,599,297,660	(878,190,000)
Jumlah	5,647,237,818	(1,019,206,167)

Bagian partner kerjasama adalah bagian pendapatan yang diberikan kepada mitra kerja asing dan lokal atas hasil kerjasama survey dan inspeksi

20. BEBAN JASA

	2012	2011
Beban perjalanan dinas survey	33,337,617,272	25,968,694,699
Beban material	5,989,458,757	5,134,078,504
Beban tenaga kerja proyek	11,172,202,265	14,979,321,770
Beban mobilisasi dan demobilisasi	6,647,333,343	6,214,115,770
Beban komitmen dan rekayasa proyek	17,038,831,519	13,840,390,921
Beban pelaporan	2,341,456,437	1,830,851,945
Jumlah	76,526,899,593	67,967,653,609

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

21. BEBAN PEMASARAN

	2012	2011
Beban pemasaran	4,951,406,570	3,885,534,940
Beban humas	1,044,662,708	1,119,054,948
Jumlah	5,996,069,278	5,004,589,888

22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2012	2011
Beban direksi & komisaris	8,987,986,579	6,022,252,528
Beban personel	144,272,164,747	109,936,019,947
Beban fasilitas kerja segmen	31,086,479,136	27,316,450,966
Beban pendidikan dan riset	13,314,085,870	11,520,544,275
Beban perjalanan dinas	4,263,853,660	4,833,963,289
Beban pengembangan operasi	16,641,536,881	13,497,726,107
Beban audit	312,624,839	171,259,145
Beban pemeliharaan	4,943,485,817	5,179,915,116
Beban penyusutan	6,866,800,645	11,719,000,947
Beban penyisihan piutang usaha	6,696,732,652	274,960,456
Beban provisi imbalan jangka panjang karyawan	10,955,803,884	3,852,904,912
Jumlah	248,341,554,710	194,324,997,688

Beban personel merupakan biaya-biaya yang berkaitan dengan pembayaran kepada karyawan baik di Kantor Pusat maupun cabang-cabang. Biaya personel tersebut terdiri dari: gaji dasar, gaji merit, gaji pangkat, tunjangan kesejahteraan, honorarium, tunjangan pengobalan, tunjangan cuti, tunjangan perumahan, asuransi dan tunjangan FPh pasal 21. Sedangkan beban Direksi dan Komisaris terdiri dari honorarium, tunjangan perumahan, tunjangan pengobalan, tunjangan listrik/PAM, uang cuti, asuransi, Tantiem, tunjangan komunikasi, tunjangan operasional dan fasilitas kendaraan. Pembebatan tersebut adalah sesuai dengan RKAP tahun 2012 yang telah disyahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT.BKI (Persero) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2012 Nomor : Kep-KU.01/DEKOM.101/I/2012 tanggal 13 Januari 2012.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

23. PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN

	2012	2011
Pendapatan lain-lain		
Pendapatan bunga deposito bersih	2,119,128,215	1,947,705,478
Selisih kurs laba	3,659,845,203	822,697,219
Lain-lain penerimaan Kas / Bank	-	58,788
Jasa Giro	186,513,253	166,727,685
Laba penjualan Aktiva	871,985,491	-
Sewa rumah	83,000,000	-
Revisi Pendapatan Jasa Klasifikasi	-	-
Revisi Pendapatan Jasa Konsultasi & Supervisi	22,670,000	22,087,500
Lain-lain Pendapatan	537,826,309	391,261,993
Jumlah	7,480,968,471	3,350,541,663

Didalam akun lain-lain pendapatan antara lain adalah penerimaan discount atas pembelian mobil dan alat laboratorium serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak di Singapore.

	2012	2011
Beban lain-lain		
Beban bunga	15,792,283	153,000
Selisih kurs rugi	257,785,537	882,195,361
Lain-lain pengeluaran Kas / Bank	-	27,640
Revisi Pendapatan Jasa Klasifikasi	593,559,540	102,492,070
Revisi Pendapatan Jasa Konsultasi & Supervisi	85,292,605	1,950,000
Denda pajak	10,286,731	33,108,600
Beban Bank	238,081,851	164,107,161
Beban denda	21,891,716	37,503,923
Beban duka	54,690,000	91,581,379
Lain-lain Beban	56,915,132	482,573,032
Jumlah	1,334,295,395	1,795,692,366

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

24. MANAJEMEN RISIKO FINANSIAL

Dari kegiatan usaha yang dijalankannya, Perusahaan menghadapi risiko-risiko keuangan yang meliputi:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Likuiditas
3. Risiko Pasar

Pengelolaan risiko-risiko tersebut saat ini dijalankan oleh Divisi Keuangan di Kantor Pusat dengan mengacu limit-limit risiko yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Penjabaran mengenai kebijakan pengelolaan ketiga jenis risiko tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko kerugian yang akan diderita Perusahaan apabila pelanggan gagal melunasi baik sebagian maupun seluruh kewajibannya kepada Perusahaan. Terdapat tiga faktor utama yang dapat menyebabkan pihak pelanggan mengalami gagal bayar yaitu kondisi makro ekonomi atau kondisi usaha pelanggan yang kurang baik, kesulitan keuangan yang dialami pelanggan, atau karakter/sifat baik pelanggan.

Berdasarkan pengalaman secara empiris, eksposur risiko kredit yang signifikan terdapat pada pos Piutang Usaha. Besarnya eksposur risiko kredit Piutang Usaha adalah sebagaimana yang tertera di Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2012 dan 2011 sebagai nilai tercatat Piutang Usaha (Catatan 5).

Sesuai arahan yang tertera dalam RKAP 2012 dan 2011, kebijakan yang ditetapkan Manajemen Perusahaan dalam membatasi eksposur risiko kredit tersebut adalah dengan menetapkan maksimal Collection Period piutang usaha untuk tahun 2012 dan 2011 adalah masing-masing 66 hari.

Dalam realisasinya, collection period piutang usaha selama tahun 2012 dan 2011 tercatat mencapai 96 hari dan 89 hari. Oleh karena itu, dalam tahun 2012 dan 2011, Perusahaan terus meningkatkan pencadangan untuk menganalisis risiko timbulnya kerugian tidak tertagihnya Piutang Usaha tersebut. Sebagaimana tertera dalam Catatan No. 5 atas laporan keuangan, Perusahaan telah menambah cadangan kerugian penurunan nilai piutang selama tahun 2012 sebesar Rp.6.696.732.652.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko ketidakmampuan Perusahaan untuk melunasi kewajiban keuangannya kepada pihak ekstern. Risiko ini timbul akibat ketidaksesuaian periode penerimaan kas dari penagihan piutang usaha dan periode jatuh tempo pembayaran kepada pihak ekstern (maturity mismatch). Risiko likuiditas berkaitan erat dengan risiko kredit, yaitu semakin panjang collection period atas piutang usaha maka Perusahaan akan semakin rentan mengalami risiko likuiditas.

Untuk menggambarkan eksposur risiko likuiditas per 31 Desember 2012, berikut ini diuraikan periode jatuh tempo liabilitas jangka pendek selama periode 12 bulan ke depan yaitu sebagai berikut:

	Periode Jatuh Tempo Selama 2013			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Utang Usaha	3.844.956.038			
Utang Lain-lain	13.089.412.174			
Utang Biaya	10.510.241.458	7.611.088.700		
Utang Pajak		22.088.634.966		
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	5.850.000			

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

24. MANAJEMEN RISIKO FINANSIAL (lanjutan)

Sesuai arahan yang tertera dalam RKAP 2012 dan 2011, kebijakan yang ditegakkan Manajemen Perusahaan dalam membalasi eksposur risiko likuiditas tersebut adalah dengan menjaga pencapaian Cash Ratio adalah masing-masing 73.69 % dan 60.54 % dari jumlah liabilitas jangka pendek.

Dalam realisasinya, cash ratio per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing mencapai 113.65% dan 97.30%.

c. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko terjadinya laba/rugi kurs akibat pertukaran mata uang asing yaitu USD atau SGD ke dalam Rupiah dan dari selisih penilaian kurs penutup saldo asset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing.

Eksposur risiko pasar dari nilai tukar mata uang asing yang dimiliki Perusahaan pada posisi 31 Desember 2012 dan 2011 dapat digambarkan sebagai berikut:

	31 Desember 2012			
	Dolar Amerika Serikat	Dolar Singapura	Euro	Selara Rupiah
Aset				
Kas dan selara kas	333,200.12	449,580.55	-	6,774,757,060
Piutang usaha	1,472,235.60	1,839,541.44	-	28,781,772,418
	<u>1,805,435.72</u>	<u>2,289,121.99</u>	<u>-</u>	<u>35,556,529,478</u>
Kewajiban	6,554.90	143,000.00	3,965.00	1,244,878,533
Jumlah aset bersih	<u>1,798,880.82</u>	<u>2,146,121.99</u>	<u>(3,965.00)</u>	<u>34,311,550,945</u>
	31 Desember 2011			
	Dolar Amerika Serikat	Dolar Singapura	Euro	Selara Rupiah
Aset				
Kas dan selara kas	55,575	628,359.46	-	4,886,129,618
Piutang usaha	585,513	2,119,163.81	-	20,088,485,645
	<u>641,088</u>	<u>2,747,523.27</u>	<u>-</u>	<u>24,974,615,263</u>
Kewajiban	51,268	-	-	464,902,032
Jumlah aset bersih	<u>589,820</u>	<u>2,747,523.27</u>	<u>-</u>	<u>24,509,713,231</u>

Hingga saat ini Perusahaan belum menetapkan kebijakan limit risiko pasar.

Sebagaimana tertera pada Catatan No. 23 atas laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011, Besarnya laba/rugi kurs yang terjadi adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Laba Kurs	3,659,845,203	822,697,219
Rugi Kurs	(257,785,537)	(882,195,361)
Laba (Rugi) Netto	3,402,059,666	(59,498,142)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

25. MANAJEMEN PERMODALAN

Manajemen Perusahaan melakukan pengelolaan kecukupan permodalan dengan tujuan menjaga kemampuan Perusahaan dalam menjamin kelangsungan usahanya sehingga Perusahaan dapat memenuhi seluruh komitmennya baik kepada Pemegang Saham, Fiskus, rekanan penyedia barang/jasa, maupun karyawan.

Sesuai arahan RKAP 2012 dan 2011, Perusahaan terus berupaya menjaga rasio kecukupan modal dengan mengacu sebagai perbandingan antara jumlah seluruh aset (di luar aset yang belum jelas statusnya) dibagi dengan jumlah modal sendiri (di luar dana yang belum jelas statusnya).

Dalam realisasinya per 31 Desember 2012 dan 2011, rasio modal terhadap total asset mencapai 76.39 % dan 75.20% .

26. PERJANJIAN SIGNIFIKAN

Perusahaan memperoleh fasilitas garansi bank dari Bank Mandiri Kantor Pusat berdasarkan Perjanjian Pembelian Fasilitas Garansi Bank dengan nomor: KP-COD/011/PGB/2004 tanggal 23 Juni 2004. Perjanjian ini telah diperbaharui beberapa kali dan terakhir dengan Addendum IX tentang Perpanjangan Jangka Waktu dan peningkatan plafond Fasilitas Garansi Bank sesuai surat bank Mandiri Nomor : TOP.CRO/CLA.152/ADD/2012 tanggal 24 April 2012 dan mengacu pada surat bank Mandiri No: CPG.CB1/SPPK/DO3.002/2012 tanggal 29 Februari 2012 . Addendum ini berlaku selama 1 tahun sampai dengan tanggal 23 Juni 2013. Dengan perjanjian ini perusahaan tidak perlu mengeluarkan uang tunai untuk penerbitan Garansi Bank. Besarnya plafond sebesar Rp8.000.000.000 dari plafond sebelumnya Rp 5.000.000.000. Tujuan penggunaan adalah penerbitan tender bond, Advance payment Bond, Performance Bond, dan Retensi Bond.

Fasilitas ini dijamin oleh: piutang usaha dan sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Nomor: 2131/Kebon Bawang yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, kecamatan Tanjung Priok. Bidang tanah dan bangunan ini telah dibebani dengan Hak Tanggungan dengan nilai total sebesar Rp 16.000.000.000.

Tujuan penggunaan: Penerbitan tender bond (untuk mengikuti tender), advance payment bond, performance bond (atas dasar kontrak kerja atau SPK), retensi bond (surat penegasan dari bowheer bahwa proyek telah memasuki masa retensi).

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

27. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2011 DAN NERACA 1 JANUARI 2011 (31 DES 2010)

Berkenaan dengan penerapan SAK terbaru yang berlaku di tahun buku 2012, beberapa pos laporan keuangan tahun 2011 telah dilakukan penyajian kembali secara retrospektif. Mengacu ketentuan PSAK 1 (Revisi 2009), penyajian kembali tersebut harus dilukti dengan penyajian kembali Neraca per 31 Desember 2010 (1 Januari 2011).

Beberapa pos laporan keuangan yang mengalami perubahan signifikan sebagai konsekuensi dari hal di atas dapat dikhlasarkan sebagai berikut :

Iktisar Penyajian Kembali Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2011 dan 2010 (1 JANUARI 2011)

Nama Pos Neraca	Sebelum Penyajian Kembali	Penyesuaian Reklasifikasi				Setelah Disajikan Kembali
		Ref.	Dr.	Ref.	Cr.	
Aset Lancar						
Kas dan Selara Kas	50,429,221,991	27.c	56,045,672			50,485,267,063
Tagihan Bruto		27.a	1,725,100,296			1,725,100,296
Plutang Lain-Lain	224,529,784			27.d	224,529,784	-
Uang Muka	528,641,765			27.d	528,641,765	-
Biaya Dibayar di Muka	2,723,925,297			27.a	1,725,100,296	-
Pajak Dibayar di Muka	15,560,014,709			27.d	998,825,001	-
Aset Lancar Lainnya		27.d	1,751,996,550			1,751,996,550
Aset Tidak Lancar						
Uang Jaminan	199,210,268			27.d	143,164,596	-
Hak atas Penggunaan Tanah	10,625,600			27.c	56,045,672	-
Aset Tidak Lancar Lainnya		27.d	153,790,196			153,790,196
Libilitas Jangka Pendek						-
Ulang Pajak	29,389,520,877	27.b	15,560,014,709			13,829,506,168
Jumlah Penyesuaian			19,246,947,423		19,246,947,423	-

Nama Pos Neraca	Sebelum Penyajian Kembali	Penyesuaian Reklasifikasi				Setelah Disajikan Kembali
		Ref.	Dr.	Ref.	Cr.	
Aset Lancar						
Kas dan Selara Kas	35,330,584,804	27.c	73,527,722			35,404,112,526
Tagihan Bruto		27.a	1,272,335,164			1,272,335,164
Plutang Lain-Lain	88,003,295			27.d	88,003,295	-
Uang Muka	681,079,500			27.d	681,079,500	-
Biaya Dibayar di Muka	2,282,767,618			27.a	1,272,335,164	-
Pajak Dibayar di Muka	399,325,126			27.d	1,010,432,454	-
Aset Lancar Lainnya		27.d	1,779,515,249			1,779,515,249
Aset Tidak Lancar						
Uang Jaminan	162,166,224			27.d	88,638,502	-
Hak atas Penggunaan Tanah	15,938,400			27.c	73,527,722	-
Aset Tidak Lancar Lainnya		27.d	104,576,902			104,576,902
Libilitas Jangka Pendek						-
Ulang Pajak	8,758,593,915	27.b	399,325,126			8,359,268,789
Jumlah Penyesuaian			3,629,280,163		3,629,280,163	-

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

27. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2011 DAN NERACA 1 JANUARI 2011 (31 DESEMBER 2010) (lanjutan)

a. Pengakuan Tagihan Bruto atas Kemajuan Pekerjaan di bidang Konsultansi dan Supervisi

Mengacu PSAK 23 (Revisi 2009), pengakuan pendapatan atas penyerahan jasa dilakukan berdasarkan penilaian tingkat kemajuan (progress) pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan. Pendapatan yang diakui pada tahap ini disajikan sebagai Tagihan Bruto. Jumlah ini belum dapat diakui sebagai Piutang Usaha, karena sesuai kontrak / perikatan yang dibuat dengan pihak pelanggan (pemberi kerja), penagihan termin baru dapat dilaksanakan setelah Perusahaan memenuhi beberapa persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan.

Untuk memenuhi prinsip ini, terhadap beberapa order pekerjaan di segmen Konsultasi dan Supervisi dilakukan reklasifikasi dari pos Beban Dibayar di Muka ke pos Tagihan Bruto. Adapun porsi Laba Kotor dari Tagihan Bruto ini tidak disesuaikan karena pertimbangan materialitas jumlahnya.

Jumlah-jumlah tagihan bruto ini pada periode selanjutnya akan dipindahkan menjadi Piutang Usaha setelah seluruh persyaratan teknis dan administratif sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak telah dipenuhi dan diakses oleh pihak Pelanggan (Pemberi Kerja).

b. Penyajian Aset dan Liabilitas Pajak Kini secara Neto.

Mengacu PSAK 46 (Revisi 2010), baik Aset maupun Pajak kini harus disajikan di Laporan Posisi Keuangan secara neto. Oleh karena itu karena terkait dengan obligasi pajak yang sama dan sesuai kelentuan perpajakan yang berlaku, penyelesaian Liabilitas Pajak Kini dilakukan secara neto setelah memperhitungkan pajak-pajak yang telah dibayar selama tahun fiskal, maka baik Aset maupun Liabilitas Pajak Kini per 31 Desember 2011 disajikan secara neto.

c. Reklasifikasi Uang Jaminan penerbitan Bank Garansi

Mengacu PSAK 1 (Revisi 2009), kas dan selara kas yang dijadikan uang jaminan atas liabilitas yang jatuh tempoanya tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan tetap dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar.

Oleh karena itu, kas dan selara kas yang dijadikan jaminan atas penerbitan Bank Garansi yang berdurasi tidak lebih dari 12 bulan, direklasifikasi dari pos Uang Jaminan - Aset Tidak Lancar ke pos Kas dan Selara Kas - Aset Lancar.

d. Agregasi Pos-Pos yang Nilainya tidak material dan bukan merupakan Pos utama.

Mengacu PSAK 1 (Revisi 2009), pos-pos di Laporan Posisi Keuangan (Neraca) yang nilainya tidak signifikan dapat diagregasikan penyajiannya bersama pos-pos lain yang tidak sejenis.

Untuk itu maka beberapa pos Aset Lancar di Neraca yang meliputi Piutang Lain-Lain, Uang Muka, Biaya Dibayar di muka, dan Pajak Dibayar di Muka diagregasikan penyajiannya sebagai Aset Lancar Lainnya.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam rupiah)

27. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2011 DAN NERACA 1 JANUARI 2011 (31 DESEMBER 2010) (lanjutan)

Iktisar Penyajian Kembali Laporan Laba Rugi Komprehensif untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 :

Nama PosLaba Rugi	Sebelum Penyajian Kembali	Penyesualan				Setelah Penyajian Kembali
		Ref.	Dr.	Ref.	Cr.	
Pendapatan	334,085,339,757	-				334,085,339,757
Beban Jasa	193,982,838,754	-	-	27.e	126,015,185,145	67,967,653,609
Laba Kotor	140,102,501,003	-	-			266,117,686,148
BEBAN USAHA						
Beban Pemasaran & Humas	5,004,589,886	-	-	-	-	5,004,589,886
Beban Administrasi & Umum	68,309,812,543	27.e	126,015,185,145			194,324,997,688
Pajak Dibayar di Muka	73,314,402,431					109,329,587,576
Laba Usaha	66,788,098,572					66,788,098,572
Jumlah Penyesualan			126,015,185,145		126,015,185,145	-

- e. Penjelasan atas dilakukannya penyajian kembali laporan laba rugi komprehensif tahun buku 2011 adalah mengacu pada ketentuan PSAK 23 (Revisi 2010) paragraf 20 j.o. PSAK 34 (Revisi 2010) paragraf 19. Menurut ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pada dasarnya yang dapat dikategorikan sebagai beban Jasa atau beban kontrak adalah beban langsung dan beban lemahnya yang dapat dialokasikan atau dialokasikan secara sistematis kepada tiap-tiap kontrak. Dari hasil penelaahan kembali yang dilakukan, teridentifikasi adanya delapan komponen beban yang berjumlah Rp. 126.015.185.145 yang semula dilaporkan sebagai Beban Jasa namun ternyata belum dapat dialokasikan atau dialokasikan secara sistematis kepada tiap-tiap kontrak.

Oleh karena itu sesuai ketentuan tersebut, kedelapan komponen biaya tersebut direklasifikasi sebagai Beban Administrasi dan Umum.

26. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan, tidak terdapat peristiwa tanggal neraca yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan.

29. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan setuju untuk diterbitkan pada tanggal 8 Maret 2013.

PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

LAPORAN EVALUASI KINERJA

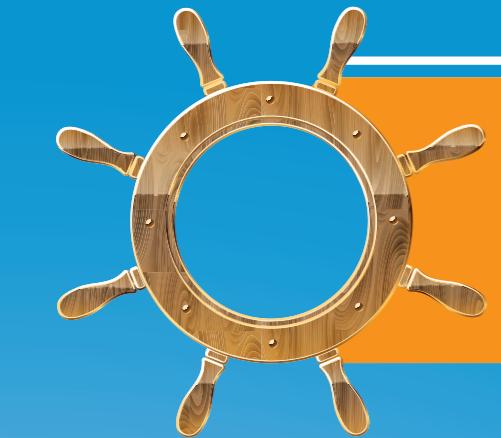
PERFORMANCE EVALUATION REPORT

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 1 Maret 2012
(Dengan angka perbandingan untuk tahun yang berakhir 1 maret 2011)

Beserta
Laporan Auditor Independen

ANNUAL REPORT 2012

Blue



MENGUTAMAKAN MUTU PELAYANAN JASA
BERDASARKAN KOMITMEN YANG TINGGI
TERHADAP ASPEK KESELAMATAN DAN BERTINDAK
PROFESIONAL, INDEPENDEN SERTA TERPERCAYA
DI ATAS KEPENTINGAN SEMUA PIHAK

GIVING PRIORITY TO THE QUALITY OF SERVICES BASED
ON HIGH COMMITMENT TO THE SAFETY ASPECT AND
ACT PROFESSIONAL, INDEPENDENT AND TRUSTED OVER
THE INTEREST OF ALL PARTIES



Magenta

Yellow

Black